

**KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA SEMARANG:
KARAKTERISTIK DAN RESPON KEBIJAKAN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:
AMELIA RENGAPRATIWI
L4D 008 140



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA SEMARANG : KARAKTERISTIK DAN RESPON KEBIJAKAN

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**AMELIA RENGAPRATIWI
L4D 008 140**

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 30 Oktober 2009

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 30 Oktober 2009

Tim Penguji :
Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP - Pembimbing
DR. Syafrudin Budiningharto, SU - Penguji
Ir. Hadi Wahyono, MA - Penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, Oktober 2009

AMELIA RENGAPRATIWI

L4D 008 140



“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”
(QS Al Insyirah 94: 6-7)

Ketekunan merupakan unsur terbesar untuk meraih sukses
(Henry Wadsworth L.)

Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan
walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan
tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang
mulus. (Thomas Carlyle)

Karya sederhana ini, aku persembahkan sebagai ungkapan
syukurku kepada Allah SWT
dan untuk Papah dan Mamah Tersayang
serta untuk kakak dan adekku tersayang,
Mas Angga dan Dek Ari



ABSTRAK

Urbanisasi merupakan proses yang mempengaruhi perkembangan kota-kota yang salah satunya dipicu oleh semakin banyaknya penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan baik yang disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk maupun migrasi penduduk. Fenomena urbanisasi tersebut menyebabkan pertumbuhan wilayah perkotaan yang semakin luas. Proses perkembangan perkotaan menyebabkan semakin besarnya heterogenitas di perkotaan dimana tiap kelompok penduduk berusaha untuk menempati ruang sendiri di kota sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan otonomi lokal. Karakteristik kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh penyebab kemiskinan. Selain itu, perbedaan karakteristik wilayah mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan, sehingga selanjutnya perlu direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin pada masing-masing wilayah. Sebagai kota yang mengalami perkembangan, Kota Semarang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan namun dalam perkembangannya, tingkat kemiskinan di Kota Semarang masih cenderung meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan dalam perkembangan Kota Semarang. Kemudian dapat diketahui kesesuaian respon kebijakan tersebut terhadap karakteristik kemiskinan yang terjadi. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis deskripsi kuantitatif dan kualitatif.

Proses penelitian dimulai dengan menganalisis karakteristik kemiskinan perkotaan dan menganalisis respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi kesesuaian respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan terhadap karakteristik kemiskinan perkotaan dalam perkembangan Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa respon kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Semarang belum sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah. Hal ini ditunjukkan tidak semua karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang sudah direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan. Lebih lanjut, karakteristik kemiskinan yang digambarkan oleh keterbatasan pendidikan dan keterampilan belum banyak direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan yang dibutuhkan. Respon kebijakan penanganan kemiskinan yang paling dibutuhkan oleh penduduk miskin di Kota Semarang adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan ekonomi bagi mereka. Namun, secara garis besar, strategi anti-kemiskinan yang masih banyak dilakukan di seluruh wilayah Kota Semarang adalah pemberian bantuan langsung dan penyediaan pelayanan sosial yang bersifat fisik, sedangkan strategi anti-kemiskinan yang bersifat pemberdayaan melalui pelatihan dan pengembangan usaha kecil dan menengah belum banyak dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Perbedaan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah seharusnya mendapat penanganan yang berbeda. Namun, pada kenyataannya respon kebijakan yang dilakukan belum memperhatikan perbedaan karakteristik spasial yang mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah.

Kata kunci : kemiskinan, karakteristik, respon kebijakan

ABSTRACT

Urbanization is a process that influences the development of cities, one of which is triggered by the increasing number of people living in urban areas due to both natural population growth and migration. The phenomenon of urbanization causes the growth of urban areas expanded. The process of urban development causes the grow of urban population's heterogeneity where each group tries to occupy their own space in the city as part of an effort to get local autonomy. Characteristics of poverty is influenced by the causes of poverty. In addition, differences in regional characteristics affect the difference of poverty characteristics which needs policy to respon the poverty issue in accordance with the needs of poor communities in each region. Semarang is inseparable from the problem of poverty. Various programs to eradicate poverty have been done there yet, the poverty rate in Semarang seems increase.

This study aims to understand the characteristics of poverty and the policy's response to eradicate poverty in the development of Semarang. Therefore, the policy's response conformity toward the characteristic of ongoing poverty will be identified. Research methods to be used in this study is a qualitative method. While analysis tools used in this study are quantitative and qualitative descriptions analysis.

The research process begins by analyzing the characteristics of urban poverty and policy response to urban poverty management. Then, it is proceeded with the identification of the policy response's conformity to the characteristics of urban poverty in the development of Semarang. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the policy response to eradicate the poverty in Semarang has not yet worked in accordance with the characteristics of poverty that occurs in each region. This is indicated by the fact that not all of the characteristics of poverty occurred in Semarang has been responded by a policy to eradicate poverty. Furthermore, the characteristics of the poverty is illustrated by the limited education and skills which have not been responded by the policies. The policy responses that are mostly needed by poor people in Semarang are the empowerment for independence and economic sustainability. However, in general, anti-poverty strategy that is implemented through training and development for small to medium businesses have not yet fully realized to eradicate the poverty at Semarang. The different characteristics of poverty that occurred in each region should receive different treatment. However, the policy responses have not yet consider the spatial differences, even though it influences the differences of povety characteristics that occur in each region.

Keywords : poverty, characteristic, policy response

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Tesis dengan judul “Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang : Karakteristik dan Respon Kebijakan’ ini dapat terselesaikan dengan baik. Atas penyusunan laporan tesis ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

- Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya.
- Terima kasih yang tidak terhingga untuk Ayah, Ibu dan kakak-adik penyusun atas segala doa dan dukungan serta limpahan kasih sayang yang tidak ada hentinya.
- Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan beasiswa bagi penyusun dalam melanjutkan studi S2 di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
- Bapak Dr. Joesron Alie Syahbana selaku ketua program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
- Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku sekretaris program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota sekaligus dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan selama ini.
- Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA dan Bapak DR. Syafrudin Budiningharto, SU atas semua masukan dan arahan dalam laporan tesis ini.
- Masyarakat dan pemerintah Kota Semarang yang sudah direpotkan dengan kegiatan survei penyusun.
- Semua pihak yang mendukung dalam penyusunan laporan ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan laporan tesis ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kekurangan dan kelemahan tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran.

Semarang, Oktober 2009

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Sasaran	5
1.3.1 Tujuan.....	5
1.3.2 Sasaran.....	5
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi.....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.5.1 Manfaat Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Praktis	9
1.6 Posisi Penelitian	9
1.7 Kerangka Pikir Penelitian	10
1.8 Sistematika Pembahasan	13
BAB II KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA	14
2.1 Urbanisasi sebagai Proses Perkembangan Kota.....	14
2.2 Pemahaman tentang Kemiskinan Perkotaan	17
2.2.1 Pengertian Kemiskinan.....	17
2.2.2 Penyebab Kemiskinan	19
2.2.3 Karakteristik Kemiskinan Perkotaan	20
2.2.4 Fakta Kemiskinan di Dunia	24
2.3 Strategi Anti-Kemiskinan	27
2.3.1 Model Strategi Anti-Kemiskinan.....	27
2.3.2 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.....	34
2.4 Sintesis Kajian Literatur.....	36

2.4.1	Perpektif Teoritik.....	36
2.4.2	Variabel Penelitian	39
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1	Pendekatan dan Metode Penelitian	40
3.2	Operasionalisasi Penelitian	41
3.2.1	Definisi Operasional	41
3.2.2	Kerangka Analisis.....	42
3.3	Data Penelitian	43
3.3.1	Data yang digunakan dan Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.3.2	Teknik <i>Sampling</i> Penelitian.....	46
3.3.3	Pengelompokkan dan Pengkodean Data.....	49
3.4	Analisis Data	50
BAB IV	PERKEMBANGAN KEMISKINAN DAN RESPON KEBIJAKANNYA DI KOTA SEMARANG.....	54
4.1	Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Semarang	54
4.1.1	Pertumbuhan Penduduk Perkotaan.....	55
4.1.2	Perekonomian	56
4.1.3	Pola dan Struktur Penggunaan Lahan.....	59
4.2	Karakteristik Wilayah di Kota Semarang	60
4.3	Pertumbuhan Kemiskinan di Kota Semarang	62
4.4	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.....	65
4.5	Wilayah Fokus Penelitian	66
BAB V	ANALISIS KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA SEMARANG.....	69
5.1	Karakteristik Wilayah	69
5.2	Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kota Semarang.....	71
5.2.1	Karakteristik Kemiskinan di CBD	71
5.2.2	Karakteristik Kemiskinand di Zona Transisi	75
5.2.3	Karakteristik Kemiskinand di Wilayah Pinggiran	79
5.2.3.1	Wilayah Pinggiran dengan Status Kota.....	80
5.2.3.2	Wilayah Pinggiran dengan Status Desa	84
5.2.4	Kesimpulan Analisis Karakteristik Kemiskinan	90
5.3	Analisis Respon Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kemiskinan di Kota Semarang.....	95
5.3.1	Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di CBD	95
5.3.2	Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Zona Transisi	98
5.3.3	Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Di Wilayah Pinggiran.....	101
5.3.3.1	Wilayah Pinggiran dengan Status Kota.....	101
5.3.3.2	Wilayah Pinggiran dengan Status Desa	103
5.3.4	Kesimplan Analisis Respon Kebijakan.....	107

5.4	Identifikasi Kesesuaian Respon Kebijakan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Kota Semarang.....	111
5.4.1	Identifikasi Kesesuaian Respon Kebijakan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Wilayah CBD.....	111
5.4.2	Identifikasi Kesesuaian Respon Kebijakan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Zona Transisi	113
5.4.3	Identifikasi Kesesuaian Respon Kebijakan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Wilayah Pinggiran	114
5.5	Temuan Studi	118
BAB VI	PENUTUP	123
6.1	Kesimpulan	123
6.2	Rekomendasi	124
	DAFTAR PUSTAKA	127
	LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	: Kebijakan Terkait Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota.....	31
TABEL II.2	: Perkembangan Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.	35
TABEL II.3	: Variabel Penelitian Kemiskinan dalam Perkembangan Kota Semarang	39
TABEL III.1	: Kebutuhan Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian	44
TABEL III.2	: Jumlah Sampel Tiap Kelurahan.....	49
TABEL IV.1	: Klasifikasi Pembagian Wilayah Kota Semarang.....	61
TABEL IV.2	: Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin Kota Semarang Tahun 2002 – 2006	64
TABEL IV.3	: Pemilihan Wilayah Fokus Penelitian.....	67
TABEL V.1	: Karakteristik Wilayah di Kota Semarang.....	69
TABEL V.2	: Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Peterongan	72
TABEL V.3	: Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Bongsari.....	77
TABEL V.4	: Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Mangkang Wetan	81
TABEL V.5	: Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Rowosari.....	85
TABEL V.6	: Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Mangunsari....	89
TABEL V.7	: Gabungan Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kota Semarang.....	91
TABEL V.8	: Kesimpulan Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kota Semarang.....	94
TABEL V.9	: Analisis Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Peterongan.....	96
TABEL V.10	: Program Penanganan Kemiskinan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Peterongan.....	98
TABEL V.11	: Analisis Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Bongsari	99
TABEL V.12	: Program Penanganan Kemiskinan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Bongsari	100
TABEL V.13	: Analisis Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Mangkang Wetan	101
TABEL V.14	: Program Penanganan Kemiskinan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Mangkang Wetan	103
TABEL V.15	: Analisis Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Rowosari.....	103
TABEL V.16	: Program Penanganan Kemiskinan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Rowosari	105
TABEL V.17	: Analisis Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Mangunsari.....	105

TABEL V.18	: Program Penanganan Kemiskinan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Kelurahan Mangunsari	107
TABEL V.19	: Rekap Analisis Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kota Semarang	108
TABEL V.20	: Kesimpulan Analisis Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kota Semarang.....	111
TABEL V.21	: Kesesuaian Karakteristik Kemiskinan dan Respon Kebijakan di Kelurahan Peterongan	112
TABEL V.22	: Kesesuaian Karakteristik Kemiskinan dan Respon Kebijakan di Kelurahan Bongsari	113
TABEL V.23	: Kesesuaian Karakteristik Kemiskinan dan Respon Kebijakan di Kelurahan Mangkang Wetan	114
TABEL V.24	: Kesesuaian Karakteristik Kemiskinan dan Respon Kebijakan di Wilayah Pinggiran Status Desa	115
TABEL V.25	: Kesimpulan Identifikasi Kesesuaian Karakteristik Kemiskinan dan Respon Kebijakan	116
TABEL V.26	: Penanganan Kemiskinan Terhadap Karakteristik Kemiskinan yang Terjadi di Kota Semarang.....	117

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Semarang Tahun 2002-2006.....	3
GAMBAR 1.2	: Wilayah Studi Penelitian.....	8
GAMBAR 1.3	: Kerangka Pikir Penelitian	12
GAMBAR 2.1	: Penyebab Kemiskinan.....	20
GAMBAR 2.2	: Dampak Kumulatif Kemiskinan Perkotaan	20
GAMBAR 2.3	: Pertumbuhan Penduduk Miskin di Indonesia menurut Wilayah Tahun 1996-2005	26
GAMBAR 2.4	: Kemiskinan dalam Perkembangan Kota dalam Perspektif Teori.....	38
GAMBAR 3.1	: Metode Penelitian	40
GAMBAR 3.2	: Analisis Karakteristik Kemiskinan	51
GAMBAR 3.3	: Analisis Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan	52
GAMBAR 3.4	: Identifikasi Kesesuaian Respon Kebijakan terhadap Karakteristik Kemiskinan	53
GAMBAR 4.1	: Peta Kota Semarang.....	54
GAMBAR 4.2	: Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 1996 – 2007 ..	55
GAMBAR 4.3	: Mata Pencarian Penduduk Kota Semarang Tahun 2007	56
GAMBAR 4.4	: Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2001 – 2006	57
GAMBAR 4.5	: Prosentase Kontribusi PDRB Tiap Sektor di Kota Semarang Tahun 2006	58
GAMBAR 4.6	: Rata-rata Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kota Semarang Tahun 2006.....	58
GAMBAR 4.7	: Tata Guna Lahan Kota Semarang Tahun 2007	59
GAMBAR 4.8	: Peta Klasifikasi Pembagian Wilayah Kota Semarang	62
GAMBAR 4.9	: Jumlah Penduduk yang Masuk Kota Semarang Tahun 2002-2006.....	63
GAMBAR 4.10	: Jumlah Rumahtangga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2006.....	64
GAMBAR 4.11	: Wilayah Fokus Penelitian	68
GAMBAR 5.1	: Lingkungan Kelurahan Peterongan.....	72
GAMBAR 5.2	: Lingkungan Rumah Keluarga Miskin di Kelurahan Peterongan	75
GAMBAR 5.3	: Lingkungan Permukiman di Kelurahan Bongsari yang Cenderung padat	76
GAMBAR 5.4	: Kondisi Rumah Keluarga Miskin di Kelurahan Bongsari	79
GAMBAR 5.5	: Areal Tambak di Kelurahan Mangkang Wetan Bagian Utara Yang Mulai Rusak	80

GAMBAR 5.6 : Lingkungan Permukiman Keluarga Miskin di Kelurahan Mangkang Wetan.....	83
GAMBAR 5.7 : Kondisi Wilayah Kelurahan Rowosari	84
GAMBAR 5.8 : Kondisi Rumah Keluarga Miskin di Kelurahan Rowosari	87
GAMBAR 5.9 : Areal Pertanian di Kelurahan Mangunsari.....	88
GAMBAR 5.10 : Kondisi Rumah Keluarga Miskin di Kelurahan Mangunsari.....	90
GAMBAR 5.11 : Hasil Analisis Karakteristik Kemiskinan.....	93
GAMBAR 5.12 : Perbaikan Rumah Keluarga Miskin di Kelurahan Mangunsari.....	107
GAMBAR 5.13 : Hasil Analisis Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan.....	110

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A : Form Kuesioner	131
LAMPIRAN B : Hasil Rekapitulasi Kuesioner	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota-kota dipengaruhi oleh proses terjadinya urbanisasi yang dapat dilihat berdasarkan aspek demografi, ekonomi, dan sosial. Berkaitan dengan aspek demografi, pertumbuhan penduduk di perkotaan ini disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk maupun migrasi penduduk. Selain itu, perkembangan tersebut juga disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi yang dapat dilihat dari adanya pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, seperti perdagangan dan industri. Sedangkan berdasarkan aspek sosial, perkembangan wilayah perkotaan dapat dilihat dari adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya (Mc Gee, 1971).

Perkembangan kota-kota tersebut diiringi oleh perubahan positif dan negatif. Perubahan positif yang terlihat adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini menciptakan dinamika perkotaan, perubahan penggunaan lahan, serta munculnya permukiman legal dan ilegal serta permasalahan lain. Selain itu, wilayah perkotaan yang semakin tumbuh dan berkembang juga menyebabkan berkembangnya heterogenitas yang menunjukkan perbedaan sosial penduduknya (Mc Gee, 1995).

Heterogenitas tersebut selanjutnya lebih jelas terlihat dari adanya sektor formal dan informal perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan antara kelompok penduduk berdasarkan perbedaan ekonomi dan sosial penduduknya. Kegiatan ekonomi formal di perkotaan tidak mampu menyerap pekerja dengan pendidikan dan kemampuan rendah, sehingga pekerja dengan produktivitas rendah bekerja pada sektor informal (Lacabana dan Cariola, 2003). Selain itu, adanya permukiman kumuh dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan di perkotaan.

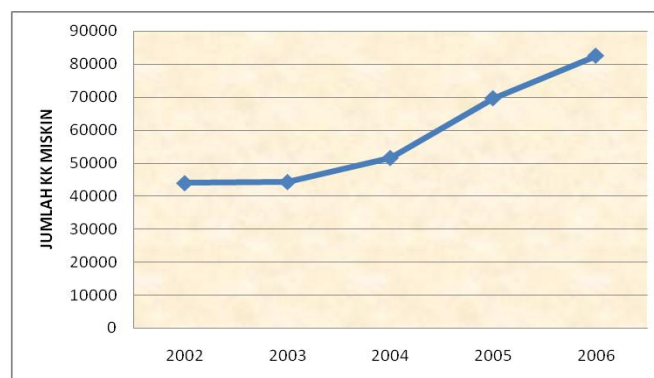
Persebaran kemiskinan pada ruang-ruang perkotaan memiliki perbedaan karakteristik kemiskinan. Vandell (1995) menjelaskan bahwa heterogenitas lingkungan dipengaruhi oleh berbagai dimensi antara lain karakteristik perumahan, fasilitas lingkungan, aksesibilitas, dan penduduk yang antara lain terlihat dari adanya perbedaan ras, pendapatan, kekayaan, pendidikan, pekerjaan (Wassmer, 2002).

Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan penduduk dalam memperoleh pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator keterbatasan tersebut sering ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan penduduk yang terdiri dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Indikator-indikator juga sering digunakan sebagai indikator kemiskinan. Tingkat kesejahteraan penduduk yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terbentuk dalam komunitas akan memberikan karakteristik kemiskinan yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya (Baharoglu dan Kessides, 2001).

Perkembangan kota di dunia baik di negara berkembang maupun negara maju diiringi dengan permasalahan yang hampir sama yaitu menurunnya tingkat pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat kota. Hal ini salah satunya diperlihatkan oleh fenomena kemiskinan yang terjadi di kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Dalam kurun waktu 5 tahun (2003-2007), kepadatan penduduk cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan yang begitu pesat, secara fisik mengakibatkan wilayah administratif Kota Semarang dituntut untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan lokasi untuk berbagai kegiatan yang diminati dan dikembangkan oleh dunia usaha ataupun oleh masyarakat sehingga Kota Semarang mengalami perluasan wilayah yang cenderung mengarah pada perkembangan wilayah metropolitan. Perkembangan Kota Semarang juga diindikasikan dari adanya peningkatan perekonomian yang semakin meningkat menjadi 5,11% pada tahun 2005. Sejalan dengan perkembangan ekonomi Jawa Tengah yang membaik, kinerja ekonomi

Kota Semarang Tahun 2006 juga mengalami peningkatan sebesar 5,34% (*PDRB Kota Semarang, 2006*).

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang semakin meningkat ternyata permasalahan mengenai kemiskinan perkotaan semakin nyata. Penduduk miskin Kota Semarang selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar. Tingkat kemiskinan di Kota Semarang cenderung berkembang antara tahun 2002-2006. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Kota Semarang Dalam Angka, 2006

GAMBAR 1.1
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA SEMARANG
TAHUN 2002-2006

Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan sebagai respon kebijakan terhadap kemiskinan yang terjadi. Program penanggulangan kemiskinan tersebut baik bersumber dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun dalam perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Kota Semarang masih meningkat.

Perbedaan karakteristik wilayah di Kota Semarang mempengaruhi karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah. Oleh karena itu, perlu diketahui karakteristik kemiskinan di Kota Semarang. Hal ini seharusnya mempengaruhi perbedaan penanganan kemiskinan di masing-masing wilayah di Kota Semarang. Pemerintah Semarang sendiri telah memiliki

kebijakan penanganan kemiskinan. Namun, bagaimana kebijakan tersebut merespon karakteristik kemiskinan yang terjadi belum diteliti.

1.2 Perumusan Masalah

Perkembangan Kota Semarang telah menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, dan budaya penduduknya. Perbedaan perkembangan antara masing-masing wilayah di Kota Semarang menyebabkan heterogenitas lingkungan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai dimensi antara lain karakteristik perumahan, fasilitas lingkungan, aksesibilitas, dan penduduk. Perbedaan karakteristik wilayah tersebut selanjutnya dapat mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah. Perbedaan karakteristik kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan lokasi dan persebaran ketersediaan sarana yang merupakan salah satu faktor yang menentukan kemiskinan. Berdasarkan pemahaman tentang kemiskinan, beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik kemiskinan perkotaan antara lain berkaitan dengan penyebab kemiskinan perkotaan.

Berdasarkan penilaian klasifikasi harga lahan, kepadatan bangunan, penggunaan lahan wilayah Kota Semarang diklasifikasikan menjadi 3 bagian wilayah yaitu pusat kota (CBD), tengah kota (zona transisi), pinggiran kota (*sub urban*) (Sulistyaningsih, 2007). Adapun pola spasial perkotaan tersebut mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan perkotaan di wilayah tersebut.

Perbedaan tersebut selanjutnya perlu direspon oleh kebijakan pemerintah yang tepat. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki kebijakan penanganan kemiskinan. Namun, bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut merespon kemiskinan yang terjadi seiring perkembangan Kota Semarang belum diketahui. Hal ini berkaitan dengan strategi anti-kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang karena dalam perkembangannya, tingkat kemiskinan di Kota Semarang masih cenderung meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing bagian wilayah dan respon kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan yang terjadi. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

- Bagaimana karakteristik kemiskinan berdasarkan klasifikasi wilayah di Kota Semarang?
- Bagaimana respon kebijakan penanganan kemiskinan berdasarkan klasifikasi wilayah di Kota Semarang?
- Bagaimana kesesuaian respon kebijakan tersebut terhadap karakteristik kemiskinan berdasarkan klasifikasi wilayah di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan dalam perkembangan Kota Semarang. Adapun keluaran dari tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dan alternatif bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penanganan kemiskinan selanjutnya di Kota Semarang.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut :

- Menganalisis karakteristik kemiskinan berdasarkan klasifikasi wilayah di Kota Semarang.
- Menganalisis respon kebijakan penanganan kemiskinan berdasarkan klasifikasi wilayah di Kota Semarang.
- Mengidentifikasi kesesuaian respon kebijakan terhadap karakteristik kemiskinan berdasarkan klasifikasi wilayah di Kota Semarang.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini sebatas pada pengkajian untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan di Kota Semarang. Teori-teori yang ada digunakan untuk mengkaji fenomena kemiskinan yang terjadi di wilayah studi penelitian yaitu teori kemiskinan perkotaan dan strategi pengentasan kemiskinan.

Kajian mengenai kemiskinan disini merupakan kajian mengenai wujud kemiskinan dalam kaitannya dengan perkembangan wilayah perkotaan secara teoritis. Besarnya kejadian kemiskinan perkotaan pada masing-masing wilayah perkotaan yang terdapat di Kota Semarang akan berpengaruh pada karakteristik kemiskinan di wilayah tersebut. Adapun kajian mengenai kemiskinan mencakup beberapa hal yang menjadi batasan penelitian dan mengarah pada identifikasi karakteristik kemiskinan perkotaan yang dipengaruhi oleh penyebab terjadinya kemiskinan. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari karakteristik penduduk miskin di masing-masing wilayah yang diteliti. Karakteristik yang diteliti mengenai pendapatan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kemampuan penduduk miskin.

Kajian mengenai strategi penanganan kemiskinan disini merupakan kajian mengenai respon pemerintah terhadap masalah kemiskinan. Adapun kajian mengenai kebijakan penanganan kemiskinan mencakup beberapa hal yang menjadi batasan penelitian dan mengarah pada analisis respon kebijakan pemerintah, antara lain: model strategi anti-kemiskinan, konsep penanganan kemiskinan yang berkembang. Respon kebijakan yang dimaksud adalah program-program penanganan kemiskinan yang telah dilakukan baik program yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Program-program tersebut tentunya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan yaitu jenis bantuan langsung yang diberikan, pelayanan sosial yang disediakan, kegiatan pemberdayaan penduduk miskin yang dilakukan, kegiatan peningkatan aset dasar masyarakat

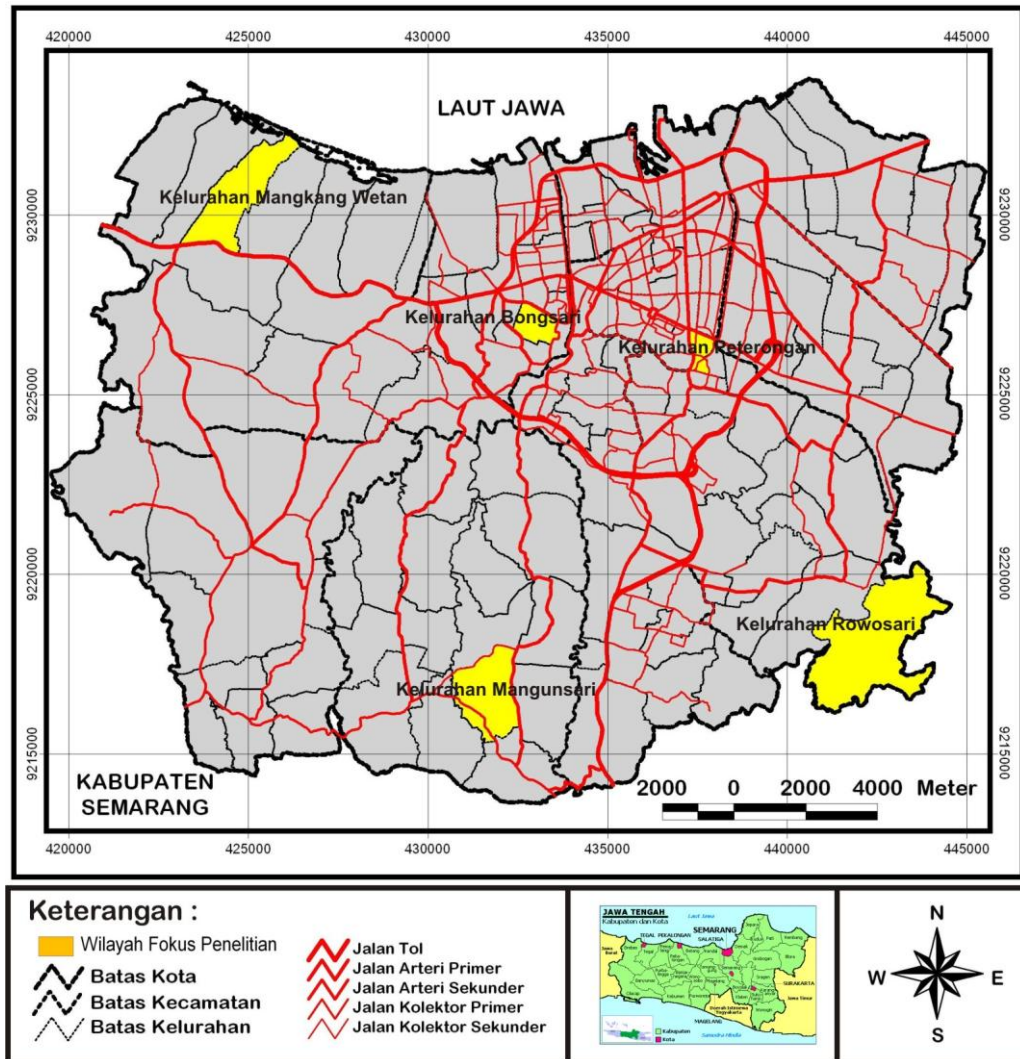
miskin, dan berkaitan dengan penyediaan kesempatan kerja serta pelibatan dan partisipasi masyarakat miskin.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah studi dari penelitian ini adalah Kota Semarang dengan unit analisis terkecil yang digunakan adalah kelurahan. Penelitian ini selanjutnya akan lebih terfokus pada 5 kelurahan di Kota Semarang yaitu Kelurahan Peterongan, Kelurahan Bongsari, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Mangunsari, dan Kelurahan Rowosari. Adapun justifikasi pemilihan wilayah fokus penelitian tersebut yaitu:

- Kelurahan Peterongan yang berada di Kecamatan Semarang Selatan merupakan bagian wilayah CBD yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi (Data Profil Rumah Tangga Miskin Kota Semarang, 2006).
- Kelurahan Bongsari yang berada di Kecamatan Semarang Barat merupakan bagian zona transisi yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi (Data Profil Rumah Tangga Miskin Kota Semarang, 2006).
- Kelurahan Mangkang Wetan yang berada di Kecamatan Genuk merupakan bagian wilayah pinggiran (*sub urban*) yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi (Data Profil Rumah Tangga Miskin Kota Semarang, 2006). Selain itu letaknya berada di bagian utara Kota Semarang yang jauh dari pusat kota.
- Kelurahan Mangunsari yang berada di Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Rowosari yang berada di Kecamatan Tembalang merupakan bagian wilayah pinggiran (*sub urban*) yang memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi diantara wilayah suburban lain yang masih memiliki karakteristik pedesaan. Selain itu, kedua kelurahan tersebut terletak di bagian selatan Kota Semarang.

Untuk lebih jelasnya mengenai justifikasi pemilihan wilayah fokus penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.3.



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

GAMBAR 1.2
WILAYAH STUDI PENELITIAN

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan teori perencanaan wilayah dan kota secara umum khususnya pengetahuan mengenai karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan yang dilakukan. Kemiskinan merupakan aspek sosial dan karakteristik pada setiap wilayah akan berbeda satu dengan lainnya. Hal ini tentu berhubungan dengan aspek spasial atau keruangan

dalam suatu kota atau wilayah. Kedua aspek tersebut merupakan aspek yang penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Dengan demikian fenomena kemiskinan dalam perkembangan Kota Semarang akan mempunyai karakteristik tersendiri.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Kota Semarang yaitu memberikan sumbangan untuk merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan. Penelitian ini penting dilakukan bagi pembangunan Kota Semarang terutama yang berkaitan dengan tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.

1.6 Posisi Penelitian

Posisi penelitian menunjukkan letak tema penelitian di antara disiplin ilmu perencanaan wilayah dan kota. Penelitian ini mencoba menghubungkan aspek spasial dan aspek sosial dimana kedua aspek tersebut merupakan aspek yang penting dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota. Aspek spasial diperoleh dari kajian mengenai perkembangan kota sedangkan aspek sosial diperoleh dari kajian mengenai kemiskinan yang merupakan masalah sosial perkotaan. Posisi penelitian dengan tema fenomena kemiskinan dalam perkembangan kota ini tidak hanya berada dalam satu disiplin ilmu saja, melainkan gabungan antara disiplin ilmu pengembangan wilayah dan ilmu perencanaan kota. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang terjadi dilatarbelakangi oleh adanya fenomena perkembangan perkotaan yang terjadi di Kota Semarang sehingga pada akhirnya juga akan mempengaruhi karakteristik kemiskinan. Fenomena kemiskinan dalam perkembangan Kota Semarang yang dihasilkan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan pembangunan wilayah Kota Semarang yang lebih berkelanjutan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Kota mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, kota diharapkan mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran, fungsi, dan

arahan pengembangannya. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu kota karena dalam perkembangannya, kota tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fisik namun juga aspek ekonomi dan sosial. Perkembangan suatu kota ditandai dengan adanya kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, dan komunikasi seperti adanya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu, perkembangan suatu kota juga dipengaruhi oleh lokasi dan kebijakan pemerintah melalui kebijakan dalam pengembangan wilayahnya. Perkembangan kota tersebut ditandai juga oleh peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas. Hal ini akan timbul masalah ketika pemerintah yang bersangkutan tidak mampu menyediakan peningkatan kebutuhan penduduk tersebut.

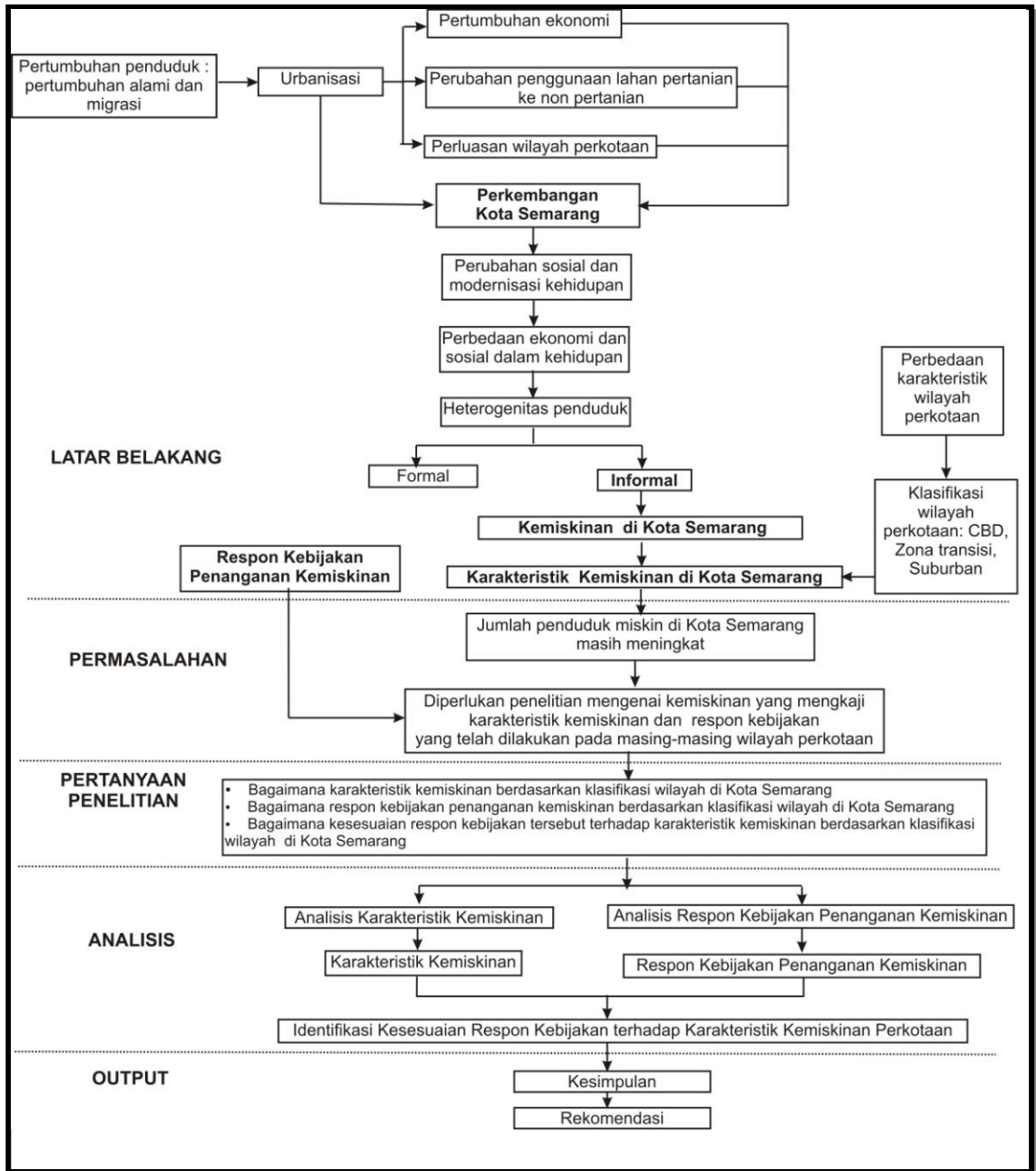
1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Wilayah penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian, dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. Perkembangan Kota Semarang tersebut menyebabkan perubahan sosial dan modernisasi kehidupan. Hal ini mengakibatkan perbedaan sosial dalam kehidupan penduduknya yang dapat dilihat dari perkembangan sektor formal dan sektor informal. Penduduk dengan keterbatasan pendidikan dan produktivitas rendah terpaksa bekerja pada sektor informal dengan penghasilan rendah karena mereka tidak mampu terserap dalam pekerjaan formal yang membutuhkan kemampuan dan pendidikan cukup.

Sejalan dengan perkembangan Kota Semarang ternyata permasalahan mengenai kemiskinan perkotaan semakin nyata. Kemiskinan identik dengan rendahnya kontribusi keluarga terhadap pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan. Keadaan geografis Kota Semarang menyebabkan perbedaan karakteristik wilayah. Hal ini juga mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan yang berkembang di Semarang.

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki kebijakan penanganan kemiskinan. Namun, tingkat kemiskinan di Kota Semarang masih meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan perkotaan di kota tersebut.

Adapun ditetapkan sasaran-sasaran yang disertai dengan metode dan alat analisisnya. Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis karakteristik kemiskinan perkotaan, analisis respon kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, kemudian berdasarkan kedua analisis tersebut dapat diketahui kesesuaian respon kebijakan terhadap karakteristik kemiskinan perkotaan yang terjadi di Kota Semarang. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dari karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan pemerintah teridentifikasi dapat dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan selanjutnya di Kota Semarang. Untuk itu, latar belakang, permasalahan, proses serta keluaran yang diinginkan diilustrasikan dengan Gambar 1.3 di bawah ini.



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

GAMBAR 1.3
KERANGKA PIKIR PENELITIAN

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian baik ruang lingkup wilayah penelitian maupun ruang lingkup materi penelitian, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, kerangka pemikiran dalam penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA

Berisi kajian literatur yang terkait dengan kajian mengenai kemiskinan perkotaan yang berkaitan dengan karakteristik serta respon kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai pendekatan penelitian, operasional, data penelitian dan analisis data yang digunakan untuk meneliti karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Semarang.

BAB IV PERKEMBANGAN KEMISKINAN DAN RESPON KEBIJAKANNYA DI KOTA SEMARANG

Bab ini berisi mengenai identifikasi karakteristik wilayah studi yang terdiri dari kondisi fisik Kota Semarang, perkembangan kemiskinan serta respon kebijakan penanganan kemiskinan secara singkat di Kota Semarang

BAB V ANALISIS KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA SEMARANG

Bab ini berisi mengenai analisis karakteristik kemiskinan, dan respon kebijakan dalam menangani kemiskinan serta identifikasi kesesuaian respon kebijakan terhadap karakteristik kemiskinan di Kota Semarang.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA

Kajian pustaka merupakan kajian yang dilakukan terhadap literatur-literatur yang terkait dengan tema penelitian, yaitu kemiskinan di wilayah perkotaan. Kajian pustaka ini merupakan dasar dalam penelitian yang diperlukan sebagai landasan teoritis yang kuat sebagai dasar untuk menentukan variabel penelitian sebagai dasar dalam menentukan data penelitian dan analisis. Kajian pustaka ini meliputi kajian mengenai mengenai kemiskinan yang berkaitan dengan karakteristik dan respon kebijakan pemerintah. Pada akhir pembahasan terdapat sintesis kajian pustaka yang terdiri atas perspektif teoritik serta variabel penelitian.

2.1 Urbanisasi sebagai Proses Perkembangan Kota

Urbanisasi merupakan proses yang mempengaruhi perkembangan kota-kota di negara-negara berkembang. Urbanisasi yang terjadi disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk perkotaan yang tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk namun juga migrasi yaitu perpindahan penduduk desa ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Urbanisasi menyebabkan kota mengalami perkembangan dan pertumbuhan karena harus memenuhi kebutuhan penduduknya yang semakin banyak. Selain itu, proses perkembangan yang terjadi juga mempengaruhi perubahan ekonomi dan sosial. Perubahan ekonomi yang terjadi diantaranya adalah pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, seperti perdagangan dan industri. Adanya pergeseran sektor lapangan pekerjaan tersebut menyebabkan peningkatan produktivitas ekonomi suatu kota yang pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan dan aktivitas kota. Sedangkan perubahan sosial yang terjadi dalam proses urbanisasi ini ditunjukkan oleh adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup penduduknya (Mc Gee, 1971).

Fenomena urbanisasi menyebabkan pertumbuhan wilayah perkotaan yang semakin luas, sehingga akan mempengaruhi struktur fisik kota dimana tidak hanya bagi kota besar tetapi juga bagi kota kecil. Urbanisasi menghasilkan perubahan, baik konstruktif maupun deskriptif yang bergantung pada berbagai faktor, diantaranya daya dukung kota, terutama daya dukung fisik dan ekonomi, kualitas para urbanit, terutama dalam segi pendidikan dan keterampilan berwiraswasta, serta kebijakan pemerintah setempat dan kebijakan nasional mengenai tata kota dan tatanan pedesaan (Bintarto, 1984:24).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat seiring perkembangan kota menghasilkan perubahan penting pada distribusi pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan pertanian dan peningkatan industri serta kontribusi yang stabil dari sektor pelayanan. Perubahan situasi struktural yang cepat tersebut memiliki dampak pada organisasi sosial dan ruang dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menciptakan dinamika perkotaan, perubahan penggunaan lahan, munculnya permukiman legal dan ilegal serta permasalahan lain seperti kerusakan lingkungan, limbah dan transportasi. Pada aspek sosial, wilayah perkotaan yang semakin tumbuh dan berkembang juga menyebabkan berkembangnya heterogenitas (Mc Gee, 1995).

Adanya heterogenitas yang terlihat dari perbedaan sosial penduduknya menyebabkan pemisahan antara kelompok penduduk berdasarkan perbedaan ekonomi dan sosial penduduknya. Lebih lanjut, pemisahan tersebut terlihat dari adanya sektor formal dan sektor informal. Berdasarkan aspek ekonomi, kegiatan ekonomi formal di perkotaan yang merupakan bentuk baru integrasi global semakin meluas, namun kegiatan tersebut tidak mampu menyerap pekerja dengan pendidikan dan kemampuan rendah. Pada akhirnya, pekerja dengan produktivitas rendah tersebut bekerja pada sektor informal (Lacabana dan Cariola, 2003). Selain itu, juga terlihat adanya sektor formal dan sektor informal secara spasial terutama ditunjukkan oleh adanya permukiman legal dan ilegal. Hal ini terjadi karena bentuk ruang perkotaan yang terbentuk merupakan bentuk kompetisi aktivitas penduduk yang berkembang di dalamnya. Di negara berkembang, bentuk informal tersebut terlihat dari adanya kemiskinan dimana penduduk miskin perkotaan

cenderung tinggal di ruang-ruang sisa yang ilegal dan tidak terakses prasarana dan sarana dasar.

Perkembangan kota di dunia baik di negara berkembang maupun negara maju diiringi dengan permasalahan yang hampir sama (Derycke, 1999), yaitu menurunnya tingkat pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat kota. Adanya berbagai kelompok sosial yang berkembang di kota menunjukkan adanya segregasi ruang perkotaan. Hal ini terkait dengan adanya perbedaan pendapatan, kelas sosial, ras dan etnik.

Daerah perkotaan sendiri diklasifikasikan menjadi tiga wilayah yaitu *Central Business District* (CBD), wilayah transisi, wilayah pinggiran (suburban). *Central Business District* (CBD) merupakan bagian dari daerah perkotaan yang memiliki tingkat aksesibilitas dan persaingan penggunaan lahan yang tinggi sehingga memiliki kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu, wilayah ini dilengkapi oleh infrastruktur perkotaan yang paling lengkap di antara wilayah lain untuk menunjang kegiatan yang berada di wilayah CBD. Sedangkan wilayah transisi merupakan wilayah perluasan dari pusat kota atau CBD yang memiliki karakteristik hampir sama dengan pusat kota namun kepadatan bangunan di wilayah ini masih lebih rendah daripada kepadatan bangunan di pusat kota. Wilayah pinggiran atau suburban merupakan wilayah pinggiran kota yang memiliki ruang terbuka hijau yang masih luas. Selain itu, kepadatan bangunan di wilayah ini paling rendah diantara dua wilayah sebelumnya.

Perbedaan karakteristik pada masing-masing bagian wilayah tersebut mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan yang terjadi. Karakteristik kemiskinan yang terlihat di wilayah pinggiran misalnya, kelompok penduduk tertentu mengalami kemiskinan yang semakin parah karena mengalami keterbatasan pelayanan prasarana dan sarana publik serta kesempatan kerja yang lebih sempit dibandingkan dengan wilayah lain yang fasilitas perkotaannya lebih lengkap (Feitosa, 2009).

2.2 Pemahaman tentang Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang terjadi akibat urbanisasi dan semakin diperparah oleh fragmentasi perkotaan. Hal ini terkait dengan peningkatan kebutuhan-kebutuhan yang muncul sebagai konsekuensi dari proses urbanisasi yang terjadi, seperti kebutuhan penciptaan lapangan pekerjaan, kebutuhan pemenuhan fasilitas-fasilitas perkotaan baik yang berupa fasilitas perumahan, fasilitas ekonomi, maupun fasilitas-fasilitas penunjangnya (sarana dan prasarana penunjang).

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan di perkotaan dipicu oleh perkembangan kota yang semakin pesat, tercermin dari pesatnya perluasan wilayah kota, tingginya tingkat urbanisasi, meningkatnya perkembangan ekonomi yang ditandai adanya konsentrasi berbagai macam kegiatan ekonomi, terutama industri, jasa-jasa modern, dan perdagangan. Perubahan sosial dan modernisasi kehidupan telah mengubah kehidupan pola konsumsi, gaya hidup, dan perilaku sosial menuju pada perbaikan kesejahteraan (Shalimow, 2004).

Kemiskinan merupakan keadaan kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak, karena standar hidup tersebut berbeda-beda, maka tidak ada konsep kemiskinan yang universal (Levitan dalam Effendi, 1993:12). Sedangkan menurut Sumodiningrat, kemiskinan adalah wujud dari kesenjangan antar kelompok sosial, jika ditinjau dalam segi keruangan, kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada beberapa sektor yang menampung tenaga kerja berlebih dengan tingkat produktivitas yang rendah, dan ada pula kelompok masyarakat yang belum dapat merasakan hasil-hasil pembangunan secara memadai (Sumodiningrat, 1998). Kemiskinan juga dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu angka ketergantungan rumah tangga yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya hak kepemilikan dan keamanan aset, pendapatan yang rendah atau pengangguran (Kedir dan McKay, 2005:49).

Kemiskinan perkotaan juga terjadi karena migrasi yang aktif dari pedesaan ke perkotaan. Hal ini disebabkan oleh perkotaan dianggap lebih menjanjikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga banyak penduduk desa yang pindah ke kota meskipun mereka tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk bersaing dalam kehidupan kota. Efisien pembangunan perkotaan sebenarnya memiliki peranan besar dalam memerangi kemiskinan nasional, baik dari pendatang baru yang memberikan peluang untuk kehidupan yang lebih baik dan dari perspektif negara dengan menyediakan sebuah pasar yang memiliki diversifikasi industri dan jasa dapat berkembang sebagai mesin pertumbuhan dari pendapatan nasional. Namun, perwujudan potensi keuntungan migrasi dari pedesaan ke perkotaan tergantung pada seberapa baik kota mampu mengatur pertumbuhan, menyediakan tata pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan kepada penduduknya (Baharoglu dan Kessides, 2001).

Kondisi perkotaan tidak dapat digeneralisasi karena adanya perbedaan ukuran kota yang cenderung memiliki berbagai masalah. Hal ini mempengaruhi besarnya pelayanan publik seperti perumahan dan kesehatan yang dapat diakses oleh penduduk. Menurut Brockerhorff dan Brennan (1998), kesejahteraan penduduk kota mengalami penurunan terutama di kota-kota besar di dunia. Hal ini menunjukkan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah kurang merespon tekanan penduduk yang semakin besar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegagalan pemerintah dalam menyediakan pelayanan perkotaan semakin memperparah kemiskinan.

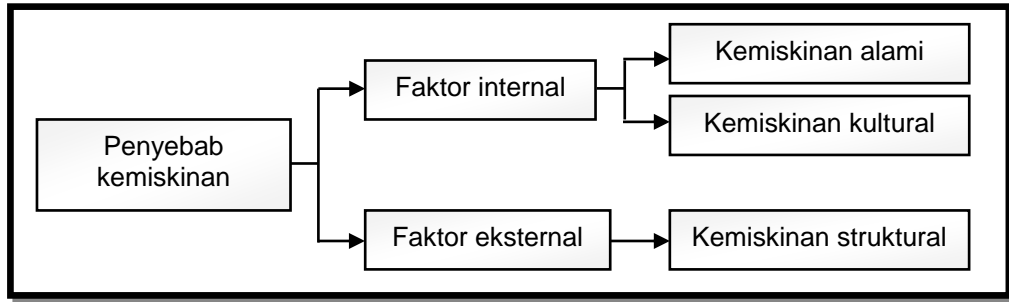
Adanya heterogenitas di dalam kota menyebabkan perbedaan sosial penduduknya yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal dan kondisi kesehatan. Indikator-indikator tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Kemiskinan sering dilihat berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduk yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terbentuk dalam komunitas sehingga akan memberikan karakteristik kemiskinan yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya (Baharoglu dan Kessides, 2001).

2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan karena sebab-sebab alami (kemiskinan natural), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural (Nugroho dan Dahuri, 2002).

1. *Kemiskinan alami* merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumberdaya manusia. Akibatnya, sistem produksi dalam masyarakat beroperasi tidak optimal dengan tingkat efisiensi yang rendah.
2. *Kemiskinan struktural* merupakan kemiskinan yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan umumnya ditandai dengan adanya ketimpangan antara lain ketimpangan kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha, keterampilan, dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan juga mengakibatkan ketimpangan struktur sosial.
3. *Kemiskinan kultural* adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan oleh sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam lingkaran kemiskinan.

Penyebab kemiskinan tersebut selanjutnya mempengaruhi karakteristik kemiskinan yang terjadi. Pada dasarnya, penyebab kemiskinan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu penduduk masing-masing, seperti rendahnya motivasi yang ada dalam diri penduduk, minimnya modal, dan lemahnya penguasaan terhadap aspek manajemen dan teknologi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu masing-masing penduduk seperti minimnya ketersediaan infrastruktur, dan lain-lain. Lebih lanjut dapat dijelaskan pada Gambar 2.1 di bawah ini:



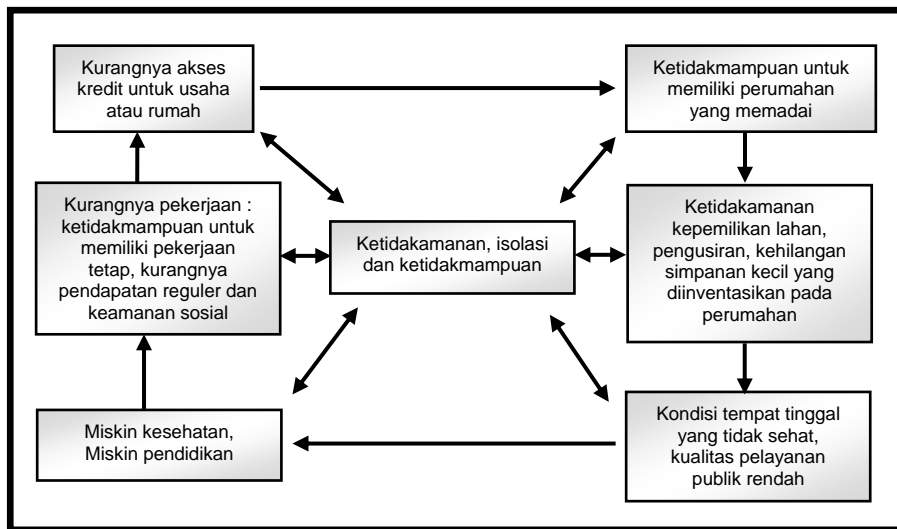
Sumber : Nugroho dan Dahuri, 2002, dan Interpretasi Penyusun, 2009

**GAMBAR 2.1
PENYEBAB KEMISKINAN**

Penyebab kemiskinan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi karakteristik kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah.

2.2.3 Karakteristik Kemiskinan Perkotaan

Dimensi kemiskinan merupakan ukuran kemiskinan yang biasanya dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk. Satu dimensi kemiskinan sering menyebabkan atau berkontribusi pada dimensi lain (Baharoglu dan Kessides, 2001). Hal ini menunjukkan adanya dampak kumulatif dari kemiskinan perkotaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : diadopsi dari Baharoglu dan Kessides, 2001

**GAMBAR 2.2
DAMPAK KUMULATIF KEMISKINAN PERKOTAAN**

Berdasarkan penyebab kemiskinan yang diungkapkan oleh Bappenas (2004), Bank Dunia (2003) dan Baharoglu dan Kessides (2001) dapat dijabarkan dimensi kemiskinan yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengetahui karakteristik kemiskinan perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Dimensi pendapatan ini berkaitan dengan pekerjaan penduduk miskin. Penduduk miskin perkotaan memiliki karakteristik keterampilan dan kemampuan yang kurang sehingga mereka cenderung tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan tetap. Sektor formal yang berkembang tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan rendah sehingga masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan atas pekerjaan yang layak dan peluang yang terbatas untuk mengembangkan usaha mereka (Baharoglu dan Kessides, 2001). Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang seimbang dan kurang kepastian akan keberlanjutannya. (BAPPENAS,2004). Penduduk miskin di perkotaan cenderung bekerja di sektor informal sehingga mereka tidak mendapatkan jaminan pekerjaan. Selain itu, keterbatasan ini juga disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat (Bank Dunia, 2003).

Lebih lanjut World Bank (2000) menjelaskan bahwa kemiskinan di Asia dan Pasifik yang ditandai oleh dua faktor penting: besarnya dan keanekaragaman. Hampir 900 juta atau 75% dari penduduk miskin dunia tinggal di Asia dan Pasifik, termasuk Asia Tengah. Hampir 1/3 penduduk Asia adalah penduduk miskin. Wilayah ini juga mengalami proses urbanisasi yang besar yang menciptakan *megacity* di Asia) dan penduduk miskin perkotaan tinggal pada kondisi dengan ketidakamanan dalam kepemilikan lahan dan kekurangan pelayanan dasar. Sektor publik di perkotaan sering tidak dapat memberikan layanan karena biaya pemulihan yang sulit dan adanya tekanan pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga muncul penduduk tanpa pekerjaan formal.

2. Kesehatan

Dimensi kesehatan ini berkaitan dengan kondisi lingkungan permukiman penduduk miskin yang tidak sehat yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi kualitas kesehatan mereka. Mereka cenderung tinggal pada lingkungan padat dan pada lahan-lahan marginal yang sering kali membahayakan mereka. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permukiman kumuh yang terletak di bantaran sungai. Sebagian besar penduduk yang tinggal di permukiman kumuh merupakan pekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah sehingga mereka memiliki kontribusi yang rendah dalam menjaga kelestarian tempat tinggal mereka yang pada akhirnya mengarah pada degradasi lingkungan.

Masalah yang dihadapi penduduk miskin berkaitan dengan layanan perumahan adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan atas kepemilikan perumahan (BAPPENAS, 2004). Bank Dunia (2003) lebih lanjut menjelaskan bahwa kemiskinan juga disebabkan oleh kegagalan dalam kepemilikan terutama tanah dan modal (Prihartini, 2008). Prosedur kepemilikan bangunan dan tanah yang tinggal sulit dan rumit dan tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat miskin sehingga penduduk miskin kota cenderung tinggal pada permukiman kumuh dengan segala keterbatasan pelayanan seperti sanitasi dan air bersih. Hal ini juga menyebabkan masalah lain muncul antara lain ketidakmampuan untuk terus bekerja sehingga pendapatan yang diperoleh tidak memadai. Selain itu, penyakit yang timbul akibat lingkungan yang tidak sehat juga menyebabkan kemampuan anak-anak untuk belajar menjadi berkurang (Baharoglu dan Kessides, 2001).

3. Pendidikan

Penduduk miskin perkotaan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung (Bappenas, 2004).

Dampak dari permasalahan tersebut adalah penduduk miskin tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang relatif tetap, kurangnya kegiatan konstruktif khususnya untuk meningkatkan keterampilan anak muda usia sekolah, dan ketidaksetaraan gender yang berkelanjutan (Baharoglu dan Kessides, 2001).

4. Keamanan

Dimensi keamanan yang dimaksud di sini berkaitan dengan ketidakamanan kepemilikan lahan. Penduduk miskin perkotaan menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan (Bappenas, 2004). Mereka yang berasal dari desa cenderung tinggal pada tanah-tanah kosong pemerintah. Penduduk miskin kota cenderung tinggal pada permukiman kumuh dengan segala keterbatasan pelayanan seperti sanitasi dan air bersih serta lemahnya perlindungan dan *security* atas tanah dan bangunan yang mereka tinggali.

Kota yang dianggap menjanjikan oleh masyarakat desa untuk mencari kesejahteraan hidup yang lebih baik memaksa mereka mencari ruang atau lahan kosong sebagai tempat tinggal sementara bagi mereka. Ruang Terbuka Hijau seperti bantaran sungai dan bantaran jalur rel kereta api menjadi tempat favorit bagi mereka untuk mendirikan bangunan non-permanen untuk tempat tinggal mereka. Akibatnya lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan dan pencegah banjir tertutup oleh permukiman kumuh. Adanya permukiman kumuh yang didirikan oleh masyarakat miskin tersebut menciptakan ketidakteraturan penggunaan lahan di perkotaan.

Ketidakamanan dalam kepemilikan tanah yang mereka tinggali menyebabkan pengusiran/penggusuran yang menyebabkan hilangnya modal fisik, kerusakan sosial dan jaringan informal untuk pekerjaan dan keselamatan, dan mengurangi rasa aman (Baharoglu dan Kessides, 2001).

5. Kemampuan

Penduduk miskin memiliki kemampuan yang lemah karena mereka tidak diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena mereka dianggap kaum yang lemah dengan tidak adanya perlindungan penuh. Kurangnya informasi kepada penduduk miskin perkotaan menyebabkan mereka tidak memiliki akses dalam mendapatkan pekerjaan yang baik dan layanan hukum karena mereka dianggap sebagai konsumen pasif. (Baharoglu dan Kessides, 2001 dan Bappenas, 2004). Lebih lanjut Bank Dunia (2003) menjelaskan bahwa lemahnya partisipasi penduduk miskin disebabkan oleh adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung serta tata pemerintahan yang kurang melibatkan penduduk miskin yang tidak hanya sebagai objek pembangunan namun juga sebagai subjek pembangunan.

2.2.4 Fakta Kemiskinan di Dunia

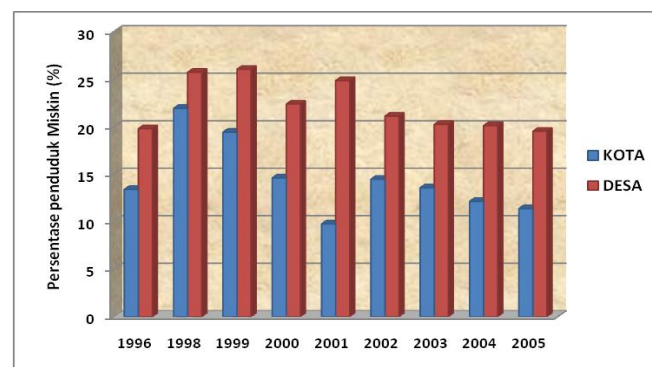
Secara global, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan menurun dari 29% pada tahun 1987 ke 26% pada tahun 1998, meskipun jumlah total orang miskin tetap tidak berubah di sekitar 1,2 miliar. Pengurangan insiden kemiskinan secara global tersebut merupakan kemajuan di Asia Timur, terutama di RRC. Kinerja di tiga wilayah lainnya seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan menunjukkan tidak ada penurunan dalam insiden kemiskinan, sementara jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di wilayah ini meningkat. Di Sub-Sahara Afrika, tambahan 74 juta orang masyarakat miskin sehingga mencapai total 291 juta pada tahun 1998. Di Amerika Latin angka kemiskinan meningkat dari 64 juta menjadi 78 juta, dan di Asia Selatan jumlah total 522 juta orang hidup dalam kemiskinan. Negara-negara di Eropa Timur dan Asia Tengah mengalami peningkatan, baik di insiden kemiskinan dan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Insiden meningkat dari 2% menjadi 5% atau bertambah 24 juta orang dalam kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa di negara-negara dengan ketidaksetaraan yang rendah, pertumbuhan yang tinggi terhadap penanggulangan kemiskinan (World Bank, 2000).

Indikator sosial telah meningkat selama tiga dekade. Harapan hidup di negara-negara berkembang meningkat dari 55 tahun di 1970 menjadi 65 tahun 1998. Selain itu, tingkat kematian bayi telah turun. Semua wilayah kecuali Eropa Timur, Asia Tengah dan Afrika Sub-Sahara mengalami kemajuan tersebut. Pendaftaran anak ke sekolah dasar meningkat dari 78% pada tahun 1980 menjadi 84% pada tahun 1998, dan keaksaraan orang dewasa meningkat. Namun, orang-orang miskin merasa belum dapat memanfaatkan peluang ekonomi baru karena kurangnya koneksi dan kurangnya informasi, serta keterampilan (*World Bank*, 2000). Hal ini menyebabkan orang-orang miskin tetap bekerja di wilayah pedesaan dan sektor informal perkotaan.

Pada kenyataannya, globalisasi yang terjadi menyebabkan negara-negara berkembang yang miskin harus membiayai efisiensi global untuk keuntungan negara-negara maju yang kaya. Hal ini memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dan pada akhirnya semakin banyak orang miskin di negara berkembang. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2000, terjadi peningkatan penduduk miskin antara tahun 1990 dan 1998 dari yang awalnya 2,7 milyar menjadi 2,8 milyar dengan ukuran uang yang digunakan untuk hidup kurang dari \$ 2 perhari (Bank Dunia dalam Suyanto, 2007). Hal ini menunjukkan pada tahun 1990, 33% penduduk negara berkembang hidup dalam kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin.

Perkembangan wilayah perkotaan yang terjadi di negara berkembang tidak hanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi namun juga berakibat pada tumbuhnya masalah perkotaan. Philipina, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami urbanisasi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,5% per tahun antara tahun 1980-1996. Urbanisasi yang terjadi di Philipina tersebut menyebabkan biaya hidup semakin tinggi di Philipina dan pertumbuhan penduduk perkotaan di Philipina semakin menambah pengangguran. Pengangguran berhubungan dengan kemiskinan perkotaan dimana banyak penduduk miskin yang tidak bekerja atau hanya bekerja pada sektor informal (Choguill, 2001).

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia juga mengalami peningkatan kemiskinan perkotaan sejak Februari 1996 hingga Februari 1999 (World Bank dalam Kamaluddin, 2003). Pada tahap-tahap awal selama tiga dekade (1976-1996) kemiskinan perkotaan hampir tidak terjadi penurunan jumlahnya. Sejak tahun 1987 itu (kecuali tahun 2001) persentase penduduk miskin perkotaan terhadap total penduduk miskin Indonesia ternyata hampir tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yaitu tetap dalam kondisi dimana rata-rata setiap tahunnya hampir sepertiganya (32,12%) berada di daerah perkotaan (Kamaluddin dalam bapeda-jabar.go.id).



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) dalam Prihartini, 2008

GAMBAR 2.3 **PERTUMBUHAN PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA MENURUT WILAYAH** **TAHUN 1996-2005**

Meledaknya jumlah penduduk di perkotaan merupakan akibat dari masalah pengelolaan yang tidak terhitung, lingkungan konsumsi energi, dan krisis sosial. Masyarakat pedesaan seharusnya diperkuat dan dijaga sebagai sebuah tipe blok spasial dari barang-barang sosial sebagai lawan dari kekejaman urbanisasi (McGee, 2001). Jumlah penduduk perkotaan yang makin besar mengakibatkan munculnya wilayah desa-kota akibat perluasan aktivitas perkotaan yang mengelilingi kota inti di banyak negara di Asia (McGee, 1992).

Lebih lanjut, sektor industri yang berkembang di perkotaan sebagai pengaruh globalisasi di negara berkembang ternyata tidak mampu memberikan

trickle down effect (efek penetesan) ke wilayah pedesaan, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah semakin melebarnya kesenjangan sosial dan spasial antara kota besar dan pedesaan. Kemiskinan yang diakibatkan adanya kesenjangan ini terjadi terutama di wilayah pedesaan di Asia. Kesenjangan pendapatan dan disparitas antara perkotaan dan pedesaan semakin memperburuk kesejahteraan penduduk di wilayah pedesaan. Pada akhirnya, penduduk desa dengan kemampuan rendah pindah ke kota dengan pengharapan mendapatkan hidup yang lebih baik sehingga penduduk kota semakin banyak dan kebutuhan penduduk semakin meningkat. Namun sektor formal yang berkembang di perkotaan tidak mampu menyerap tenaga kerja kemampuan dan keahlian rendah tersebut sehingga mereka bekerja di sektor informal seperti buruh, aktivitas tradisional dalam skala kecil, PKL, dan sebagainya. Sektor informal ini tidak memiliki kesempatan masuk dalam ekonomi pasar. Sektor informal ini cenderung memiliki pendapatan kecil, sehingga tidak terjadi aliran kapital dari kota ke desa.

2.3 Strategi Anti-Kemiskinan

Strategi anti-kemiskinan berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan yang berkembang. Hal ini merupakan respon pemerintah terhadap masalah kemiskinan perkotaan yang semakin parah.

2.3.1 Perkembangan Bentuk Penanganan Kemiskinan

Seiring pertumbuhan penduduk perkotaan di negara-negara Asia, kemiskinan merupakan fenomena penting yang juga berkembang. Hal ini membutuhkan kebijakan pengentasan kemiskinan baik skala nasional sebagai pembuat kebijakan maupun lokal sebagai pelaksana kebijakan. Pada skala nasional, respon efektif terhadap kemiskinan membutuhkan akselerasi dengan pengembangan manusia seperti akses orang miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar, serta akselerasi dengan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan distribusi pendapatan. Sedangkan pada level lokal, respon terhadap kemiskinan dilakukan dengan peningkatan *urban governance*,

kemampuan orang miskin, dan *strategic partnerships* dari pemerintah lokal dan masyarakat untuk orang-orang miskin (Mehta dalam Asian Development Bank, 2001).

Berdasarkan dimensi kemiskinan yang telah dijelaskan sebelumnya, penduduk miskin perkotaan memiliki ciri kemiskinan yang paling menonjol di antara karakteristik kemiskinan secara keseluruhan (kemiskinan perkotaan dan pedesaan) yaitu penduduk miskin kota rentan terhadap kemiskinan dan kemiskinan dari segi non-pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penduduk miskin kota rentan terhadap kemiskinan (kerentanan)

Penduduk miskin kota rentan terhadap kemiskinan ini berkaitan dengan pendapatan mereka. Salah satu indikator penentuan golongan miskin atau tidak ditentukan dengan tingkat pendapatan penduduk. Menurut World Bank (2006), angka kemiskinan nasional Indonesia “menyembunyikan” sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa hampir 42% dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis kemiskinan AS\$1 dan AS\$2 per hari.

Indikator tersebut menunjukkan perbedaan antara orang miskin dan yang hampir-miskin sangat kecil. Lebih lanjut menurut data World Bank (2006) berdasarkan hasil survei tahun 2004 menunjukkan hanya 16,7 % penduduk Indonesia yang tergolong miskin, lebih dari 59% dari mereka pernah jatuh miskin dalam periode satu tahun sebelum survei dilaksanakan. Data terakhir juga menunjukkan tingkat pergerakan tinggi (masuk dan keluar) kemiskinan selama periode tersebut, lebih dari 38% rumah tangga miskin pada tahun 2004 tidak miskin pada tahun 2003. Masuknya penduduk golongan miskin kemudian akan mempengaruhi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di lingkungan mereka karena masyarakat miskin cenderung tidak diakui oleh struktur formal yang berkembang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerentanan untuk jatuh miskin sangat tinggi di Indonesia. Hal ini selanjutnya mempengaruhi strategi pengentasan kemiskinan yang dipusatkan pada perbaikan kesejahteraan mereka.

2. Kemiskinan dari segi non-pendapatan (multi-dimensi)

Berbeda dengan ciri kemiskinan sebelumnya, kemiskinan dari segi non-pendapatan berkaitan dengan keterbatasan penduduk miskin dalam mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap infrastruktur dasar lainnya.

Menurut catatan *World Bank* (2006), Indonesia masih gagal mencapai kemajuan dan tertinggal dari negara-negara lain di kawasan yang sama. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang terkait dengan MDGs yaitu angka gizi buruk (malnutrisi) yang tinggi meskipun telah terjadi penurunan angka kemiskinan, rendahnya akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin. Hanya 48% yang memiliki akses air bersih di daerah pedesaan dan 78% di perkotaan. Kurangnya akses terhadap sanitasi yang ditunjukkan oleh 59% penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka di perkotaan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dengan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemiskinan dari segi non-pendapatan merupakan masalah yang lebih serius dibandingkan kemiskinan pendapatan karena dimensi kemiskinan yang terlihat lebih kompleks daripada menentukan orang miskin berdasarkan pendapatan saja. Namun, pada dasarnya dimensi kemiskinan yang satu akan mempengaruhi dimensi kemiskinan yang lain.

Karakteristik kemiskinan tersebut selanjutnya mempengaruhi model penanganan kemiskinan yang diwujudkan dalam program-program pengentasan kemiskinan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, yaitu :

1. Pemberian bantuan langsung

Model penanganan kemiskinan yang dimaksud adalah pemerintah memberikan bantuan langsung kepada penduduk miskin. Program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang termasuk dalam strategi ini antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Raskin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat miskin.

Model bantuan langsung ini cenderung memanifestasikan *charity strategy* daripada penumbuhan kemampuan masyarakat untuk dapat *self*

sustaining. Bentuk strategi ini disebut *assistencialism* yang memandang masyarakat sebagai objek asistensi dan objek bantuan di dalam bentuk berbagai pelayanan dan pemberian fasilitas sosial (Feire dalam Ridlo, 2002). Lebih lanjut, model bantuan langsung ini cenderung menyebabkan ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan pemerintah (*dependency*) dan pada akhirnya mereka cenderung malas untuk berusaha melepaskan diri mereka dari kemiskinan dan menjadi tidak mandiri.

2. Penyediaan pelayanan sosial

Model penanganan kemiskinan yang dimaksud adalah bantuan untuk penduduk miskin dalam menghadapi kemiskinan dari segi non-pendapatan (multi-dimensi). Penyediaan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin baik oleh pemerintah ataupun swasta penting dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan perkotaan. Model bantuan bagi orang miskin ini lebih bersifat menyediakan pelayanan sosial untuk menangani kemiskinan yang juga disebabkan keterbatasan layanan dasar daripada memberikan bantuan langsung kepada orang miskin. Beberapa bantuan yang dapat dilakukan antara lain (World Bank, 2006):

- Peningkatan tingkat partisipasi sekolah menengah pertama yang memerlukan intervensi dari sisi penawaran maupun permintaan.
- Peningkatan akses terhadap permukiman yang layak dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai.

Model penanganan kemiskinan melalui bantuan pelayanan sosial ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara masyarakat miskin, pemerintah dan swasta baik dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan permukiman mereka maupun pendidikan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat aset dasar yang sebenarnya dimiliki oleh orang miskin sehingga pada akhirnya masyarakat miskin juga diakui dalam struktur formal dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang juga penting bagi mereka.

3. Pemberdayaan sumberdaya manusia

Model penanganan kemiskinan yang dimaksud adalah bantuan untuk penduduk miskin yang dipandang sebagai *human poverty* yaitu memberdayakan masyarakat miskin supaya menjadi mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah. Hal ini terkait dengan program-program pemerintah yang berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat miskin yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan hidup mereka.

TABEL II.1
KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

Kebijakan	Keterangan
Dukungan untuk usaha kecil dan perusahaan kecil (microenterprises)	<p>Bagi orang miskin perkotaan, usaha kecil dan <i>microenterprises</i> menjadi penting sebagai sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan (termasuk pekerjaan sendiri), di mana tidak ada alternatif lain yang tersedia. Meskipun ada keinginan untuk merangsang pertumbuhan usaha kecil tersebut, namun respon pemerintah justru menyulitkan masyarakat miskin karena mereka harus membayar uang sewa, biaya, dan pajak.</p>
Meningkatkan akses ke pekerjaan dan pelatihan	<p>Peningkatan akses fisik ke pekerjaan dan pasar dapat difasilitasi melalui pelayanan transport yang lebih terjangkau ke pemukiman berpenghasilan rendah.</p> <p>Penggunaan lahan dan keputusan zonasi seharusnya memungkinkan rumah tangga miskin untuk memiliki mobilitas pemukiman. Peraturan seperti itu seharusnya rumah tangga miskin tidak jauh dari lapangan kerja.</p> <p>Cara khusus di mana pemerintah dapat meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat miskin perkotaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merevisi peraturan yang memutarbalikkan pasar tenaga kerja dan membuat pekerjaan • Memfasilitasi aliran informasi tentang pekerjaan dan pasar untuk produk, misalnya, melalui publikasi dan melalui pembentukan LSM dan organisasi lainnya yang dapat menyediakan layanan. • Memberikan pelatihan kerja praktis • Memfasilitasi anak untuk memungkinkan perempuan untuk bekerja. Pemerintah dapat melakukannya dengan sederhana dan hemat biaya program dengan bantuan dari LSM dan organisasi berbasis masyarakat.
Mendukung kegiatan industri rumah tangga	<p>Kegiatan industri rumah tangga merupakan kegiatan yang penting untuk pendapatan masyarakat miskin. Tidak hanya ruang rumah yang dapat digunakan untuk memperoleh sewa rumah tetapi juga dapat menampung kegiatan perdagangan dan industri manufaktur. Namun, perencanaan kebijakan dan peraturan penggunaan lahan cenderung memisahkan perumahan dan kegiatan produktif. Hal ini bertujuan untuk</p>

Kebijakan	Keterangan
	<p>menghindari bahaya kesehatan dan keselamatan.</p> <p>Dalam melihat potensi pentingnya produksi berbasis rumah untuk masyarakat miskin perkotaan, kerangka peraturan yang dapat disesuaikan untuk mengizinkan kegiatan dengan tetap menjaga keamanan dan penyediaan infrastruktur. Hal yang dapat dilakukan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan infrastruktur (listrik, telekomunikasi, air dan sanitasi), yang akan meningkatkan efisiensi dan kegiatan industri rumah tangga. • Memberikan informasi dan layanan konsultasi dalam kaitannya dengan pasar untuk produk, dan akses terhadap kredit. • Memberikan informasi dan pelatihan praktis kejuruan

Sumber : Baharoglu dan Kessides, 2001

Sumodiningrat (1998) menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia. Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat yang diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.

4. Peningkatan aset dasar masyarakat miskin

Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat (Stepanek dalam Sahdan, 2005). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan melalui peningkatan aset dasar diantaranya :

- a. Pelayanan dasar dan transfer non-keuangan atau diistilahkan sebagai upah sosial, yang terdiri dari layanan seperti subsidi perumahan, dan memperluas

akses untuk air, listrik, pembuangan sampah, dan sanitasi. Ketidakmampuan untuk membayar pelayanan dasar seharusnya tidak mencegah masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan yang dibutuhkan tersebut.

- b. Meningkatkan kesehatan yaitu memastikan bahwa anak-anak miskin tumbuh sehat, efisien dan memberikan kualitas pencegahan dan perawatan dan memastikan bahwa penyakit atau cacat tidak semakin menyebabkan mereka jatuh dalam kemiskinan yang semakin parah.
- c. Akses terhadap aset terutama perumahan, tanah, dan modal, termasuk infrastruktur publik, baik untuk meningkatkan ekonomi dan sosial dan untuk memberikan dasar keterlibatan dalam ekonomi yang berlanjut.

5. Penciptaan dan pengembangan pasar

Penciptaan kesempatan ekonomi yang bertujuan untuk memastikan bahwa ekonomi menghasilkan peluang bagi rumah tangga miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan-pekerjaan mereka sendiri.

Adapun respon kebijakan yang terkait dengan penciptaan dan pengembangan pasar bagi masyarakat miskin (Baharoglu dan Kessides, 2001) antara lain :

- Mempromosikan usaha kecil *microenterprises* dengan mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk meminjamkan modal kepada masyarakat miskin.
- Mendukung kota, LSM lokal, dan bank dalam membuat kredit yang tersedia untuk bibit dan/atau jaminan.
- Memantau dan mengatur kinerja perantara keuangan yang mengumpulkan dari masyarakat umum.

6. Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik

Tata pemerintahan yang baik terkait dengan akuntabilitas kepada masyarakat, intervensi langsung dalam penyediaan informasi, fasilitasi partisipatif masyarakat miskin dalam kebijakan dan manajemen makroekonomi untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemberian pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Tata kelola pemerintahan yang baik berkorelasi positif terhadap pengurangan angka kemiskinan. Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah, regulasi, anggaran daerah, dan kelengkapan lainnya yang berada dalam kelembagaan pemerintah. Kelembagaan tersebut mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kemiskinan. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kelembagaan yang juga melibatkan orang miskin dalam mengambil keputusan. Upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan hendaknya juga memperhatikan masyarakat golongan ekonomi rendah tersebut (Sumarto, Haryadi, dan Arifianto, 2004), sehingga kebijakan yang diambil seperti penyediaan pelayanan publik tidak justru semakin merentankan dan memperparah kemiskinan mereka.

2.3.2 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia cenderung merupakan kemiskinan relatif daripada kemiskinan absolut (Sumodiningrat, 1989 dalam *Poverty Alleviation in Indonesia*, 2000). Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut tidak diketahui namun hanya menjadi bagian kecil dalam perbandingan dengan kehidupan, atau dekat dengan garis kemiskinan yang resmi. Sedangkan kemiskinan absolut harus diberi bantuan secara cepat, karena mereka merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian yang paling besar yaitu petani dan orang yang hidup dari sektor informal di wilayah perkotaan dan hidup dalam kemalangan ekonomi. Selain desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan pada pembangunan, pengurangan gap antara si kaya dan si miskin merupakan hal penting yang juga harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan orang-orang miskin yang tinggal di perkotaan mampu mengakses kehidupan standar dan aman dari ancaman kemiskinan absolut *Poverty Alleviation in Indonesia*, 2000).

Strategi penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap

dan menyeluruh terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.

Berikut beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia:

TABEL II.2
PERKEMBANGAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
DI INDONESIA

No	Era	Program
1	Presiden Soekarno	Pembangunan Nasional Berencana 8 Tahun (Penasbede)
2	Presiden Soeharto	Repelita I-IV melalui program Sektoral dan Regional
		Repelita IV-V melalui program Inpres Desa Tertinggal
		Program Pembangunan Keluarga Sejahtera
		Program Kesejahteraan Sosial
		Tabungan Keluarga Sejahtera
		Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
		GN-OTA
		Kredit Usaha Tani
3	Presiden BJ Habiebie	Jaring Pengaman Sosial
		Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
		Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal
		Program Pengembangan Kecamatan
4	Presiden Gusdur	Jaring Pengaman Sosial
		Kredit Ketahanan Pangan
		Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
5	Presiden Megawati	Pembentukan Komiten Penanggulangan Kemiskinan
		Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
6	Presiden SBY	Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)
		Program Pengembangan Kecamatan
		Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
		Program Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : Litbang Kompas, 2006 dalam Prihartini, 2008

Program-program pengentasan di atas merupakan respon pemerintah Indonesia untuk menangani masalah kemiskinan di Indonesia baik kemiskinan perkotaan maupun kemiskinan perdesaan.

2.4 Sintesis Kajian Literatur

Sintesis kajian literatur merupakan ringkasan dari penjabaran teoritis di atas. Adapun sintesis kajian pustaka terdiri dari dua bagian yaitu perspektif teoritik dan variabel penelitian.

2.4.1 Perpektif Teoritik

Proses perkembangan perkotaan menyebabkan semakin besarnya heterogenitas di perkotaan dimana tiap kelompok penduduk berusaha untuk menempati ruang sendiri di kota sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan otonomi lokal.

Pada satu sisi, kegiatan ekonomi formal di perkotaan merupakan bentuk baru integrasi global yang semakin meluas. Hal ini ditunjukkan semakin banyaknya infrastruktur yang dibangun. Namun pada sisi lain, sektor ekonomi formal yang tercipta tidak mampu menyerap pekerja dengan pendidikan rendah sehingga muncul penduduk yang bekerja pada sektor informal.

Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan penduduk dalam memperoleh pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya heterogenitas di dalam suatu wilayah perkotaan menyebabkan perbedaan sosial penduduknya yang antara lain dapat dilihat dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal dan kondisi kesehatan. Tingkat kesejahteraan penduduk yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terbentuk dalam komunitas sehingga akan memberikan karakteristik kemiskinan yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya (Baharoglu dan Kessides, 2001).

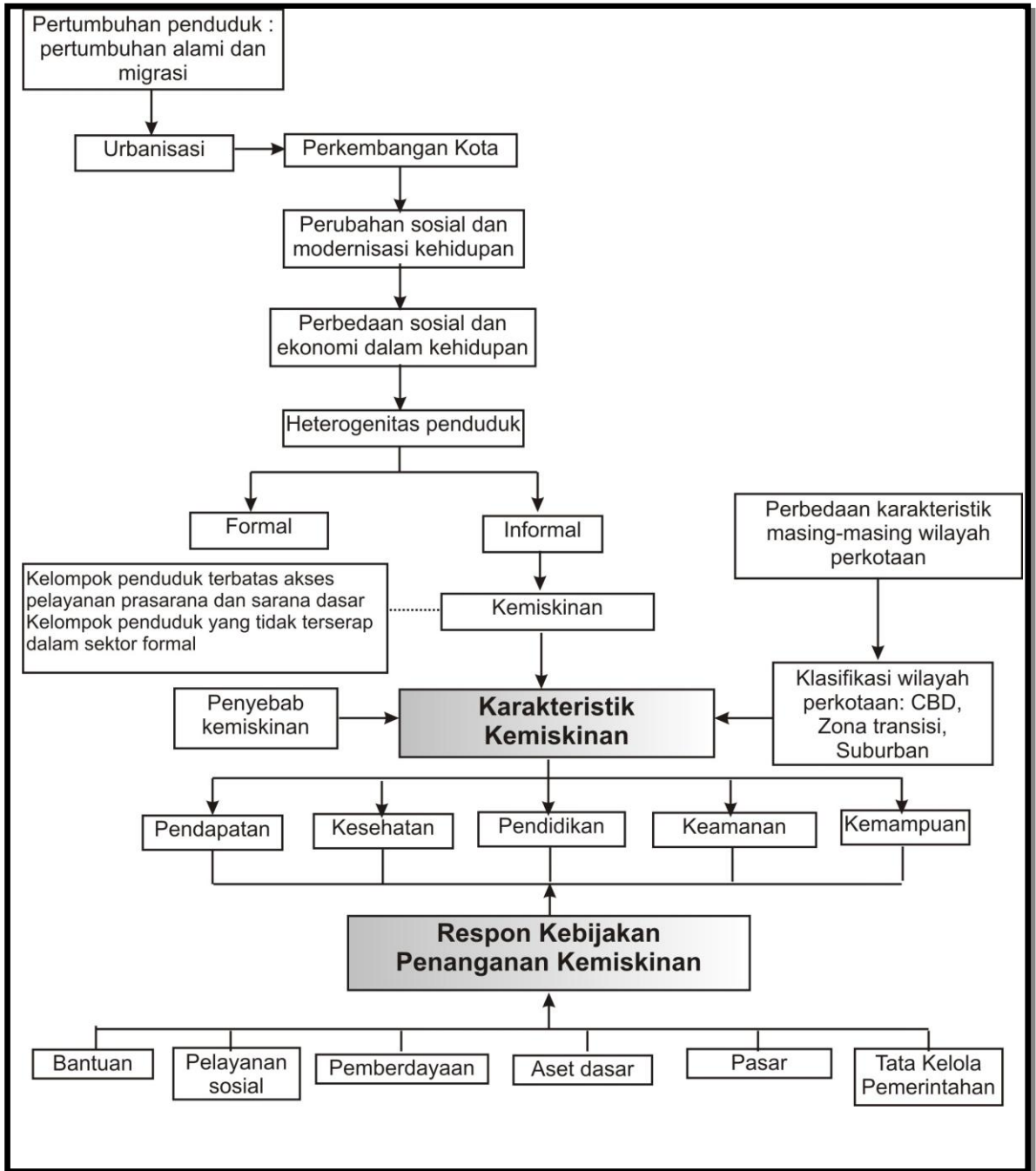
Dalam penelitian ini, Kota Semarang merupakan satu kota di Indonesia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Hal ini menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan yang begitu pesat di Kota Semarang yang menyebabkan wilayah perkotaan Semarang juga meluas. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang semakin meningkat diiringi permasalahan mengenai kemiskinan perkotaan. Penduduk miskin Kota Semarang selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar. Kemiskinan ini

antara lain dapat dilihat dari adanya permukiman kumuh dan liar yang tersebar di wilayah perkotaan Semarang (Ridlo, 2002).

Wilayah perkotaan Semarang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu wilayah pusat kota (CBD), wilayah transisi dan wilayah pinggiran (suburban) (Sulistyaningsih, 2007). Pola spasial perkotaan tersebut mempengaruhi karakteristik kemiskinan perkotaan di wilayah tersebut. Berdasarkan pemahaman tentang kemiskinan, adapun beberapa hal yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik kemiskinan perkotaan antara lain berkaitan dengan dimensi penyebab kemiskinan yang terkait dengan pendapatan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kemampuan masyarakat miskin dalam kehidupan mereka di perkotaan. Dimensi-dimensi tersebut merupakan indikator untuk mengetahui karakteristik kemiskinan.

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Namun dalam perkembangannya, tingkat kemiskinan di Kota Semarang masih cenderung meningkat. Berdasarkan kebijakan pengentasan kemiskinan, beberapa hal yang penting dalam respon kebijakan penanganan kemiskinan berkaitan dengan bantuan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, aset dasar, pasar, dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hal-hal di atas, perkembangan kemiskinan perkotaan akan berbeda pada tiap-tiap wilayah perkotaan di Semarang. Perbedaan karakteristik kemiskinan perkotaan seharusnya mempengaruhi perbedaan kebijakan penanganan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mengenai respon kebijakan penanganan kemiskinan yang sudah dilakukan terhadap karakteristik kemiskinan pada masing-masing wilayah perkotaan di Kota Semarang.



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

GAMBAR 2.4
KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA
DALAM PERSPEKTIF TEORI

2.4.2 Variabel Penelitian

Berdasarkan pada penjelasan di atas, dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian maka diperlukan variabel-variabel yang dijadikan batasan studi. Adapun variabel-variabel penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel II.3 di bawah ini.

TABEL II.3
VARIABEL PENELITIAN KEMISKINAN
DALAM PERKEMBANGAN KOTA SEMARANG

VARIABEL	PENJELASAN	KETERANGAN
<i>Sasaran 1 : Bagaimana karakteristik kemiskinan di Kota Semarang?</i>		
Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata Pencaharian • Tingkat Pendapatan • Tingkat Pendidikan 	Penyebab kemiskinan dan dimensi kemiskinan
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan perumahan dan sanitasi • Akses terhadap air bersih 	
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap sarana pendidikan 	
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan dan penguasaan tanah 	
Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam mengambil keputusan 	
<i>Sasaran 2 : Bagaimana respon kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Semarang?</i>		
Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bantuan langsung yang diberikan 	Respon Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan
Pelayanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan sosial yang disediakan 	
Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan 	
Aset dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Aset dasar masyarakat miskin yang ditingkatkan 	
Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan LSM dalam menciptakan kesempatan kerja • Kegiatan promosi usaha kecil 	
Tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan informasi bagi masyarakat miskin • Pelibatan dan partisipasi masyarakat miskin 	
<i>Sasaran 3 : Bagaimana kesesuaian respon kebijakan tersebut terhadap karakteristik kemiskinan di Kota Semarang?</i>		
Karakteristik Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Kemiskinan yang terjadi 	Penyebab kemiskinan dan dimensi kemiskinan
Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Anti-Kemiskinan yang dilakukan 	Respon Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan

Sumber: Analisis Penyusun, 2009

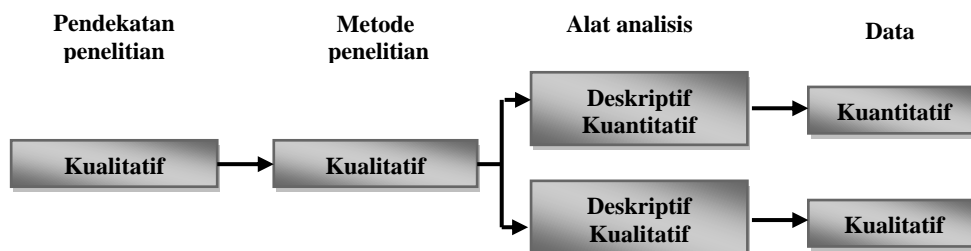
BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya akan mengkaji karakteristik kemiskinan perkotaan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan. Penelitian Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang pada dasarnya berusaha untuk memaparkan fenomena kemiskinan perkotaan dari aspek karakteristik serta respon kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan perkotaan yang terjadi di Kota Semarang. Variabel penelitian ini berangkat dari teori urbanisasi dan teori kemiskinan yang terdiri dari karakteristik dan kebijakan penanganan kemiskinan. Variabel tersebut kemudian digunakan dalam proses pencarian data sebagai *input* dalam proses analisis yang masing-masing telah ditentukan teknik analisisnya.

Berdasarkan kajian literatur, maka pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif dengan dasar ingin menjelaskan variabel penelitian yang sudah tersintesis dari kajian literatur mengenai bagaimana karakteristik kemiskinan perkotaan dan bagaimana respon kebijakan penanganan kemiskinan.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan alat analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan terdiri dari data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang kemudian dideskriptifkan dan data kualitatif yang berasal dari telaah dokumen.



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

**GAMBAR 3.1
METODE PENELITIAN**

3.2 Operasionalisasi Penelitian

Operasionalisasi penelitian digunakan untuk mengetahui bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Operasionalisasi penelitian ini meliputi definisi operasional dan desain matriks/kerangka penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian.

3.2.1 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel atau kata kunci dari suatu penelitian dengan tujuan untuk memberikan batasan dan pemahaman yang sama serta mencegah terjadinya perbedaan persepsi dalam penelitian. Adapun variabel atau kata kunci dalam penelitian Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang antara lain karakteristik kemiskinan perkotaan dan respon kebijakan pemerintah. Pengertian dari masing-masing kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Karakteristik kemiskinan perkotaan**
Karakteristik kemiskinan perkotaan merupakan gambaran kemiskinan perkotaan yang terjadi pada suatu wilayah. Gambaran kemiskinan ini dapat dilihat dari karakteristik penduduk miskin di masing-masing wilayah. Beberapa hal yang dapat menggambarkan karakteristik kemiskinan tersebut antara lain berkaitan dengan dimensi:
 - a) Pendapatan
 - b) Kesehatan
 - c) Pendidikan
 - d) Keamanan
 - e) Kemampuan
- **Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan**
Respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan merupakan program-program penanganan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan kemiskinan selama ini. Program-program yang dimaksud adalah program-program baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun program pemerintah kota. Hal ini berkaitan dengan bantuan yang diberikan, pelayanan sosial yang disediakan, pemberdayaan masyarakat

miskin, kegiatan peningkatan aset dasar masyarakat miskin, penciptaan dan pengembangan pasar bagi masyarakat miskin, serta penciptaan tata kelola pemerintahan.

- **Perkembangan Kota Semarang**

Perkembangan Kota Semarang yang terjadi mempengaruhi perbedaan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga Kota Semarang terklasifikasi dalam 3 bagian wilayah yaitu CBD, zona transisi, dan wilayah pinggiran.

- ✓ CBD merupakan wilayah yang memiliki tingkat harga lahan yang tinggi, kepadatan bangunan yang tinggi, dan dominasi penggunaan lahan yang memiliki tingkat produktivitas tinggi (perdagangan jasa). Selain itu, wilayah CBD dilengkapi dengan sarana dan prasarana perkotaan
- ✓ Zona transisi berada di antara CBD dan pinggiran kota merupakan wilayah dengan tingkat harga lahan yang tinggi (tetapi tidak setinggi pusat kota), tingkat kepadatan bangunan tinggi (tetapi tidak setinggi pusat kota), dan dominasi penggunaan lahan terkait dengan penggunaan lahan di pusat kota (perdagangan dan jasa/pemukiman).
- ✓ Wilayah pinggiran atau *suburban* merupakan wilayah dengan tingkat harga lahan rendah, kepadatan bangunan sedang sampai rendah dan memiliki dominasi penggunaan lahan dengan aktivitas yang memiliki tingkat produktivitas perekonomian rendah (pertanian, konservasi, atau pemukiman).

3.2.2 Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan tahapan penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk dapat lebih mempermudah pemahaman tentang penelitian yang akan digunakan, berikut merupakan desain penelitian Karakteristik Kemiskinan dan Respon Kebijakannya di Kota Semarang. Untuk dapat lebih mempermudah pemahaman tentang penelitian yang dilakukan, disusun desain penelitian kemiskinan dalam perkembangan Kota Semarang dalam tabel berikut :

TUJUAN : Menganalisis karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan dalam perkembangan Kota Semarang.

	SASARAN 1	SASARAN 2	SASARAN 3
SASARAN	Karakteristik kemiskinan	Respon kebijakan penanganan kemiskinan	Kesesuaian respon kebijakan tersebut terhadap karakteristik kemiskinan
DEFINISI	Gambaran kemiskinan yang terjadi pada suatu wilayah yang dapat dilihat dari penyebab dan dampak yang ditimbulkan	Program penanganan kemiskinan yang telah dilaksanakan untuk menangani kemiskinan	Respon kebijakan yang telah dilakukan apakah sudah merespon karakteristik kemiskinan yang terjadi
VARIABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan • Kesehatan • Pendidikan • Keamanan • Kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan • Pelayanan sosial • Pemberdayaan • Aset dasar • Pasar • Tata kelola pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Kemiskinan • Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan
TEKNIK ANALISIS	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis karakteristik kemiskinan dengan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis respon kebijakan penanganan kemiskinan dengan analisis deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kesesuaian respon kebijakan terhadap karakteristik kemiskinan dengan analisis deskriptif kualitatif
METODE PENGUMPULAN DATA	Kuesioner dan survei instansional	survei instansional	Kuesioner dan survei instansional

Sumber : Analisis Penyusun, 2009

3.3 Data Penelitian

Data penelitian merupakan elemen penting dalam setiap penelitian. Data merupakan informasi yang didapatkan sebagai input penelitian. Adapun data yang ingin dicari dalam penelitian kuantitatif disesuaikan dengan variabel-variabel penelitian yang telah diperoleh sebelumnya melalui kajian literatur pada bab II. Data penelitian meliputi data yang digunakan, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian.

3.3.1 Data yang Digunakan dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan variabel penelitian yang telah dirumuskan dalam bab II, maka data–data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

TABEL III. 1
KEBUTUHAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Variabel	Data	Tahun	Unit	Teknik
Menganalisis karakteristik kemiskinan				
Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata Pencapaian • TingkatPendapatan • Tingkat Pendidikan 	Terbaru	Rumah Tangga	<u>Primer :</u> kuesioner Observasi
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan perumahan dan sanitasi • Akses terhadap air bersih 	Terbaru	Rumah Tangga	
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap sarana pendidikan 	Terbaru	Rumah Tangga	
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan dan penguasaan tanah 	Terbaru	Rumah Tangga	
Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam mengambil keputusan 	Terbaru	Rumah Tangga	
Menganalisis respon kebijakan penanganan kemiskinan				
Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bantuan langsung yang diberikan 	Terbaru	Kelurahan	<u>Sekunder :</u> Bappeda Kelurahan
Pelayanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan sosial yang disediakan 	Terbaru	Kelurahan	
Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan 	Terbaru	Kelurahan	
Aset dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Aset dasar masyarakat miskin yang ditingkatkan 	Terbaru	Kelurahan	
Pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan LSM : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Peminjaman modal ➢ Kesempatan kerja • Kegiatan promosi usaha kecil 	Terbaru	Kelurahan	
Tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan informasi bagi masyarakat miskin • Pelibatan dan partisipasi masyarakat miskin 	Terbaru	Kelurahan	
Mengidentifikasi kesesuaian respon kebijakan terhadap karakteristik kemiskinan				
Karakteristik Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Kemiskinan yang terjadi 	Terbaru		Hasil dua analisis sebelumnya
Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Anti-Kemiskinan yang dilakukan 	Terbaru		

Sumber : Analisis Penyusun, 2009

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui *survey research* (penelitian survei) dan *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari pengumpulan data primer ini digunakan untuk melengkapi data sekunder.

- Pengamatan langsung

Teknik pengamatan langsung/observasi dipilih karena melalui pengamatan/observasi diperoleh gambaran perkembangan wilayah Kota Semarang yang dapat dilihat dari keberadaan sarana prasarana dan kelengkapan fasilitas serta fenomena kemiskinan perkotaan yang terjadi, sehingga dapat diketahui karakteristik kemiskinan. Di samping itu, teknik ini menghasilkan foto yang bertujuan untuk memperkuat fakta yang ada. Observasi lapangan dilakukan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dari telaah dokumen, studi literatur, kuesioner. Observasi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan dokumentasi gambar di lapangan untuk memperkuat fakta yang ditemukan. Instrumen yang digunakan dalam observasi ini adalah kamera digital dan catatan pengamatan lapangan.

- Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk diisi oleh para responden. Adapun pertanyaan yang dibuat disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui karakteristik kemiskinan perkotaan di Kota Semarang. Kuesioner yang disebarkan bersifat campuran berupa pertanyaan tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kebebasan serta menspesifikkan jawaban responden, sehingga hasil kuesioner yang diperoleh tidak terlalu umum dan biasa. Adapun kuesioner diberikan kepada keluarga miskin di wilayah mikro yang menjadi fokus penelitian.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan survei instansi untuk mendapatkan data-data dan telaah dokumen.

1. Survei Instansi

Survei instansi dilakukan kepada BPS, Bappeda Kota Semarang dan lima kelurahan yang merupakan fokus wilayah penelitian. Adapun justifikasi pemilihan wilayah studi tersebut dapat dilihat pada Bab III.

2. Telaah Dokumen

Dokumen yang ditelaah adalah dokumen yang berkaitan dengan kemiskinan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh bahasan yang lebih luas, di samping memberikan kemudahan dalam mengakses dokumen, sehingga dapat menghemat waktu. Dokumen tersebut dapat diperoleh melalui media massa baik dari internet maupun surat kabar mengenai penelitian-penelitian tentang kemiskinan yang pernah dilakukan sebelumnya.

3.3.2 Teknik *Sampling* Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun, 1995). Populasi juga dapat diartikan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.

Teknik *sampling* merupakan suatu teknik dalam pengambilan sampel dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen dan survei instansi. Untuk kuesioner kepada keluarga miskin diperlukan suatu teknik *sampling*, mengingat banyaknya jumlah populasi pada wilayah penelitian dan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, sedangkan biaya dan waktu yang dimiliki relatif sedikit.

Keluarga miskin pada wilayah populasi sangat banyak. Oleh karena itu, teknik penentuan jumlah sampel yang dinilai paling tepat digunakan adalah *proportional sampling*. Teknik penentuan sampel ini dimaksudkan untuk mendapatkan jumlah sampel berdasarkan perbandingan. Teknik pengambilan jumlah sampel kuesioner dari setiap populasi tersebut dilakukan dengan cara

proporsional *sampling*. Dengan cara ini, jumlah sampel dan responden yang akan diambil di Kota Semarang dilakukan secara proporsional.

Wilayah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 kelurahan yaitu Kelurahan Peterongan, Kelurahan Bongsari, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Mangunsari. Adapun justifikasi pemilihan wilayah sampel berdasarkan klasifikasi pembagian wilayah Kota Semarang dan tingkat kemiskinan pada masing-masing kelurahan.

- Kelurahan Peterongan merupakan bagian wilayah CBD yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi.
- Kelurahan Bongsari yang berada di Kecamatan Semarang Barat merupakan bagian zona transisi yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi.
- Kelurahan Mangkang Wetan merupakan bagian wilayah pinggiran (suburban) yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi. Selain itu letaknya berada di bagian utara Kota Semarang yang jauh dari pusat kota.
- Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Rowosari merupakan bagian wilayah pinggiran (suburban) yang memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi diantara wilayah suburban lain yang masih memiliki karakteristik pedesaan. Selain itu, kedua kelurahan tersebut terletak di bagian selatan Kota Semarang.

Adapun asumsi pemilihan kelurahan sebagai unit penelitian berkaitan dengan spesifikasi program penanganan kemiskinan yang telah dilakukan pada masing-masing wilayah. Sedangkan kelurahan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi diasumsikan memiliki program-program penanganan kemiskinan yang lebih beragam daripada kelurahan dengan tingkat kemiskinan rendah. Berdasarkan asumsi tersebut diharapkan data yang akan diperoleh dari unit penelitian akan lebih detail dan beragam sehingga mampu menjawab tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab III. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin (KK Miskin) di 5 kelurahan tersebut pada tahun 2006 berjumlah 4133 KK sedangkan jumlah total KK adalah 7253 KK.

Adapun jumlah sampel yang akan diambil ditentukan berdasarkan rumus (Usman dan Akbar, 2006: 188) sebagai berikut:

$$n \geq pq \left(\frac{Z_{1/2\alpha}}{\alpha} \right)^2$$

keterangan:

n = jumlah sampel

p = proporsi kelompok pertama

$$= \frac{\text{jumlahKKMiskin}}{\text{jumlahKK}}$$

q = proporsi kelompok kedua = (1 - p)

α = taraf signifikansi

$Z_{1/2\alpha}$ = nilai Z tabel

Z = normal variabel yang merupakan nilai tingkat kepercayaan

	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%
Z	1,290	1,645	1,960	3,00

Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dihitung sebagai berikut :

α = 0,10 (10%)

maka Z = 1,645

$$\begin{aligned} p &= \frac{4.133}{7.253} \\ &= 0.569833 \\ &= 0,57 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n &\geq 0,57(1 - 0,57) \left(\frac{1,645}{0,10} \right)^2 \\ &\geq 0,2451 (270,6025) \\ &\geq 66.32467275 \\ &\geq 66 \end{aligned}$$

Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini lebih dari atau sama dengan 66 KK Miskin. Sedangkan teknik penentuan jumlah sampel pada masing-masing kelurahan di Kota Semarang dilakukan secara proporsional dengan rumus (Walpole, 1993 : 233) sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan :

n_i = jumlah sampel tiap kelurahan

N_i = jumlah populasi kelurahan ke i

n = jumlah sampel total

N = jumlah populasi total

Berdasarkan pada rumus di atas maka jumlah sampel pada masing-masing kelurahan dapat dilihat pada Tabel III.2 di bawah ini :

TABEL III.2
JUMLAH SAMPEL TIAP KELURAHAN

No	Kelurahan	Jumlah
1	Kelurahan Peterongan	11
2	Kelurahan Bongsari	16
3	Kelurahan Mangkang Wetan	11
4	Kelurahan Rowosari	19
5	Kelurahan Mangunsari	9
	Jumlah	66

Sumber : Analisis Penyusun, 2009

3.3.3 Pengelompokkan dan Pengkodean Data

Data penelitian yang diperoleh nantinya terdiri dari kuesioner dan observasi. Masing-masing data tersebut akan diberi kode sesuai teknik pengumpulan melalui pengkodean yaitu kuesioner (K) dan observasi (O). Setelah itu, masing – masing data tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan sasaran dalam penelitian yaitu karakteristik kemiskinan perkotaan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan.

3.4 Analisis Data

Pada tahap ini data dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik analisis untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis-analisis tersebut antara lain analisis karakteristik kemiskinan, dan analisis respon kebijakan penanganan kemiskinan serta identifikasi kesesuaian respon kebijakan terhadap karakteristik kemiskinan.

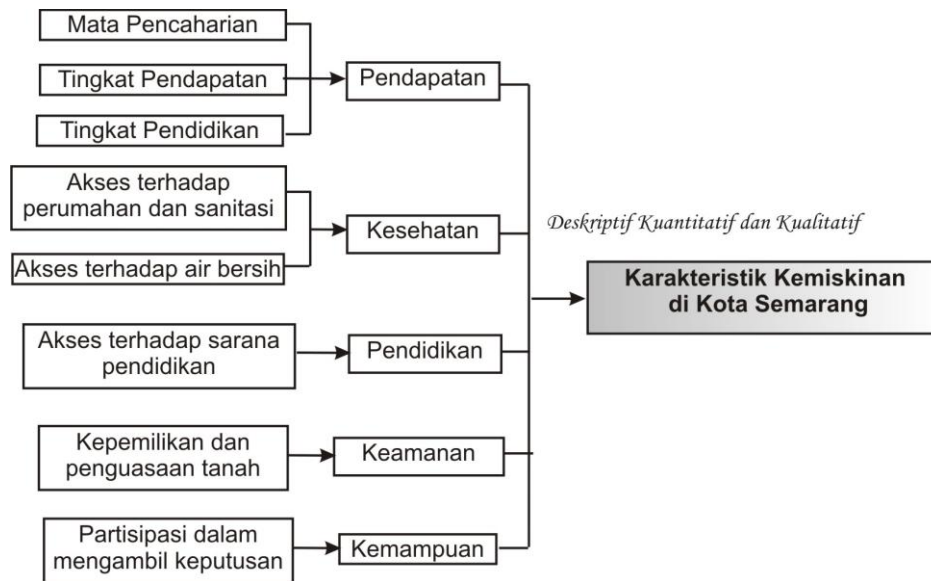
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan dalam perkembangan Kota Semarang. Metode serta alat analisis yang akan digunakan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Analisis karakteristik kemiskinan**

Analisis ini merupakan analisis untuk mengetahui karakteristik kemiskinan yang dapat dilihat dari berbagai variabel. Analisis ini menggunakan alat analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan mendeskripsikan data-data hasil kuesioner yang sesuai dengan variabel yang terkait. Adapun hasil analisis akan distrukturkan dalam tabel di bawah ini :

	Pendapatan	Kesehatan	Pendidikan	Keamanan	Kemampuan
Penjelasan					

Berdasarkan klasifikasi wilayah dan kesimpulan karakteristik kemiskinan yang diketahui dari hasil telaah dokumen dan hasil kuesioner akan dihasilkan beberapa karakteristik kemiskinan. Tiap karakteristik yang terbentuk seharusnya mendapatkan respon kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

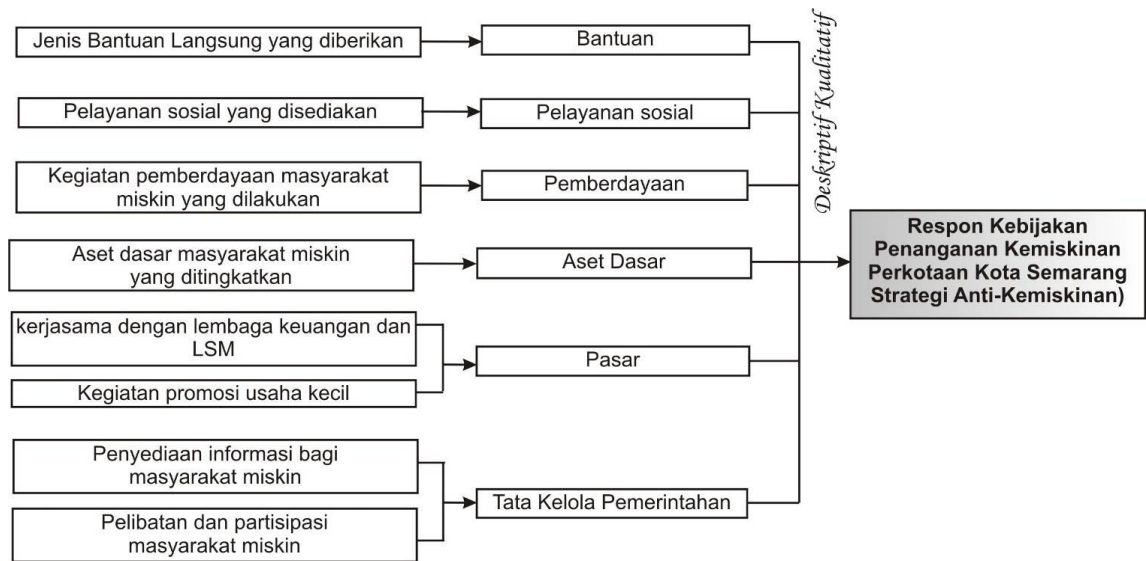
GAMBAR 3.2
ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN

- **Analisis respon kebijakan penanganan kemiskinan**

Analisis ini merupakan analisis untuk mengetahui respon kebijakan penanganan kemiskinan yang dapat dilihat dari berbagai variabel. Analisis ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data-data hasil telaah dokumen yang sesuai dengan variabel yang terkait. Adapun kebijakan yang dianalisis terdiri dari program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan di lima kelurahan. Adapun hasil analisis akan distrukturkan dalam tabel di bawah ini :

	Bantuan	Pelayanan	Pemberdayaan	Aset dasar	Pasar	Tata Kelola Pemerintahan
Penjelasan						

Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan akan dikelompokkan ke dalam strategi anti-kemiskinan sesuai dengan model penanganan kemiskinan dan konsep penanganan kemiskinan. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Gambar 3.3 berikut ini:



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

GAMBAR 3.3
ANALISIS RESPON KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN

• **Identifikasi kesesuaian respon kebijakan terhadap karakteristik kemiskinan**

Berdasarkan hasil analisis karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan yang akan diketahui apakah strategi anti-kemiskinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin yang sebenarnya yang dilihat dari karakteristik kemiskinannya.

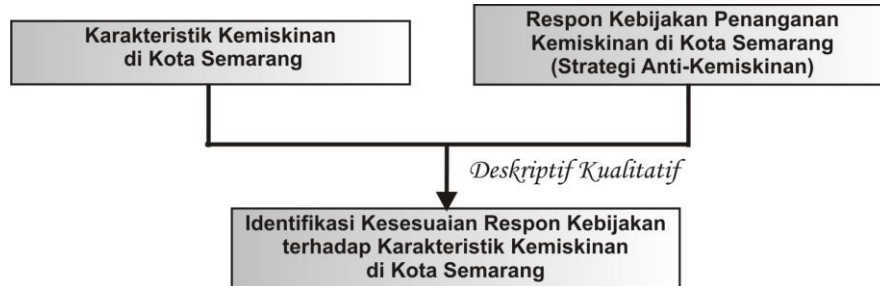
Berdasarkan hasil dari karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan dapat distrukturkan dalam tabel di bawah ini:

Strategi Anti-Kemiskinan		Karakteristik Kemiskinan		
		A	B	C
		X	X	X
1	X	V		
2	-		?	
3	X			

Keterangan :

- X = Terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
 - = Tidak terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
 V = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan
 ? = Karakteristik kemiskinan belum/tidak direspon kebijakan penanganan kemiskinan

Adapun identifikasi tersebut dapat distrukturkan dalam bagan analisis berikut ini.



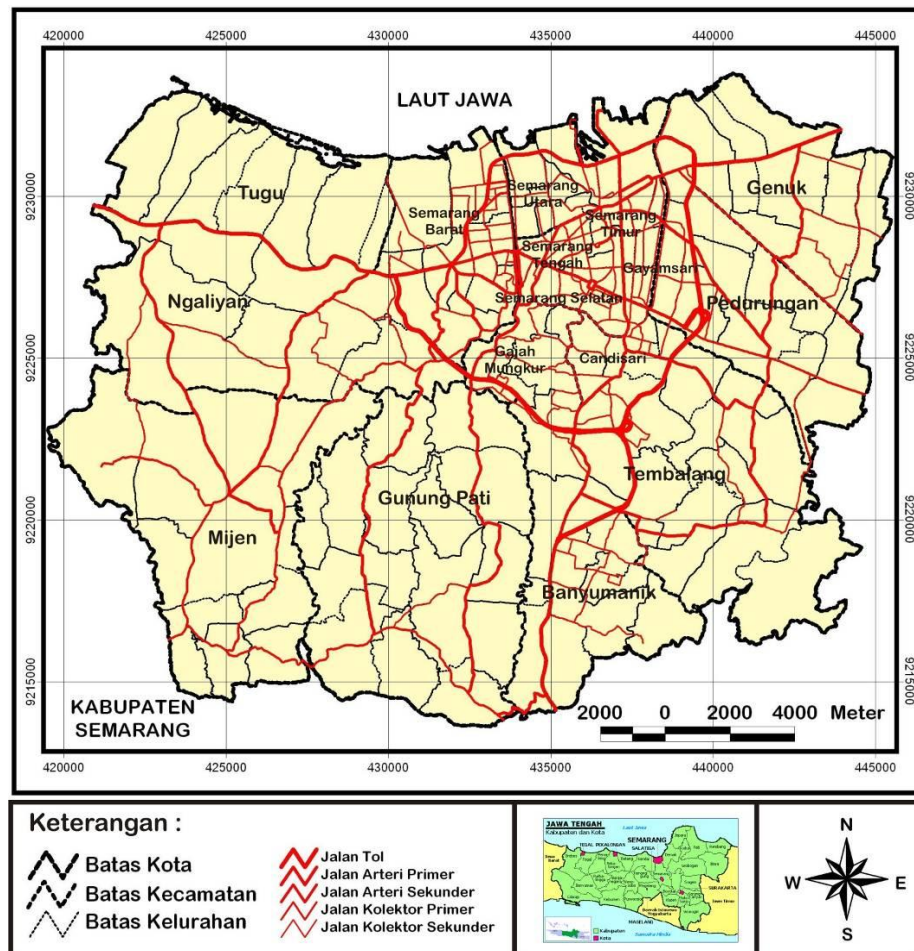
Sumber : Analisis Penyusun, 2009

GAMBAR 3.4
IDENTIFIKASI KESESUAIAN RESPON KEBIJAKAN TERHADAP
KARAKTERISTIK KEMISKINAN

BAB IV PERKEMBANGAN KEMISKINAN DAN RESPON KEBIJAKANNYA DI KOTA SEMARANG

4.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Semarang

Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan yang cukup pesat di Kota Semarang tidak terlepas dari dukungan wilayah di sekitarnya, seperti Kota Ungaran, Kabupaten Demak, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal.



Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2007

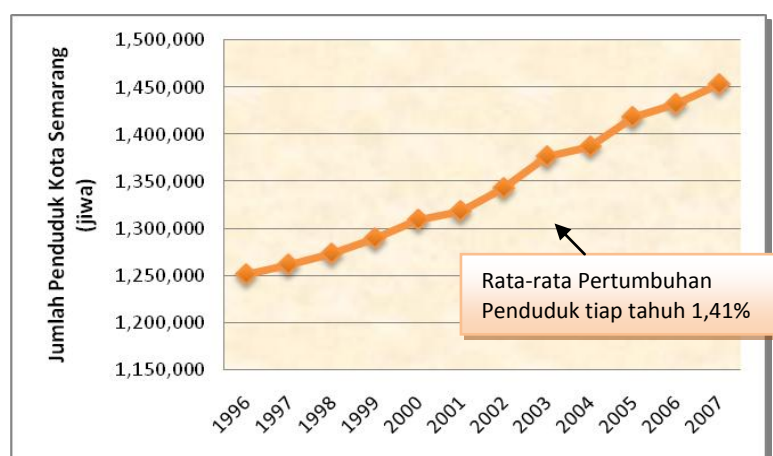
**GAMBAR 4.1
PETA KOTA SEMARANG**

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 373,7 km². Kecamatan Mijen merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas (62,15 km²) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Candisari (5,56 km²). Ketinggian Kota Semarang bervariasi, terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Kota Semarang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dalam 1 dekade terakhir ini. Pertumbuhan Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia dapat dilihat dengan indikator penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan perkembangan dapat dilihat dengan melihat penambahan lahan terbangun Kota Semarang serta pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

4.1.1 Pertumbuhan Penduduk Perkotaan

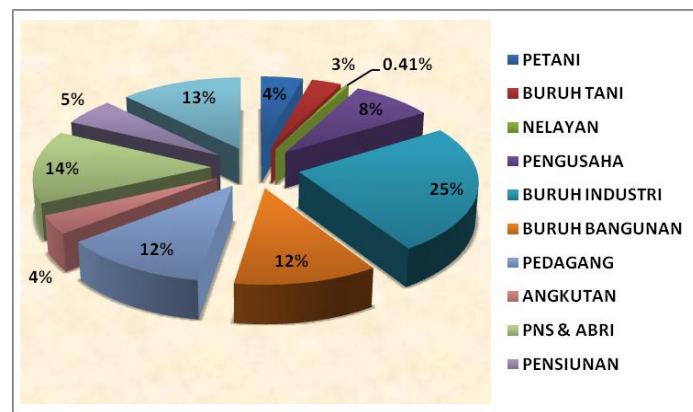
Berdasarkan penduduk tahun 2007, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.454.594 jiwa (Kota Semarang Dalam Angka, 2007) dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2007 sebesar 1,41%. Dalam kurun waktu 5 tahun (2003-2007), kepadatan penduduk cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata.



Sumber : Diolah dari Kota Semarang Dalam Angka, 2007

GAMBAR 4.2
PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 1996 – 2007

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Semarang belum merata. Penduduk lebih tersentral di pusat kota. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Semarang Selatan, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Mijen. Jumlah usia produktif cukup besar, mencapai 69.30% dari jumlah penduduk (www.semarang.go.id, 2008). Hal ini menunjukkan Kota Semarang memiliki potensi tenaga kerja yang besar yang merupakan sumber daya manusia yang mendukung perkembangan Kota Semarang.



Sumber : Diolah dari *Kota Semarang Dalam Angka, 2007*

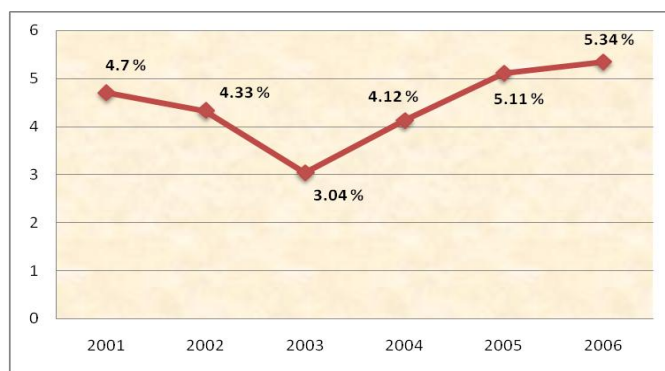
GAMBAR 4.3
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2007

Sementara itu jika dilihat berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kota Semarang tersebar pada pegawai negeri, sektor industri, ABRI, petani, buruh tani, pengusaha; pedagang, angkutan dan selebihnya pensiunan. Sebagian besar penduduk Kota Semarang bekerja sebagai buruh industri yaitu sebesar 25%. Kemudian yang bekerja sebagai PNS dan ABRI sebesar 14%. Meskipun Kota Semarang merupakan salah satu kota pesisir di Jawa Tengah, namun penduduk yang bekerja sebagai nelayan hanya sebesar 0,41%.

4.1.2 Perekonomian

Kondisi perekonomian Jawa Tengah yang membaik ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, tahun 2006 ekonomi Jawa Tengah diukur berdasarkan nilai PDRB tumbuh sebesar 5,33%. Pada tahun 2001 laju

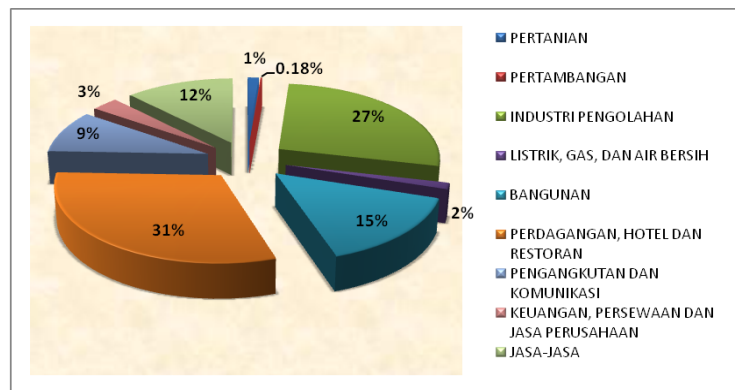
pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mengalami peningkatan cukup baik yaitu sebesar 4,70%. Sedangkan pada tahun 2002 dan 2003 pertumbuhan ekonomi meningkat namun nilainya lebih kecil daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,33% dan 3,04%. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi menjadi 4,12% dan pada tahun 2005 semakin meningkat menjadi 5,11%. Sejalan dengan perkembangan ekonomi Jawa Tengah yang membaik, kinerja ekonomi Kota Semarang Tahun 2006 juga mengalami peningkatan sebesar 5,34%.



Sumber : Diolah PDRB Kota Semarang, 2006

GAMBAR 4.4
RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SEMARANG
TAHUN 2001 – 2006

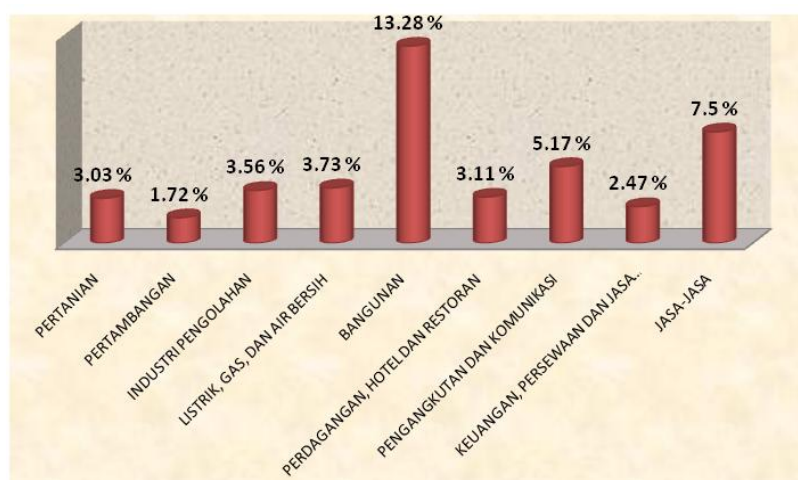
Dari data tahun 2006, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Semarang yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (31%), kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan (27%), sektor jasa-jasa (12%), sektor pengangkutan dan komunikasi (9%). Sedangkan sektor lainnya hanya berkontribusi kurang dari 9%. Sektor pertambangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil yaitu hanya sebesar 0,18%.



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Semarang, 2006

GAMBAR 4.5
PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB TIAP SEKTOR DI KOTA SEMARANG
TAHUN 2006

Laju pertumbuhan seluruh sektor pada tahun 2006 menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor Bangunan mengalami pertumbuhan yang paling besar dibandingkan sektor ekonomi lainnya yaitu sebesar 13,28% lebih besar daripada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 9,04%.



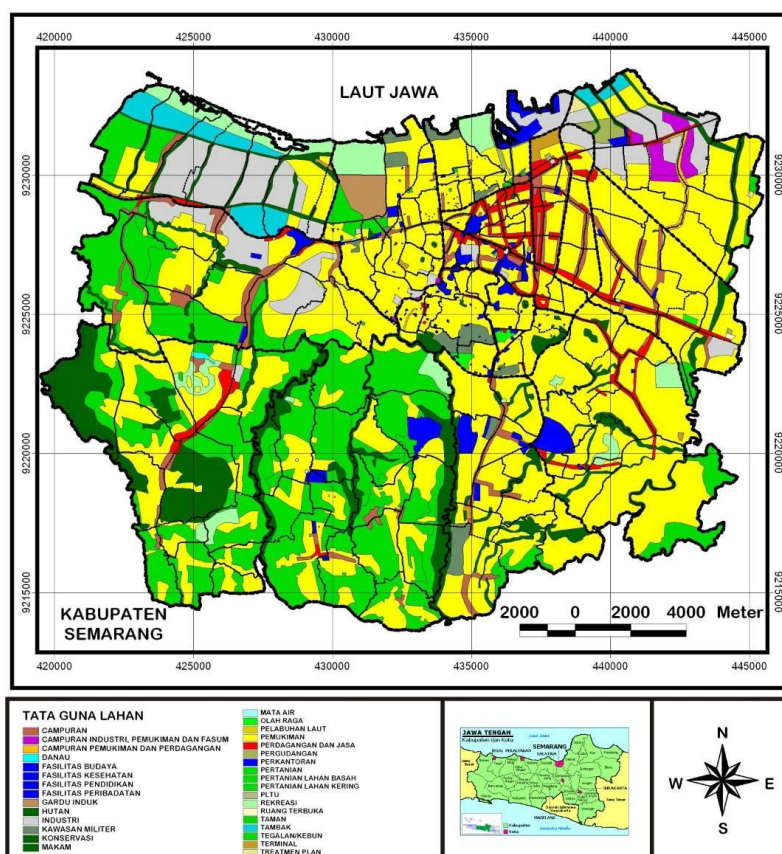
Sumber : Diolah dari PDRB Kota Semarang, 2006

GAMBAR 4.6
RATA-RATA PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI DI KOTA SEMARANG
TAHUN 2006

4.1.3 Pola dan Struktur Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Semarang dari tahun ketahun mengalami perubahan yang mengarah dari pertanian menjadi non pertanian, ini merupakan gejala wajar dari perkembangan kota. Perubahan tersebut mengindikasikan Semarang demikian berkembang pesat. Munculnya pusat-pusat bisnis dan jasa mengakibatkan permintaan akan tanah atau lahan makin meningkat.

Demikian pula yang terjadi pada areal persawahan di pinggiran kota seperti Kecamatan Gunungpati yang merupakan sentra agribisnis dan pertanian, mengalami penyusutan luas lahan pertanian. Salah satu sebab terjadinya penyusutan lahan tersebut adalah berdirinya beberapa sarana pendidikan yang penting, sehingga menarik para pengusaha untuk membangun usaha tempat kos, real estate, usaha bisnis perdagangan, dan sebagainya (<http://www.wawasandigital.com>, 2009).



GAMBAR 4.7
TATA GUNA LAHAN KOTA SEMARANG TAHUN 2007

Selain itu, kecenderungan perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali juga dicatat dari hasil penelitian Hariyanto (2004) yang menunjukkan bahwa meluasnya lahan pemukiman mencapai 40% dari luas kota dengan intensitas 231,9 hektar per tahun. Jumlah rumah meningkat 62.466 dalam jangka waktu 14 tahun atau 4.462 unit per tahun. Sedangkan sawah berkurang 2.239 hektar per tahun, rawa dan empang berkurang 4.335 hektar per tahun, tegal dan kebun berkurang 339 hektar per tahun (<http://www.wawasandigital.com>, 2009).

4.2 Karakteristik Wilayah di Kota Semarang

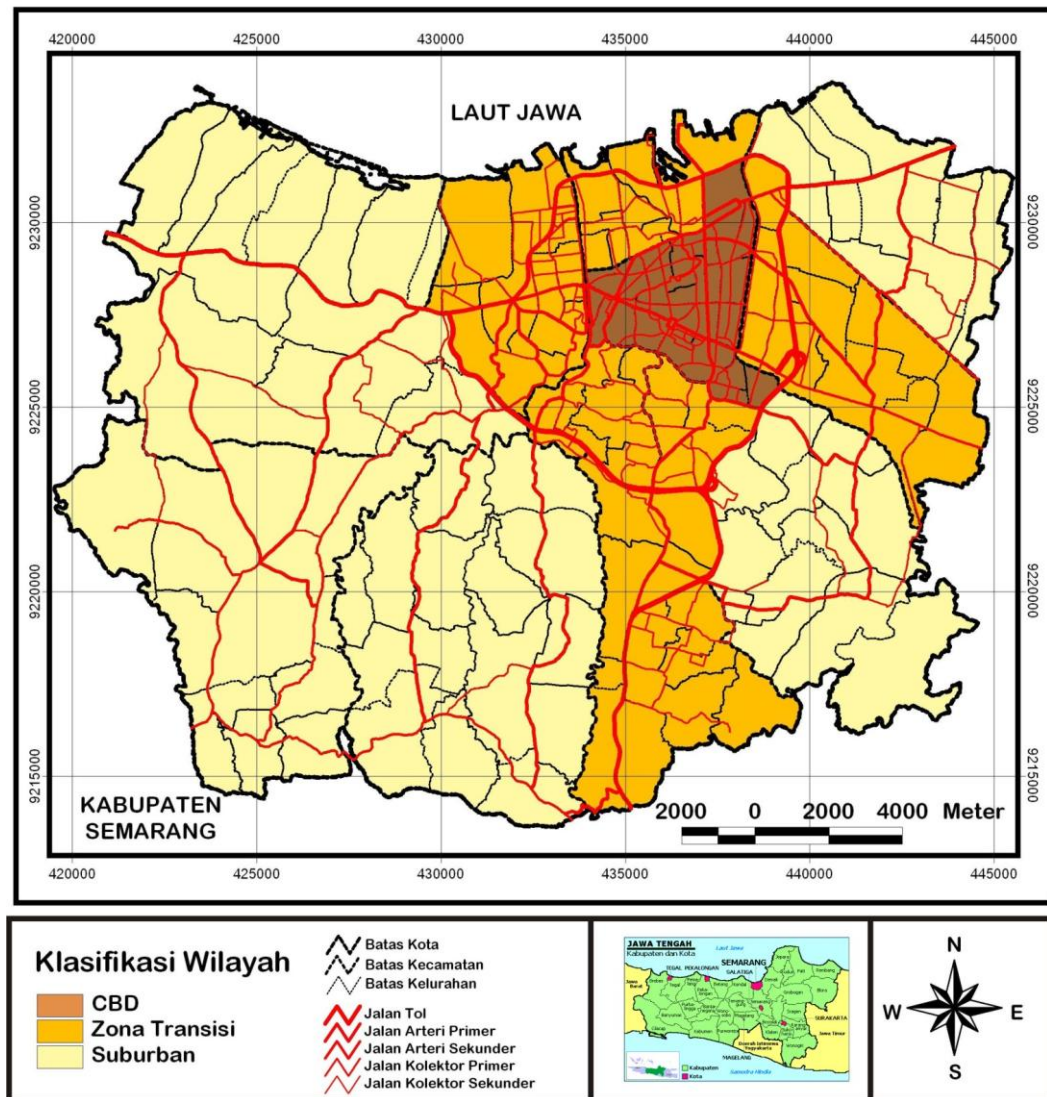
Berdasarkan penilaian klasifikasi harga lahan, kepadatan bangunan, penggunaan lahan dominan, Sulistyaningsih (2007) membagi wilayah Kota Semarang menjadi 3 bagian wilayah yaitu pusat kota (CBD), tengah kota (zona transisi), pinggiran kota (*suburban*). Hal ini didasarkan pada penjelasan Goodal (1966) dalam Sulistyaningsih (2007) yang mengemukakan bahwa pusat kota (CBD) merupakan wilayah yang memiliki tingkat harga lahan yang tinggi, kepadatan bangunan yang tinggi, dan dominasi penggunaan lahan yang memiliki tingkat produktivitas tinggi (perdagangan jasa). Sedangkan zona transisi yang berada di antara CBD dan pinggiran kota merupakan wilayah dengan tingkat harga lahan yang tinggi (tetapi tidak setinggi pusat kota), tingkat kepadatan bangunan tinggi (tetapi tidak setinggi pusat kota), dan dominasi penggunaan lahan adalah terkait dengan penggunaan lahan di pusat kota (perdagangan dan jasa/pemukiman). Wilayah pinggiran kota atau *suburban* merupakan wilayah dengan tingkat harga lahan rendah, kepadatan bangunan sedang sampai rendah dan memiliki dominasi penggunaan lahan dengan aktivitas yang memiliki tingkat produktivitas perekonomian rendah (pertanian, konservasi, atau pemukiman).

TABEL IV.1
KLASIFIKASI PEMBAGIAN WILAYAH KOTA SEMARANG

Kecamatan	Klasifikasi Harga Lahan	Kepadatan Bangunan	Penggunaan Lahan Dominan	Klasifikasi
Semarang Tengah	Tinggi	Tinggi	Perdagangan dan jasa	Pusat kota (CBD)
Semarang Utara	Tinggi	Tinggi	Pemukiman	Tengah kota (zona transisi)
Semarang Selatan	Tinggi	Tinggi	Pemukiman, perdagangan dan jasa	Pusat kota (CBD)
Semarang Timur	Tinggi	Tinggi	Perdagangan dan jasa, pemukiman	Pusat kota (CBD)
Semarang Barat	Tinggi	Tinggi	Pemukiman	Tengah kota (zona transisi)
Gayamsari	Tinggi	Tinggi	Pemukiman, campuran	Tengah kota (zona transisi)
Banyumanik	Tinggi	Tinggi	Pemukiman, pertanian	Tengah kota (zona transisi)
Gajah Mungkur	Tinggi	Tinggi	Pemukiman	Tengah kota (zona transisi)
Pedurungan	Tinggi	Tinggi	Pemukiman	Tengah kota (zona transisi)
Candisari	Tinggi	Tinggi	Pemukiman	Tengah kota (zona transisi)
Mijen	Rendah	Rendah	Pertanian dan konservasi	Pinggiran kota (suburban)
Tugu	Sedang	Rendah	Industri, pertanian	Pinggiran kota (suburban)
Genuk	Sedang	Sedang	Pemukiman, industri	Pinggiran kota (suburban)
Tembalang	Sedang	Sedang	Pemukiman	Pinggiran kota (suburban)
Gunungpati	Rendah	Rendah	Pertanian dan konservasi	Pinggiran kota (suburban)
Ngaliyan	Sedang	Rendah	Pertanian dan pemukiman	Pinggiran kota (suburban)

Sumber : Sulistyaningsih, 2007

Berdasarkan hasil penelitian Sulistyaningsih (2007) di atas, pembagian wilayah Kota Semarang berdasarkan tiga klasifikasi (CBD, zona transisi, pinggiran kota) dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.

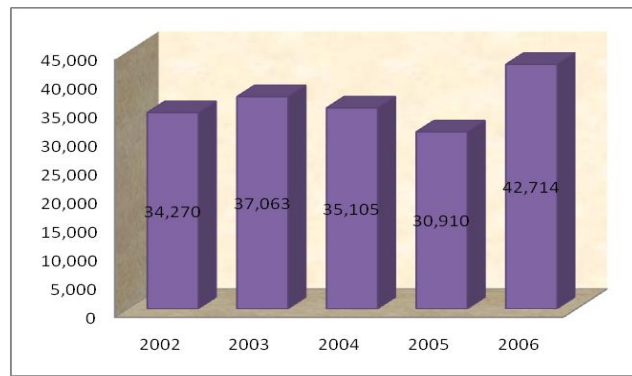


Sumber : Sulistyarningsih, 2007

GAMBAR 4.8
PETA KLASIFIKASI PEMBAGIAN WILAYAH KOTA SEMARANG

4.3 Pertumbuhan Kemiskinan di Kota Semarang

Perkembangan Kota Semarang dapat dilihat dengan melihat penambahan lahan terbangun di Kota Semarang. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang salah satunya diakibatkan oleh banyaknya penduduk yang datang dari luar Kota Semarang.



Sumber : diolah dari Wilonoyudho dalam <http://www.wawasandigital.com>, 2009

GAMBAR 4.9
JUMLAH PENDUDUK YANG MASUK KOTA SEMARANG TAHUN 2002-2006

Perkembangan tersebut tidak hanya berdampak positif yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Semarang namun juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut antara lain adalah meningkatnya jumlah perumahan berskala besar di wilayah pinggiran Kota Semarang. Perkembangan yang bersifat *sprawl* tersebut menyebabkan penyebaran sarana prasarana perkotaan ke daerah pinggiran yang tidak merata.

Sejalan dengan laju perkembangan Kota Semarang, permasalahan mengenai kemiskinan perkotaan semakin nyata. Hal tersebut tercermin pada semakin berkembangnya permukiman kumuh dan liar (*slums and squatters*) baik di pusat kota, tengah kota maupun pinggiran kota, di samping itu juga semakin banyaknya kegiatan sektor informal pada lokasi yang strategis dan pada setiap titik pertumbuhan kota (Ridlo, 2002).

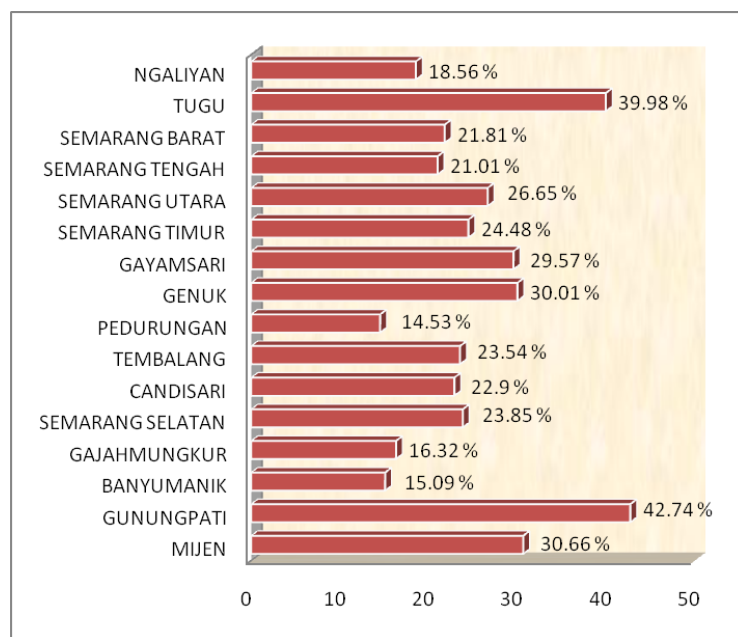
Angka kemiskinan di Semarang juga masih cukup tinggi. Hal ini terjadi karena distribusi pendapatan semakin memperlebar kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Akibatnya muncul sektor-sektor informal seiring dengan perkembangan metropolitan Semarang. Sektor informal tersebut salah satunya dapat dilihat dari keberadaan lokasi pemukiman kumuh di Kota Semarang di mana terdapat 42 titik (Ridlo, 2002) dan tingkat kemiskinan Kota Semarang yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

TABEL IV.2
TINGKAT KEMISKINAN BERDASARKAN JUMLAH
KELUARGA MISKIN KOTA SEMARANG TAHUN 2002 – 2006

Tahun	Jumlah Keluarga	Jumlah keluarga Miskin	(%) Penduduk Miskin
2002	316.338	44.013	13,91
2003	322.734	44.358	13,74
2004	330.496	51.604	15,61
2005	354.581	69.646	19,64
2006	364.851	82.482	22,61

Sumber : Kota Semarang dalam Angka, 2006

Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan paling besar di Kota Semarang yaitu sebesar 42,74%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase rumahtangga miskin pada masing-masing kecamatan di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Diolah dari Profil RumahTangga Miskin Kota Semarang, 2006

GAMBAR 4.10
JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN MENURUT KECAMATAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2006

4.4 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

Adapun program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang baik yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, adalah sebagai berikut (Bappeda Kota Semarang, 2008) :

1. Program PKPS BBM

Kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM adalah dengan mengalihkan subsidi BBM untuk golongan masyarakat miskin antara lain Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin, Pembebasan Biaya Pendidikan pada tingkat tertentu, pengobatan pada masyarakat miskin, subsidi beras, subsidi minyak goreng, subsidi gula, dan pembangunan prasarana perdesaan. Kebijakan ini disinergikan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

a. BLT kepada Rumah Tangga Miskin

Program BLT merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada penduduk miskin di Kota Semarang.

b. Bantuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM)

Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain agar memperoleh pendidikan dasar yang lebih baik. Sedangkan untuk BKM ditujukan untuk siswa SMA dan SMK yang tidak mampu. Secara teknis kedua program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

c. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Program ini merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu diselenggarakan secara nasional. Pendanaan program ini berasal dari dana APBN melalui Departemen Sosial.

d. Beras Miskin

Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat dengan membeli Beras di bawah harga pasar.

2. Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)

Program ini merupakan salah satu kegiatan secara terencana dan terstruktur yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini dilaksanakan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat di wilayah pesisir yaitu kepada petani tambak, nelayan, pedagang ikan dan lain-lain.

3. Program P2KP PNPM

Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat. Hal yang terwujud dari program ini adalah terbentuknya kelembagaan masyarakat lokal yang mandiri, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga yang peduli terhadap kemiskinan di komunitasnya.

4.5 Wilayah Fokus Penelitian

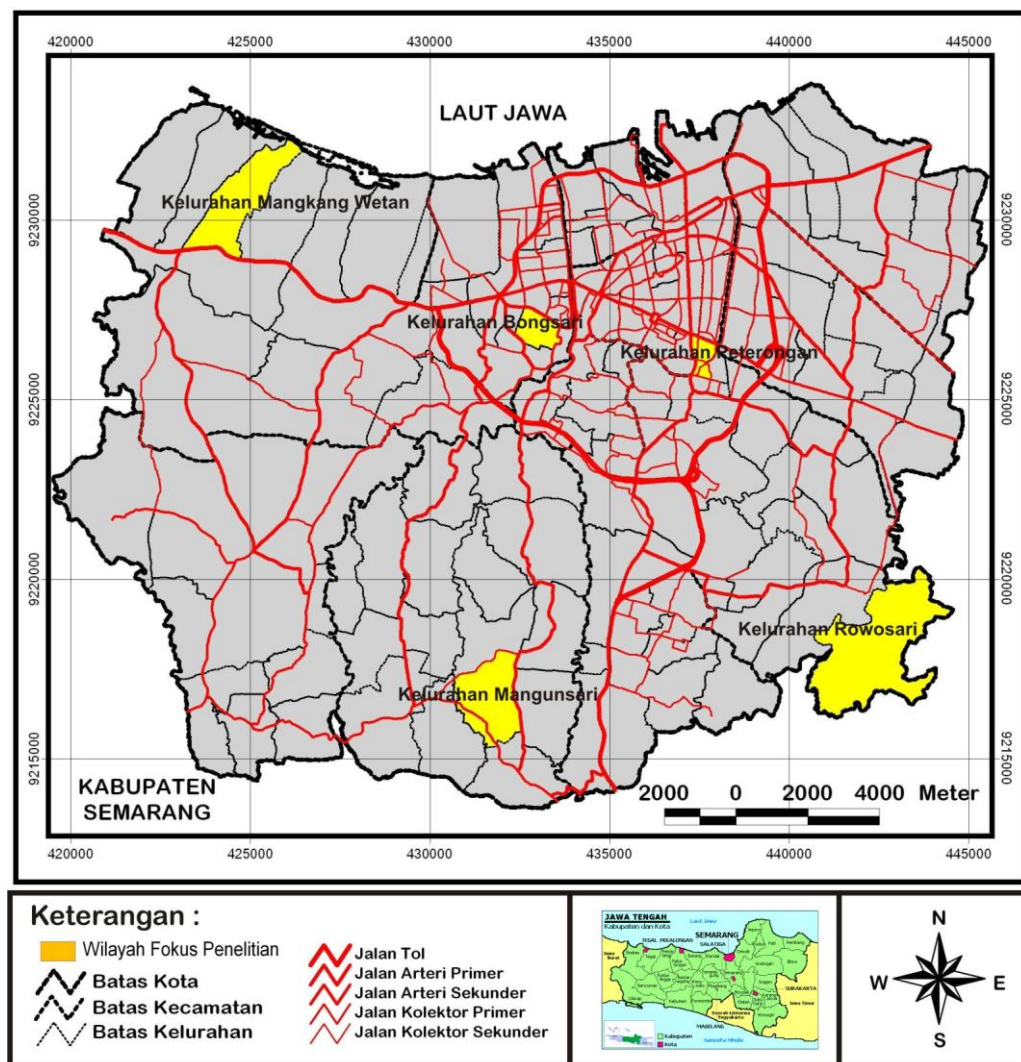
Berdasarkan klasifikasi pembagian wilayah Kota Semarang, penggunaan lahan dominan, tingkat kemiskinan pada masing-masing kelurahan, dan status kelurahan di Kota Semarang adapun wilayah studi mikro pada penelitian ini yaitu Kelurahan Peterongan (Kecamatan Semarang Selatan), Kelurahan Bongsari (Kecamatan Semarang Barat), Kelurahan Mangkang Wetan (Kecamatan Tugu), Kelurahan Mangunsari (Kecamatan Gunungpati) dan Kelurahan Rowosari (Kecamatan Tembalang).

TABEL IV.3
PEMILIHAN WILAYAH FOKUS PENELITIAN

Klasifikasi Wilayah	Kecamatan	Penggunaan Lahan Dominan	Kelurahan dengan Persentase KK Miskin Tinggi	Status Kelurahan	Persentase KK Miskin (%) Tahun 2006
CBD	Semarang Tengah	Perdagangan dan Jasa	Purwodinatan	Kota	31,97
	Semarang Timur	Perdagangan dan Jasa, Permukiman	Kemijen	Kota	37,85
	Semarang Selatan	Perdagangan dan Jasa, Permukiman	Peterongan	Kota	39,09
Zona Transisi	Semarang Utara	Permukiman	Tanjungmas	Kota	37,45
			Bandarharjo	Kota	36,45
			Dadapsari	Kota	36,66
			Kuningan	Kota	34,20
	Semarang Barat	Permukiman	Bongsari	Kota	85,48
			Tambakharjo	Kota	35,74
	Gayamsari	Permukiman, campuran	Siwalan	Kota	49,20
			Tambakrejo	Kota	41,59
			Sawah Besar	Kota	35,98
	Candisari	Permukiman	Karanganyar Gunung	Kota	33,96
			Gajahmungkur	Permukiman	Bendan Duwur
	Banyumanik	Permukiman, pertanian	Jabungan	Kota	66,98
	Pedurungan	Permukiman	Tlogosari Wetan	Kota	30,26
Suburban	Mijen	Pertanian dan konservasi	Ngadirgo	Desa	50,80
	Gunungpati	Pertanian dan konservasi	Mangunsari	Desa	60,61
			Gunungpati	Kota	41,84
	Tugu	Industri, Pertanian	Mangkang Wetan	Kota	56,86
			Mangkang Kulon	Kota	50,06
			Randugarut	Kota	45,61
			Mangunharjo	Kota	43,88
	Genuk	Permukiman, industri	Terboyo Kulon	Kota	51,06
	Tembalang	Permukiman	Rowosari	Desa	54,13
			Sendangguwo	Kota	42,51
			Tandang	Kota	41,18
Ngaliyan	Pertanian, permukiman	Podorejo	Desa	36,79	

Sumber : Analisis Penyusun, 2009 dari Sulistyaniingsih, 2007 dan Profil Keluarga Miskin Kota Semarang, 2006

Kelima kelurahan tersebut memiliki karakteristik wilayah yang berbeda karena sudah terklasifikasi dalam pembagian wilayah di Kota Semarang berdasarkan tingkat harga lahan, kepadatan bangunan yang tinggi, dan dominasi penggunaan lahan (Sulistyaningsih, 2007). Selain itu, perbedaan lokasi pada kelima kelurahan akan memberikan karakteristik yang berbeda dari penduduk miskin yang tinggal pada wilayah-wilayah tersebut.



Sumber : Analisis Penyusun, 2009

GAMBAR 4.11
WILAYAH FOKUS PENELITIAN

BAB V ANALISIS KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA SEMARANG

Bab ini membahas mengenai karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan serta identifikasi kesesuaian respon kebijakan terhadap karakteristik kemiskinan di Kota Semarang. Namun sebelumnya, akan dijabarkan kembali mengenai karakteristik wilayah berdasarkan klasifikasi yang telah dijelaskan pada Bab IV.

5.1 Karakteristik Wilayah

Pada Bab IV telah dijelaskan mengenai penilaian klasifikasi wilayah di Kota Semarang yang dibagi dalam tiga wilayah yaitu pusat kota (CBD), tengah kota (zona transisi), pinggiran kota (*suburban*). Adapun perbedaan karakteristik masing-masing wilayah tersebut dapat dijelaskan pada Tabel V.1 di bawah ini :

**TABEL V.1
KARAKTERISTIK WILAYAH DI KOTA SEMARANG**

Perbedaan	Klasifikasi Wilayah		
	CBD	Zona Transisi	Suburban
Harga Lahan	Tinggi	Sedang-Tinggi	Rendah
Kepadatan Bangunan	Tinggi	Sedang-Tinggi	Rendah-Sedang
Penggunaan Lahan Dominan	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa, Permukiman	Pertanian, Permukiman, Konservasi
Infrastruktur	Lengkap	Cukup Lengkap	Tidak Lengkap

Sumber : Sulistyarningsih, 2007 dan Hasil Analisis Penyusun, 2009

Infrastruktur yang dimaksud di atas adalah ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan. Wilayah CBD dengan dominasi penggunaan lahan perdagangan dan jasa merupakan wilayah dengan kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan.

Sedangkan infrastruktur di wilayah pinggiran terutama pada wilayah dengan karakteristik pedesaan masih belum lengkap dan baik. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh kondisi jalan di Kelurahan Rowosari yang merupakan wilayah pinggiran Kota Semarang dengan status desa yang masih berlubang.

Berkaitan dengan sarana yang tersedia, wilayah CBD merupakan wilayah dengan kelengkapan sarana. Hal ini menyebabkan penduduknya lebih mudah dan cepat dalam mengakses pelayanan. Berbeda dengan wilayah pinggiran yang masih jarang sehingga penduduknya masih kesulitan mengakses pelayanan dengan cepat dan mudah.

Ekonomi di wilayah CBD cenderung berkembang lebih tinggi dan cepat daripada wilayah lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh dominansi penggunaan lahan yang merupakan perdagangan dan jasa.

Rata-rata kondisi ekonomi penduduk di masing-masing wilayah di Kota Semarang hampir sama. Hal ini ditunjukkan oleh keberagaman pekerjaan yang ditekuni oleh penduduknya. Heterogenitas pekerjaan tersebut mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh. Wilayah CBD merupakan wilayah dengan heterogenitas kondisi ekonomi lebih luas dan merata karena pada wilayah ini penduduk berusaha memanfaatkan peluang pekerjaan yang ada meskipun hanya sebagai pemulung atau tukang becak. Karena pada wilayah ini pekerjaan tersebut pun juga dibutuhkan. Sedangkan kondisi ekonomi pada wilayah pinggiran juga heterogen, namun tidak merata. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian penduduk di suatu wilayah yang memiliki pekerjaan sama terkait dengan karakteristik wilayah dan kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal mereka seperti yang bekerja sebagai petani di sebagian wilayah Kelurahan Mangunsari dan sebagai nelayan di Kelurahan Mangkang Wetan bagian utara.

Wilayah CBD merupakan wilayah tujuan para migran dari luar Kota Semarang yang ingin mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan penduduk yang tinggal pada wilayah ini lebih heterogen. Banyak penduduk yang bukan asli Kota Semarang yang tinggal pada wilayah ini. Sedangkan mayoritas penduduk pada zona transisi dan wilayah pinggiran merupakan penduduk asli wilayah tersebut.

5.2 Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kota Semarang

Penyebab kemiskinan terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Penyebab kemiskinan tersebut selanjutnya mempengaruhi karakteristik kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan penyebab kemiskinan yang diungkapkan oleh Bappenas (2004), Bank Dunia (2003) dan Baharoglu dan Kessides (2001) dapat dijabarkan dimensi kemiskinan yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengetahui karakteristik kemiskinan terdiri dari pendapatan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kemampuan. Satu dimensi kemiskinan sering menyebabkan atau berkontribusi pada dimensi lain. Karakteristik kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan mendeskripsikan data-data hasil kuesioner yang sesuai dengan variabel yang terkait yang kemudian dikaitkan dengan teori yang telah dijabarkan sebelumnya pada Bab II.

5.2.1 Karakteristik Kemiskinan di CBD

CBD merupakan wilayah dengan klasifikasi harga lahan tinggi, kepadatan bangunan tinggi, serta dominasi penggunaan lahan perdagangan dan jasa. Kemiskinan di wilayah CBD memberikan karakteristik tersendiri berdasarkan karakteristik penduduk miskin dan wilayahnya. Kelurahan Peterongan yang terletak di Kecamatan Semarang Selatan merupakan bagian dari CBD yang memiliki persentase keluarga miskin paling tinggi di antara kelurahan lainnya di wilayah CBD. Letaknya yang dekat dengan pusat Kota Semarang yaitu Kawasan Simpang Lima menyebabkan wilayah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang untuk bermukim dan bekerja di kelurahan ini.



Prasarana jalan yang cukup baik



Gang kecil yang padat permukiman

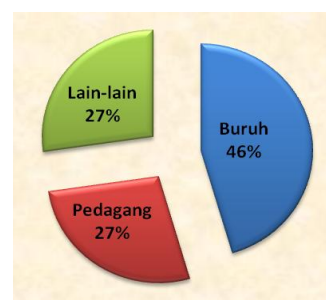
Sumber : Observasi Lapangan, 2009

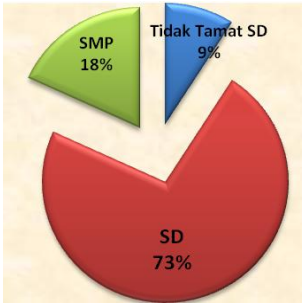
GAMBAR 5.1 LINGKUNGAN KELURAHAN PETERONGAN

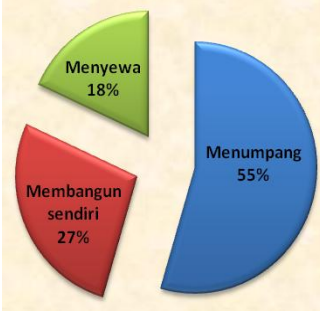
Karakteristik wilayah di Kelurahan Peterongan mempengaruhi karakteristik kemiskinan di wilayah ini yang dapat dijelaskan berdasarkan dimensi kemiskinan yang terdiri dari pendapatan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kemampuan.

TABEL V.2 ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI KELURAHAN PETERONGAN

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan
1	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Dimensi pendapatan berkaitan dengan pekerjaan penduduk miskin yang cenderung memiliki pendidikan dan keterampilan rendah. Penduduk miskin di Kelurahan Peterongan sebagian besar bekerja sebagai buruh bangunan (46%), pedagang yang biasanya ditekuni oleh kepala keluarga miskin wanita, dan pekerjaan lainnya (27%) seperti tukang becak dan sebagai pemulung. Sebagian besar dari mereka telah menekuni pekerjaan tersebut antara 5-10 tahun dengan pendapatan rata-rata per bulan yang masih di bawah Rp. 500.000,-. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan dengan imbalan yang kurang seimbang dan



No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan								
		<p data-bbox="699 264 1182 297">kurang kepastian akan keberlanjutannya.</p> <ul data-bbox="657 331 1066 701" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="657 331 1066 701">• Pekerjaan yang mereka tekuni dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah sehingga mereka tidak mampu terserap dalam sektor formal yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk miskin di Kelurahan Peterongan adalah sampai tingkat SD.  <table border="1" data-bbox="1083 353 1390 656"> <caption>Data from Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Education Level</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SD</td> <td>73%</td> </tr> <tr> <td>SMP</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Tamat SD</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Education Level	Percentage	SD	73%	SMP	18%	Tidak Tamat SD	9%
Education Level	Percentage									
SD	73%									
SMP	18%									
Tidak Tamat SD	9%									
2	Kesehatan	<ul data-bbox="657 745 1385 1417" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="657 745 1385 1010">• Sebagian besar penduduk miskin di Kelurahan Peterongan merupakan penduduk yang berasal dari luar wilayah ini seperti dari Kabupaten Demak, Purwodadi, dan lain-lain. Mereka mencoba mencari peruntungan di Kota Semarang meskipun hanya sebagai buruh bangunan, pedagang atau bahkan pemulung. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan di daerah mereka. <li data-bbox="657 1048 1385 1283">• Karakteristik kemiskinan yang paling terlihat berdasarkan dimensi kesehatan adalah sebagian besar dari keluarga miskin yang tinggal di lingkungan permukiman yang padat yang tidak sehat. Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa 1 rumah dengan ukuran kecil dapat ditinggali lebih dari 1 keluarga dan tidak dilengkapi oleh sarana sanitasi yang memadai. <li data-bbox="657 1321 1385 1417">• Selain itu, karena keterbatasan dana, keperluan air untuk minum/ memasak serta untuk mandi/cuci berumber dari air sumur dangkal. 								
3	Pendidikan	<ul data-bbox="657 1498 1385 1989" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="657 1498 1385 1762">• Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya antara dimensi yang satu dengan dimensi kemiskinan yang lain akan saling mempengaruhi. Penduduk miskin di Kelurahan Peterongan yang sebagian besar adalah pendatang memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena keterbatasan dana yang dimiliki. Hal tersebut mempengaruhi pekerjaan yang mereka tekuni dan penghasilan yang mereka peroleh. <li data-bbox="657 1800 1385 1989">• Penghasilan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu membiayai anggota keluarga lain untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi (SMA atau SMK). Hal ini menyebabkan anggota keluarga lain juga berhenti pada tingkat pendidikan yang tergolong rendah dan berlanjut menekuni pekerjaan seperti kepala 								

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan								
4	Keamanan	<p>keluarganya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi keamanan berkaitan dengan kepemilikan lahan penduduk miskin. Hal ini lebih dijelaskan oleh fenomena yang menggambarkan penduduk miskin yang tinggal pada tanah-tanah pemerintah dengan segala keterbatasan pelayanan seperti sanitasi dan air bersih serta lemahnya perlindungan dan security atas tanah dan bangunan yang mereka tinggali. • Penduduk miskin yang tinggal di Kelurahan Peterongan sebagian besar menumpang pada keluarga lain dan sebagian lagi mendirikan bangunan di atas tanah pemerintah. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak memiliki sertifikat tanah dan bangunan sebagai perlindungan terhadap aset mereka. Namun tidak sedikit dari mereka yang juga menyewa.  <table border="1"> <caption>Data from Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menumpang</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Membangun sendiri</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Menyewa</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	Menumpang	55%	Membangun sendiri	27%	Menyewa	18%
Kategori	Persentase									
Menumpang	55%									
Membangun sendiri	27%									
Menyewa	18%									
5	Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi kemiskinan ini berkaitan dengan kecenderungan kemampuan penduduk miskin yang lemah karena mereka tidak diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. • Seperti yang terjadi di Kelurahan Peterongan, penduduk miskin tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan di wilayahnya karena sebagian besar dari mereka yang datang dari luar wilayah. mereka hanya merupakan obyek pembangunan yaitu obyek penerima bantuan dari pemerintah lewat pemerintah Kelurahan. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk miskin di Kelurahan Peterongan masih lemah. 								

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009



Rumah keluarga miskin dengan tembok yang tidak dipleseter



Rumah keluarga miskin dengan dinding papan yang ditinggali beberapa keluarga



Rumah keluarga miskin dengan pekerjaan sebagai tukang becak



Rumah sempit pun tetap dijadikan tempat berdagang kecil-kecilan untuk menopang hidup

Sumber : Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 5.2 LINGKUNGAN RUMAH KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN PETERONGAN

5.2.2 Karakteristik Kemiskinan di Zona Transisi

Zona transisi atau wilayah tengah kota merupakan wilayah dengan klasifikasi harga lahan tinggi, kepadatan bangunan tinggi serta dominasi penggunaan lahan permukiman. Kelurahan Bongsari yang terletak di Kecamatan Semarang Barat merupakan bagian dari zona transisi yang memiliki persentase keluarga miskin paling tinggi di antara kelurahan lainnya di zona transisi. Adapun luas wilayah Kelurahan Bongsari sebesar 82,50 Ha dengan kepadatan penduduk 177 orang/Ha. Sebagian besar penduduk Kelurahan Bongsari bekerja sebagai buruh industri (3.649 orang), pedagang (1.614 orang), dan buruh bangunan (469

orang) dan sisanya sebagai karyawan, wiraswasta, dan PNS. Kelurahan Bongsari memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap dari tingkat TK sampai SMP. Selain itu juga dilengkapi oleh sebuah akademi dan Madrasah (Monografi Kelurahan Bongsari Tahun 2009). Karakteristik wilayah di Kelurahan Bongsari sebagai bagian dari zona transisi tidak sedikit berbeda dengan Kelurahan Peterongan yang berada di wilayah CBD karena keduanya merupakan wilayah perkotaan dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi. Hanya yang membedakan dominasi penggunaan lahan di Kelurahan Bongsari sebagian besar digunakan sebagai permukiman padat.



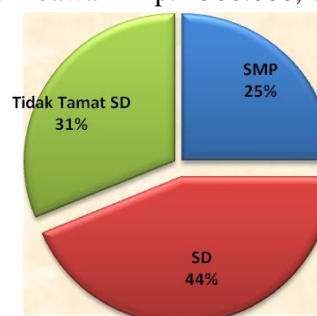
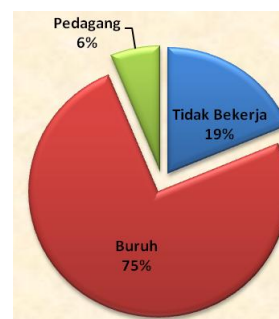
Sumber : Observasi Lapangan, 2009


GAMBAR 5.3
LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI KELURAHAN BONGSARI
YANG CENDERUNG PADAT

Adapun karakteristik wilayah di Kelurahan Bongsari mempengaruhi karakteristik kemiskinan di wilayah ini yang selanjutnya dijelaskan berdasarkan dimensi kemiskinan yang terdiri dari pendapatan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kemampuan, dimana pada dasarnya dimensi yang satu akan mempengaruhi munculnya dimensi lain.

TABEL V.3
ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN
DI KELURAHAN BONGSARI

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan
1	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dipengaruhi oleh berkaitan pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk miskin. Penduduk miskin di Kelurahan Peterongan sebagian besar bekerja sebagai buruh industri dan buruh bangunan (75%), pedagang yang biasanya ditekuni oleh kepala keluarga miskin wanita (6%), dan tidak sedikit dari mereka yang menganggur dan bekerja serabutan. • Sebagian besar dari mereka telah menekuni pekerjaan tersebut antara 5-10 tahun dengan pendapatan rata-rata per bulan yang masih di bawah Rp. 500.000,-. Kurangnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan dengan pendapatan yang sedikit dan tidak tetap. Sebagian besar kepala rumah tangga miskin di Kelurahan Bongsari memiliki tingkat pendidikan SD.
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Berbeda dengan Kelurahan Peterongan, sebagian besar penduduk miskin di Kelurahan Bongsari merupakan penduduk asli yang sudah tinggal di wilayah tersebut lebih dari 10 tahun. • Berdasarkan dimensi kesehatan sebagian besar dari keluarga miskin yang tinggal di lingkungan permukiman cukup padat. Namun berbeda dengan Kelurahan Peterongan, keluarga miskin di Kelurahan Bongsari telah tinggal pada rumah dengan kualitas hunian yang cukup layak dan dilengkapi oleh sarana sanitasi. Sedangkan akses terhadap air bersih sebagian besar penduduk masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih bagi mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan mengakses air bersih dari PDAM.



No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan								
3	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar keluarga miskin di Kelurahan Bongsari tidak mampu mengakses sarana pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi (SMA atau SMK dan seterusnya). Hal ini disebabkan oleh penghasilan rendah orang tua mereka sehingga pada akhirnya sebagian besar dari mereka sekolah hanya sampai jenjang pendidikan SMP dan kemudian bekerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga mereka. 								
4	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Penduduk miskin yang tinggal di Kelurahan Bongsari sebagian besar menumpang pada orang tua dan sebagian lagi mengontrak atau menyewa. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mendirikan bangunan tempat tinggal sendiri tanpa dilengkapi sertifikat tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga miskin di Kelurahan Bongsari masih lemah terhadap kepemilikan aset terutama bangunan rumah dan tanah karena sebagian besar dari mereka yang menumpang atau tinggal bersama orang tua dan menyewa.  <table border="1" data-bbox="1034 638 1378 976"> <caption>Data from Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Membangun sendiri</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>Menumpang orang tua</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Menyewa</td> <td>19%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	Membangun sendiri	31%	Menumpang orang tua	50%	Menyewa	19%
Kategori	Persentase									
Membangun sendiri	31%									
Menumpang orang tua	50%									
Menyewa	19%									
5	Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> Dimensi kemiskinan ini berkaitan dengan kecenderungan kemampuan penduduk miskin yang lemah karena mereka tidak diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Peterongan, sebagian besar penduduk miskin tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan di wilayahnya karena sebagian besar dari mereka dianggap tidak berkompeten (kurang pandai) dan kaum pasif. Namun ada juga yang diikutsertakan dalam kegiatan rutin RT seperti gotong royong. Lemahnya partisipasi masyarakat miskin ini menyebabkan mereka dianggap sebagai obyek pembangunan yang hanya menerima bantuan dari pemerintah. 								

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009



Sumber : Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 5.4
KONDISI RUMAH KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN BONGSARI

5.2.3 Karakteristik Kemiskinan di Wilayah Pinggiran

Wilayah pinggiran (*suburban*) merupakan wilayah dengan klasifikasi harga lahan sedang dan rendah, kepadatan bangunan tinggi, serta dominasi penggunaan lahan permukiman, industri, pertanian, dan konservasi. Wilayah pinggiran di Kota Semarang dapat dibagi dalam dua karakteristik yaitu wilayah pinggiran kota dan wilayah pinggiran yang masih berkarakteristik pedesaan dengan dominasi lahan pertanian dan konservasi. Wilayah pinggiran kota dengan dominasi lahan permukiman dan industri sebagian besar berada di Kota Semarang bagian utara, sedangkan wilayah pinggiran yang masih bersifat pedesaan terdapat di Kota Semarang bagian selatan dimana masih banyak terdapat areal persawahan dan konservasi. Adapun pembahasan mengenai karakteristik kemiskinan di wilayah pinggiran akan dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristik wilayah pinggiran.

5.2.3.1 Wilayah Pinggiran dengan Status Kota

Kelurahan Mangkang Wetan yang terletak di Kecamatan Tugu merupakan bagian dari wilayah pinggiran kota yang memiliki persentase keluarga miskin paling tinggi di antara kelurahan lainnya di wilayah pinggiran atau *sub urban*. Lokasinya yang terletak di Semarang bagian utara memberikan karakteristik tersendiri bagi wilayahnya dimana terdapat penggunaan lahan tambak. Hal ini selanjutnya mempengaruhi pekerjaan penduduk di wilayah ini.



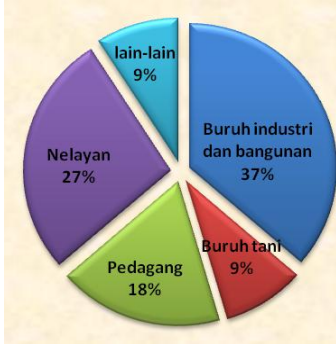
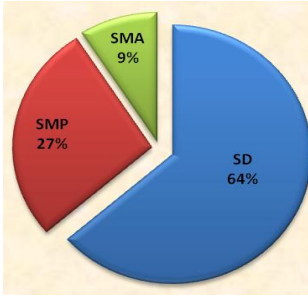
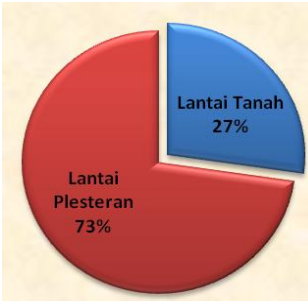
Sumber : Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 5.5
AREAL TAMBAK DI KELURAHAN MANGKANG WETAN
BAGIAN UTARA YANG MULAI RUSAK

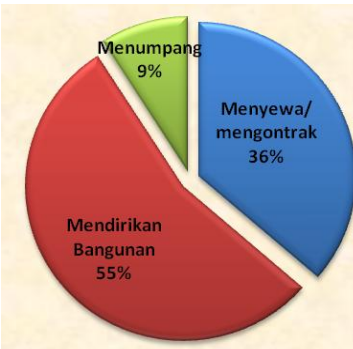
Adapun luas wilayah Kelurahan Mangkang Wetan sebesar 346,510 Ha. Sebagian besar penduduk Kelurahan Mangkang Wetan bekerja sebagai buruh bangunan dan industri (967 orang), pedagang (467 orang) dan buruh tani (907 orang) dan sisanya sebagai nelayan (92 orang), wiraswasta, PNS dan lain-lain. Kelurahan Mangkang Wetan memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap dari tingkat TK sampai SMA. Selain itu juga dilengkapi oleh pondok pesantren dan madrasah (Monografi Kelurahan Mangkang Wetan Tahun 2009).

Adapun karakteristik kemiskinan di Kelurahan Mangkang Wetan dijelaskan pada Tabel V.4 di bawah ini

TABEL V.4
ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN
DI KELURAHAN MANGKANG WETAN

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan
1	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk miskin di Kelurahan Mangkang Wetan lebih bervariasi dibanding dua kelurahan sebelumnya. Sebagian besar bekerja sebagai buruh industri dan buruh bangunan, pedagang, nelayan dan buruh tani. Ada juga dari mereka yang bekerja sebagai tukang batu dan tukang becak.  <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar dari mereka telah menekuni pekerjaan tersebut lebih dari 10 tahun berbeda dengan kedua kelurahan sebelumnya dimana sebagian besar keluarga miskin menekuni pekerjaan terakhir mereka selama 5-10 tahun. Pendapatan yang mereka peroleh pun cenderung lebih banyak yaitu antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- per bulan. Namun tidak sedikit dari mereka yang juga mendapatkan penghasilan di bawah Rp. 500.000,- yaitu bagi mereka yang bekerja sebagai pedagang dan nelayan. <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan pendapatan yang sedikit dan tidak tetap. Sebagian besar kepala rumah tangga miskin di Kelurahan Mangkang Wetan memiliki tingkat pendidikan SD. 
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Berbeda dengan Kelurahan Peterongan, sebagian besar penduduk miskin di Kelurahan Mangkang Wetan merupakan penduduk asli yang sudah tinggal di wilayah tersebut lebih dari 10 tahun. <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan dimensi kesehatan sebagian besar dari keluarga miskin yang tinggal di lingkungan 

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan
		<p>permukiman yang tidak padat dengan kualitas rumah yang belum layak huni. Hal ini selanjutnya dijelaskan bahwa sebagian dari rumah keluarga miskin berlantai tanah dengan dinding papan yang belum dilengkapi oleh sarana sanitasi yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan akses terhadap air bersih sebagian besar penduduk masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih bagi mereka.
3	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berbeda dengan dua kelurahan sebelumnya, sebagian besar anggota keluarga miskin yang lain di Kelurahan Mangkang Wetan tidak mampu mengakses sarana pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi (SMA atau SMK dan seterusnya). Hal ini disebabkan oleh rendahnya penghasilan yang diterima oleh orang tua mereka dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti kebutuhan pangan dan membayar sewa rumah. Sehingga ada kecenderungan kemiskinan yang berkelanjutan dari orang tua ke anaknya. Jenjang pendidikan yang dapat diakses sebagian besar hanya sampai jenjang pendidikan SMP dan selanjutnya bekerja sebagai buruh bangunan atau pedagang untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga mereka. • Fenomena kemiskinan yang berkelanjutan terutama terjadi di Kelurahan Mangkang Wetan bagian selatan. Hal ini sedikit berbeda dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi di bagian utara kelurahan dimana dahulunya sebagian penduduk bagian utara merupakan orang kaya yang memiliki tambak dengan hasil yang melimpah. Kekayaan tersebut menyebabkan mereka enggan menempuh pendidikan yang lebih tinggi karena bagi mereka tanpa pendidikan yang tinggi mereka sudah mampu mendapatkan uang berlimpah. Pada akhirnya, anak-anak mereka pun mengikuti jejak kepala keluarga dimana bergantung pada tambak yang mereka miliki dan tidak menempuh pendidikan tinggi. Namun, seiring perkembangan pola tanam yang buruk dan kondisi lingkungan yang semakin rusak menyebabkan tambak yang mereka miliki menjadi rusak dan tidak menghasilkan lagi sehingga pada akhirnya mereka terpaksa menjual dengan harga yang murah. Pada akhirnya mereka menjadi miskin karena kehilangan aset dan tidak memiliki pendidikan lebih untuk memperoleh pekerjaan lain yang menjanjikan. Namun sebenarnya mereka memiliki keterampilan lain seperti budidaya hasil tambak yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Namun, karena keterbatasan modal, hal tersebut tidak dapat terealisasi.

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan
4	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Penduduk miskin yang tinggal di Kelurahan Mangkang Wetan sebagian besar mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik pihak lain tanpa dilengkapi sertifikat tanah dan bangunan dan sebagian lagi mengontrak atau menyewa. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga miskin di Kelurahan Mangkang Wetan masih lemah terhadap kepemilikan aset terutama bangunan rumah dan tanah sehingga mereka pun tidak aman untuk menjadikan tempat tinggalnya sebagai faktor produksi yang menghasilkan bagi mereka. 
5	Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> Seperti yang terjadi di Kelurahan Peterongan, sebagian besar penduduk miskin di Kelurahan Mangkang Wetan tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan di wilayahnya. Mereka hanya sebagai obyek pembangunan yang hanya menerima bantuan dari pemerintah.

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009



Kondisi rumah yang masih berlantai tanah dan berdinding papan kayu



Kondisi lingkungan yang tidak sehat

Sumber : Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 5.6
LINGKUNGAN PERMUKIMAN KELUARGA MISKIN
DI KELURAHAN MANGKANG WETAN

5.2.3.2 Wilayah Pinggiran dengan Status Desa

Wilayah pinggiran dengan status desa merupakan *suburban* Kota Semarang yang masih memiliki karakteristik pedesaan yang terlihat dari keberadaan areal pertanian dan hutan konservasi yang cukup luas. Wilayah ini terutama terdapat di Kota Semarang bagian selatan.

Kelurahan Rowosari yang terdapat di Kecamatan Tembalang dan Kelurahan Mangunsari yang terdapat di Kecamatan Gunungpati merupakan bagian dari wilayah pinggiran kota yang memiliki persentase keluarga miskin paling tinggi di antara kelurahan lainnya di wilayah pinggiran atau suburban. Lokasinya yang terletak di Semarang bagian selatan memberikan karakteristik tersendiri bagi wilayahnya dimana terdapat dominasi penggunaan pertanian.

Kelurahan Rowosari dengan persentase keluarga miskin sebesar 54,13% merupakan kelurahan yang terletak di ujung tenggara Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak. Letaknya yang sangat jauh dari pusat kota Semarang menyebabkan karakteristik wilayah ini masih sangat tertinggal. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan lahan permukiman dengan kepadatan bangunan rendah, lahan pertanian kering, dan akses prasarana jalan yang kurang mendukung.



Areal persawahan yang masih luas



Prasarana jalan yang kurang baik

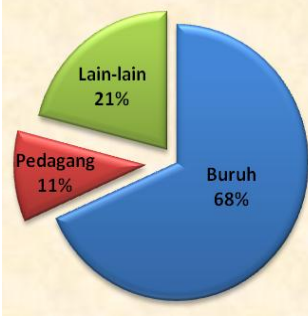
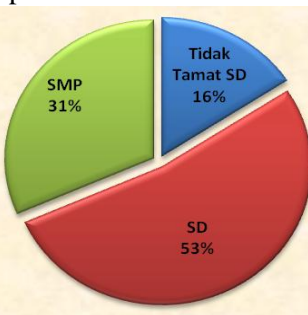
Sumber : Observasi Lapangan, 2009

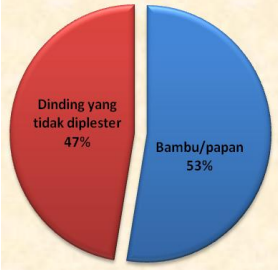
GAMBAR 5.7
KONDISI WILAYAH KELURAHAN ROWOSARI


Adapun luas wilayah Kelurahan Rowosari sebesar 125, 130 km². Sebagian besar penduduk Kelurahan Rowosari bekerja sebagai buruh bangunan dan industri (1.269 orang), pedagang (1.076 orang), tukang batu (916 orang), tukang kayu (389 orang), dan sisanya sebagai penjahit, supir, dan pegawai negeri. Kelurahan Rowosari memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap dari tingkat TK yang berjumlah 3 sampai tingkat SMA berjumlah 1 unit. Namun demikian, sebagian besar penduduk Kelurahan Rowosari hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SD. Tidak sedikit dari mereka yang juga buta huruf dan tidak tamat SD (Monografi Kelurahan Rowosari Tahun 2009).

Adapun karakteristik kemiskinan di Kelurahan Rowosari dijelaskan pada Tabel V.5 di bawah ini

TABEL V.5
ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN
DI KELURAHAN ROWOSARI

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan
1	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk miskin di Kelurahan Rowosari Sebagian besar bekerja sebagai buruh industri dan buruh bangunan, dan buruh tani (68%) dan sisanya sebagai pedagang dan lain-lain seperti tukang kayu dan tukang batu. Di antara mereka ada juga yang bekerja serabutan. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian di wilayah mereka yang kering ketika musim kemarau sehingga mereka tidak bekerja dan menganggur. Jika tidak menganggur, mereka melakukan pekerjaan lain secara tidak tetap. • Sebagian besar dari mereka telah menekuni pekerjaan tersebut lebih dari 10 tahun. Sebagian besar dari mereka memperoleh penghasilan di bawah Rp. 500.000,- . hal ini juga disebabkan oleh pekerjaan serabutan yang terpaksa mereka tekuni sehingga tidak dapat memberikan imbalan yang cukup. • Kurangnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan pendapatan yang tidak tetap. Sebagian besar kepala rumah tangga miskin di Rowosari memiliki <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan						
		tingkat pendidikan SD dan SMP.						
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sama halnya dengan Kelurahan Mangkang Wetan, sebagian besar penduduk miskin di Kelurahan Rowosari merupakan penduduk asli yang sudah tinggal di wilayah tersebut lebih dari 10 tahun. • Berdasarkan dimensi kesehatan, sebagian besar dari keluarga miskin di Kelurahan Rowosari tinggal di lingkungan permukiman yang tidak padat dengan kualitas rumah yang belum layak huni. Hal ini salah satunya dapat digambarkan oleh fisik bangunan rumah dimana sebagian rumah keluarga miskin masih berlantai tanah dan ber dinding papan atau bambu. Selain itu, belum dilengkapi oleh sarana sanitasi yang memadai. • Sedangkan akses terhadap air bersih sebagian besar penduduk masih menggunakan mata air, sumur sebagai sumber air bersih bagi mereka. Namun ada juga yang membeli air bersih karena tidak memiliki sumur.  <table border="1" data-bbox="1109 481 1388 750"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dinding yang tidak diplesir</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>Bambu/papan</td> <td>53%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Persentase	Dinding yang tidak diplesir	47%	Bambu/papan	53%
Kategori	Persentase							
Dinding yang tidak diplesir	47%							
Bambu/papan	53%							
3	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berbeda dengan tiga kelurahan sebelumnya, sebagian besar anggota keluarga miskin yang lain di Kelurahan Rowosari tidak mampu mengakses sarana pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penghasilan yang diterima oleh orang tua mereka. • Sehingga ada kecenderungan kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Rowosari bersifat berkelanjutan dari orang tua ke anaknya. Jenjang pendidikan yang dapat diakses sebagian besar penduduk miskin hanya sampai jenjang pendidikan SMP dan selanjutnya mereka bekerja dengan profesi yang sama dengan orang tuanya. Ada juga dari mereka yang menganggur karena tidak ada lapangan kerja yang mampu menyerap mereka. Sekalipun ada, lokasinya jauh dari Kelurahan Rowosari sehingga membutuhkan biaya lebih. 						

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan
4	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Penduduk miskin yang tinggal di Kelurahan Rowosari sebagian besar mendirikan bangunan rumah di atas tanah miliknya sendiri dengan dilengkapi sertifikat tanah dan bangunan dan sebagian lagi mengontrak atau menyewa, menumpang dan merupakan bangunan peninggalan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga miskin di Kelurahan Rowosari sebenarnya tidak lemah terhadap kepemilikan aset terutama bangunan rumah dan tanah. 
5	Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> Karena karakteristiknya yang masih pedesaan mempengaruhi budaya kekeluargaan di lingkungan Kelurahan Rowosari. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh adanya keterlibatan penduduk miskin dalam pertemuan rutin di masing-masing RT di Kelurahan Rowosari. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di wilayah ini juga berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan mereka dan mereka tidak hanya sebagai obyek pembangunan penerima bantuan pemerintah.

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009



Sumber : Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 5.8
KONDISI RUMAH KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN ROWOSARI

Selain Kelurahan Rowosari, Kelurahan Mangunsari juga merupakan wilayah pinggiran Kota Semarang yang terletak di Kecamatan Gunungpati yang

masih memiliki karakteristik pedesaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih luasnya areal persawahan dan hutan konservasi karena letaknya dengan pada dataran tinggi Kota Semarang. Sebagian besar sawah yang terdapat di Kelurahan Mangunsari merupakan sawah irigasi setengah teknis, dan sisanya merupakan sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan. Selain itu, areal tegalan atau kebun juga masih terbentang di wilayah ini.


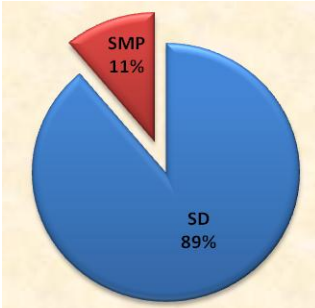



Sumber : Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 5.9 AREAL PERTANIAN DI KELURAHAN MANGUNSARI

Sebagian besar penduduk Kelurahan Mangunsari bekerja sebagai petani yang terdiri dari petani pemilik tanah (400 orang), petani penggarap tanah (250 orang), dan buruh tani (250 orang). Selain itu, tidak sedikit penduduknya yang juga bekerja sebagai buruh industri, buruh bangunan, dan pedagang. Kelurahan Mangunsari hanya memiliki sarana pendidikan tingkat TK berjumlah 3 dan SD Negeri berjumlah 1 unit serta MI (Madsrasah Ibtidaiyah) berjumlah 1 unit. (Monografi Kelurahan Mangunsari Tahun 2009). Adapun karakteristik kemiskinan di Kelurahan Mangunsari dijelaskan pada Tabel V.6 di bawah ini

TABEL V.6
ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN
DI KELURAHAN MANGUNSARI

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan
1	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar penduduk miskin di Kelurahan Mangunsari bekerja sebagai buruh industri, buruh bangunan, dan buruh tani (68%) dan sisanya sebagai pedagang dan adapula yang tidak bekerja atau menganggur.  <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan tersebut telah mereka tekuni lebih dari 10 tahun dengan penghasilan di bawah Rp. 500.000,- . • Sebagian besar kepala rumah tangga miskin di Kelurahan Mangunsari hanya memiliki tingkat pendidikan SD. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa menekuni pekerjaan dengan imbalan kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. 
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sama halnya dengan Kelurahan Rowosari, sebagian besar penduduk miskin di Kelurahan Mangunsari merupakan penduduk asli yang sudah tinggal di wilayah tersebut lebih dari 10 tahun. Namun ada juga dari mereka yang melakukan migrasi dari wilayah Kabupaten Semarang dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibanding di wilayah asal mereka. • Berdasarkan dimensi kesehatan, sebagian besar dari keluarga miskin di Kelurahan Mangunsari tinggal di lingkungan permukiman dengan kualitas rumah yang belum layak huni karena fisik bangunan rumah yang terdiri dari lantai tanah dan dinding papan/bambu. Selain itu, belum dilengkapi oleh sarana sanitasi yang memadai. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak mempunyai biaya untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. • Sedangkan akses terhadap air bersih untuk minum/memasak berasal dari sumur sedangkan untuk keperluan mandi/cuci bersumber dari mata air.
3	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berbeda dengan empat kelurahan sebelumnya, sebagian besar anggota keluarga miskin yang lain di Kelurahan Mangunsari juga terbatas dalam mengakses

No	Dimensi Kemiskinan	Penjelasan
		sarana pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya.
4	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Penduduk miskin yang tinggal di Kelurahan Mangunsari sebagian besar mendirikan bangunan rumah di atas tanah miliknya sendiri dengan dilengkapi sertifikat tanah dan bangunan dan hanya sedikit dari mereka yang menumpang orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga miskin di Kelurahan Mangunsari tidak lemah terhadap penguasaan dan kepemilikan aset terutama bangunan rumah dan tanah. 
5	Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> Sama halnya dengan Kelurahan Rowosari dengan karakteristiknya yang masih pedesaan mempengaruhi budaya kekeluargaan di lingkungan Kelurahan Mangunsari. Hal ini ditunjukkan oleh adanya partisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan di lingkungan mereka yang diselenggarakan melalui pertemuan rutin di masing-masing RT.

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009



Sumber : Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 5.10
KONDISI RUMAH KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN MANGUNSARI

5.2.4 Kesimpulan Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kota Semarang

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan karakteristik kemiskinan di Kota Semarang pada Tabel V.7 di bawah ini :

TABEL V.7
GABUNGAN ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN
DI KOTA SEMARANG

KARAKTERISTIK	PENJELASAN	KETERANGAN	LOKASI				
			CBD	ZONA TRANSISI	SUBURBAN		
			PETERONGAN	BONGSARI	MANGKANG WETAN	ROWOSARI	MANGUNSARI
Pendapatan	Mata Pencaharian	Status pekerjaan utama Kepala Keluarga dengan penghasilan upah	V	V	V	V	V
	Tingkat Pendapatan	Pendapatan di bawah Rp. 500.000,- dan habis bahkan kurang untuk pengeluaran keluarga	V	V	V	V	V
	Tingkat Pendidikan	Tingkat partisipasi sekolah rendah dan tidak memiliki keterampilan lain	V	V	V	V	V
Kesehatan	Akses terhadap pelayanan perumahan dan sanitasi	Jenis lantai rumah tanah dan berinding papan/kayu	V	-	V	V	V
		Tidak memiliki sarana sanitasi	V	-	V	V	V
	Akses terhadap air bersih	Sumber air bersih tidak berasal dari PAM/ Sumur dalam (artesis)	V	-	-	V	V
Pendidikan	Akses terhadap pendidikan	Kesulitan dalam mendapatkan pendidikan dan keterampilan lain karena biaya	V	V	V	V	V

KARAKTERISTIK	PENJELASAN	KETERANGAN	LOKASI				
			CBD	ZONA TRANSISI	SUBURBAN		
			PETERONGAN	BONGSARI	MANGKANG WETAN	ROWOSARI	MANGUNSARI
Keamanan	Kepemilikan dan penguasaan tanah	Tinggal pada rumah dan bangunan yang bukan milik sendiri dan tanpa sertifikat tanah dan bangunan	V	V	V	-	-
Kemampuan	Partisipasi dalam mengambil keputusan	Tidak ada keterlibatan dalam kegiatan di wilayahnya	V	V	V	-	-

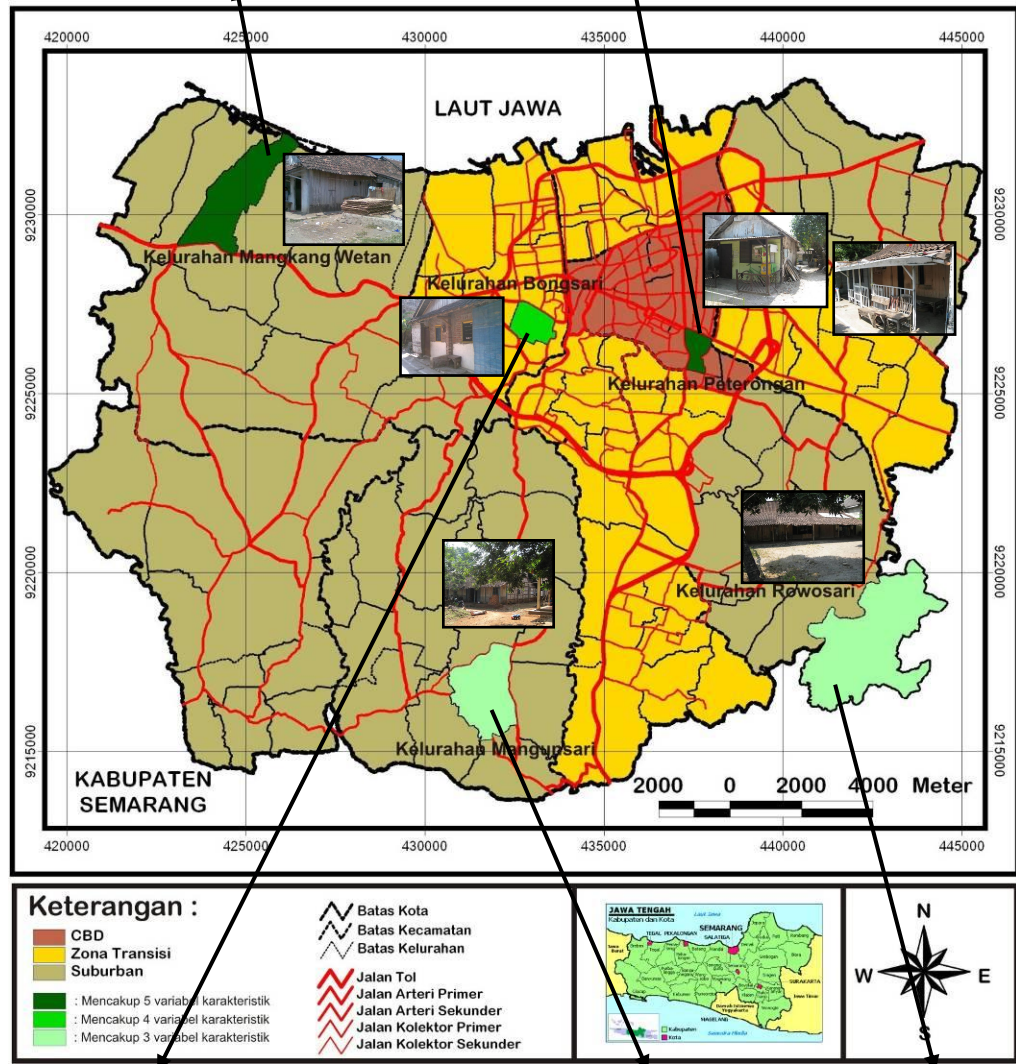
Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

V = memiliki karakteristik

- = tidak memiliki karakteristik

Karakteristik kemiskinan di kedua wilayah ini (wilayah CBD dan wilayah pinggiran dengan status kota) mencakup 5 variabel karakteristik : pendapatan, kesehatan, pendidikan, keamanan kemampuan. Kemiskinan yang terlihat di wilayah ini adalah lemahnya aset yang dimiliki, tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan serta tinggal pada lingkungan perumahan yang tidak sehat.



Karakteristik kemiskinan di zona transisi yang terlihat di Kelurahan Bong Sari mencakup 4 variabel karakteristik : pendapatan, pendidikan, keamanan dan kemampuan. Kemiskinan yang terlihat di wilayah ini adalah lemahnya aset yang dimiliki dan tingkat pendidikan rendah serta tidak memiliki keterampilan.

Karakteristik kemiskinan di wilayah pinggiran Kota Semarang yang masih memiliki karakteristik pedesaan yaitu Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Rowosari mencakup 3 variabel karakteristik : pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan yang terlihat di wilayah ini adalah lemahnya aset yang dimiliki terutama modal, tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan serta tinggal pada lingkungan perumahan yang tidak sehat dengan segala keterbatasan sarana pendukung.

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

GAMBAR 5.11
HASIL ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik kemiskinan pada suatu wilayah tidak selalu sama dengan karakteristik kemiskinan di wilayah lain. Meskipun secara garis besar karakteristik kemiskinan di Kota Semarang sama, namun perbedaan kondisi pada masing-masing wilayah di Kota Semarang mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan. Berikut penjelasan lebih lanjut:

TABEL V.8
KESIMPULAN ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN
DI KOTA SEMARANG

Karakteristik Kemiskinan		Wilayah			
		CBD	Zona Transisi	Suburban	
				Kota	Desa
Aset yang dimiliki lemah		Sangat Lemah	Sangat Lemah	Sangat Lemah	Lemah
	Modal	v	v	v	v
	Rumah	v	v	v	-
	Tanah	v	v	v	-
Tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
		v	v	v	v
Tinggal pada lingkungan perumahan yang tidak sehat dengan segala keterbatasan sarana pendukung		Tidak Sehat	-	Sangat Tidak Sehat	Sangat Tidak Sehat
		v	-	v	v

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

- v = memiliki karakteristik
- = tidak memiliki karakteristik

Aset dasar penduduk miskin di wilayah pinggiran (*suburban*) dengan status desa tidak selemah di wilayah lain karena sebagian besar penduduk miskin di wilayah ini telah memiliki keamanan terhadap kepemilikan tanah dan bangunan yang mereka tinggali. Sedangkan terkait dengan tingkat pendidikan dan keterampilan, penduduk miskin di masing-masing wilayah memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sebagian besar dari mereka hanya lulusan SD-SMP dan tidak sedikit dari mereka yang tidak tamat SD.

Kondisi lingkungan perumahan di wilayah pinggiran paling tidak sehat di antara wilayah lain karena kondisi bangunan yang tidak sehat serta tidak dilengkapi oleh sarana sanitasi dan air bersih. Perbedaannya dengan wilayah CBD, lingkungan tidak sehat ditunjukkan oleh sebagian besar dari keluarga miskin yang tinggal di lingkungan permukiman yang padat. Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa 1 rumah dengan ukuran kecil dapat ditinggali lebih dari 1 keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah CBD yang kepadatan bangunannya tinggi. Sedangkan di zona transisi, karakteristik lingkungan perumahan yang tidak sehat tidak terlalu terlihat karena sebagian besar dari keluarga miskin di Kelurahan Bongsari telah tinggal pada rumah dengan kualitas hunian yang cukup layak dan dilengkapi oleh sarana sanitasi. Karakteristik pedesaan pada wilayah pinggiran mempengaruhi kondisi lingkungan perumahan penduduk miskin dimana banyak penduduk miskin yang masih tinggal dalam bangunan rumah dengan dinding bambu dan berlantai tanah tanpa sarana sanitasi.

5.3 Analisis Respon Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kemiskinan di Kota Semarang

Respon kebijakan pemerintah merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Adapun program penanggulangan tersebut terkait dengan strategi anti-kemiskinan. Sifat multi dimensi kemiskinan menyebabkan berkembangnya berbagai strategi anti-kemiskinan. Analisis ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data-data hasil telaah dokumen yang sesuai dengan variabel yang terkait. Adapun kebijakan yang dianalisis terdiri dari program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan di lima kelurahan.

5.3.1 Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di CBD

Analisis respon kebijakan penanganan kemiskinan di CBD merupakan program-program yang telah dilaksanakan di Kelurahan Peterongan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah ini. Adapun program-program

penanggulangan tersebut dapat diklasifikasikan menurut variabel analisis respon kebijakan yang telah ditetapkan pada Bab II.

TABEL V.9
ANALISIS RESPON KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN
DI KELURAHAN PETERONGAN

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
1	Bantuan	<p>Program pengentasan kemiskinan yang termasuk dalam pemberian bantuan berkaitan dengan bantuan langsung yang diberikan. Adapun bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah di Kelurahan Peterongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan jumlah penerima sebanyak 659 KK pada tahun 2009. BLT ini merupakan bantuan langsung berupa uang tunai yang diberikan kepada masing-masing keluarga miskin dari pemerintah pusat melalui pemerintah kelurahan. • Raskin (Beras Miskin) dengan jumlah penerima sebanyak 395 KK. Bantuan ini merupakan bantuan pangan yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin. <p>Adapun karakteristik dari bantuan langsung ini adalah membantu kesulitan pangan dan kekurangan pendapatan yang merupakan karakteristik kemiskinan pada umumnya.</p>
2	Pelayanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pelayanan sosial bagi masyarakat dilakukan untuk menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan perkotaan. Model bantuan yang diberikan lebih bersifat menyediakan pelayanan sosial untuk menangani kemiskinan yang juga disebabkan keterbatasan layanan dasar. Adapun pelayanan sosial yang diberikan bagi keluarga miskin di Kelurahan Peterongan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prasarana lingkungan yang terdiri dari normalisasi saluran dan pembuatan tandon air. Sedangkan kegiatan lain yang sedang dilaksanakan adalah pemavingan jalan, rehab 3 unit rumah, dan penyediaan air bersih 2. Peningkatan partisipasi sekolah yang terlihat dari adanya bantuan beasiswa untuk 78 anak SD dengan alokasi bantuan sebesar @ Rp. 100.000,- <p>Adapun kedua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BKM Pasigoro yang merupakan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Peterongan yang pendanaannya berasal dari program PNPM</p>

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
		<p>Mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan sosial lain yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Kota untuk keluarga miskin adalah Jamkesmas yaitu Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga miskin mendapatkan perlindungan kesehatan sehingga dapat meringankan biaya berobat. Adapun jumlah penerima Jamkesmas di Kelurahan Peterongan sebanyak 2839 jiwa.
3	Pemberdayaan	<p>Pemberdayaan penduduk miskin yaitu kegiatan untuk menjadikan penduduk miskin menjadi mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan peningkatan keterampilan penduduk miskin. Namun dalam perkembangannya, bentuk pemberdayaan penduduk miskin belum dilakukan di Kelurahan Peterongan.</p>
4	Aset Dasar	<p>Peningkatan aset dasar penduduk miskin yang terdiri dari modal, rumah dan tanah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses terhadap faktor produksi. Adapun kegiatan peningkatan aset dasar di Kelurahan Peterongan dilaksanakan melalui BKM Pasigoro yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman bergulir yang diberikan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Peterongan yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan maksimal pinjaman per-orang Rp. 1.000.000,- dan suku bunga pinjaman sebesar 1,5%. Dana yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2007 sejumlah Rp. 507.500.000,- digulirkan kepada 82 KSM dengan anggota sebanyak 597 orang.
5	Pasar	<p>Penciptaan pasar bagi keluarga miskin untuk memastikan bahwa ekonomi menghasilkan peluang bagi rumah tangga miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan-pekerjaan mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan promosi usaha kecil yang berjalan atau bekerja sama dengan LSM atau perusahaan tertentu. Namun, kegiatan tersebut ternyata belum dilakukan di Kelurahan Peterongan.</p>
6	Tata kelola pemerintahan	<p>Tata pemerintahan terkait dengan intervensi langsung dalam penyediaan informasi, fasilitasi partisipatif masyarakat miskin. Kegiatan yang terlihat di Kelurahan Peterongan hanya bersifat pemberian informasi bantuan yang akan diterima oleh masyarakat miskin.</p>

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Adapun program-program tersebut merupakan respon terhadap kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang. Berdasarkan program dan karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Peterongan dapat distrukturkan dalam Tabel V.10 di bawah ini:

TABEL V.10
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN TERHADAP
KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI KELURAHAN PETERONGAN

Program Penanganan Kemiskinan	Karakteristik Kemiskinan		
	Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
	X	X	X
BLT	v	v	v
Raskin (Beras Miskin)	v		
Peningkatan prasarana lingkungan			v
Bantuan beasiswa		v	
Jaminan kesehatan	v		
Pinjaman bergulir	v		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

X = Terdapat karakteristik kemiskinan

v = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan

5.3.2 Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Zona Transisi

Analisis respon kebijakan penanganan kemiskinan di zona transisi merupakan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Bongsari dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah dengan persentase keluarga miskin tertinggi di zona transisi. Adapun program-program penanggulangan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Tabel V.11 di bawah ini:

TABEL V.11
ANALISIS RESPON KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN
DI KELURAHAN BONGSARI

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
1	Bantuan	<p>Bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah di Kelurahan Bongsari sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan di wilayah ini tidak berbeda dengan bantuan langsung di wilayah lain. Hal tersebut terjadi karena program bantuan langsung yang diberikan merupakan program nasional. Adapun bantuan langsung tersebut yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan jumlah penerima sebanyak 1014 KK pada tahun 2009. BLT ini merupakan bantuan langsung berupa uang tunai yang diberikan kepada masing-masing keluarga miskin. • Raskin (Beras Miskin) dengan jumlah penerima sebanyak 852 KK. Bantuan ini merupakan bantuan pangan pokok yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin. <p>Adapun karakteristik dari bantuan langsung ini adalah mengatasi kemiskinan dari segi pendapatan.</p>
2	Pelayanan sosial	<p>Pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Kota untuk jaminan kesehatan keluarga miskin di Kelurahan Bongsari yaitu Jamkesmas yaitu Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Adapun jumlah penerima Jamkesmas di Kelurahan Bongsari sebanyak 6762 jiwa.</p>
3	Pemberdayaan	<p>Bentuk pemberdayaan penduduk miskin yang pernah dilakukan di Kelurahan Bongsari adalah pelatihan menjahit yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2007. Hanya beberapa penduduk miskin yang dikirim untuk mengikuti pelatihan tersebut. Namun dalam perkembangannya, pemberdayaan tersebut tidak mampu berlanjut dan menangani kemiskinan karena penduduk tersebut hanya mengikuti pelatihan dan tidak menggunakan keterampilan yang sudah dipelajari karena keterbatasan modal untuk memiliki peralatan menjahit.</p>
4	Aset Dasar	<p>Peningkatan aset dasar penduduk miskin yang salah satunya terdiri dari modal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses terhadap faktor produksi. Adapun kegiatan peningkatan aset dasar di Kelurahan Bongsari dilaksanakan melalui BKM Amanah yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman bergulir yang diberikan kepada seluruh

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
		masyarakat Kelurahan Peterongan yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan maksimal pinjaman per-orang Rp. 1.000.000,- dan suku bunga pinjaman sebesar 1,5%. <ul style="list-style-type: none"> • Kebanyakan dari pinjaman tersebut digunakan untuk berjualan.
5	Pasar	Kegiatan penyediaan pasar yang salah satunya terlihat dari penyediaan kesempatan kerja belum dilakukan di Kelurahan Bongsari.
6	Tata kelola pemerintahan	Kegiatan yang terlihat di Kelurahan Bongsari sama dengan yang terjadi di Kelurahan Peterongan dimana penduduk miskin hanya sebagai obyek pembangunan penerima bantuan.

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Adapun program-program tersebut merupakan respon terhadap kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang terutama di zona transisi. Berdasarkan program dan karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Bongsari dapat distrukturkan dalam Tabel V.12 di bawah ini:

TABEL V.12
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN TERHADAP
KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI KELURAHAN BONGSARI

Program Penanganan Kemiskinan	Karakteristik Kemiskinan		
	Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
	X	X	-
BLT	v	v	
Raskin (Beras Miskin)	v		
Jaminan kesehatan	v		
Pinjaman bergulir	v		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

X = Terdapat karakteristik kemiskinan

v = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan

5.3.3 Respon Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Wilayah Pinggiran

Analisis respon kebijakan penanganan kemiskinan di wilayah pinggiran Kota Semarang dibagi menjadi dua karena perbedaan karakteristik wilayah pinggiran Kota Semarang akan mempengaruhi strategi anti-kemiskinan yang dilakukan.

5.3.3.1 Wilayah Pinggiran dengan Status Kota

Kelurahan Mangkang Wetan merupakan wilayah pinggiran Kota Semarang yang terletak di sebelah utara. Lokasinya yang berbatasan dengan laut mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan di Kelurahan Mangkang Wetan lebih lanjut pada Tabel V.13 di bawah ini:

TABEL V.13
ANALISIS RESPON KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN
DI KELURAHAN MANGKANG WETAN

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
1	Bantuan	<p>Bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah di Kelurahan Mangkang Wetan tidak berbeda dengan bantuan langsung di wilayah lain. Hal tersebut terjadi karena program bantuan langsung yang diberikan merupakan program nasional. Adapun bantuan langsung tersebut yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan jumlah penerima sebanyak 773 KK pada tahun 2009. • Raskin (Beras Miskin) yang merupakan bantuan pangan pokok yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin. <p>Bentuk bantuan langsung ini merupakan bentuk penanggulangan kemiskinan yang diberikan untuk mengatasi masalah kemiskinan secara langsung yaitu membantu pendapatan dan kekurangan pangan pokok yang biasanya dialami oleh penduduk miskin.</p>
2	Pelayanan sosial	<p>Sama halnya dengan dua kelurahan sebelumnya, pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Kota untuk jaminan kesehatan keluarga miskin di Kelurahan Mangkang Wetan yaitu Jamkesmas yaitu Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini</p>

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
		dilakukan untuk meringankan biaya berobat penduduk miskin. Adapun jumlah penerima Jamkesmas di Kelurahan Mangkang Wetan sebanyak 2070 jiwa.
3	Pemberdayaan	Bentuk pemberdayaan penduduk miskin yang pernah dilakukan di Kelurahan Mangkang Wetan yaitu pelatihan menjahit yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang. Pemberdayaan ini diikuti oleh pemberian mesin jahit sebanyak 4 unit dan mesin obras sebanyak 1 unit.
4	Aset Dasar	<p>Peningkatan aset dasar penduduk miskin yang dilakukan di Kelurahan Mangkang Wetan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pinjaman bagi nelayan dan petani tambak yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. • Bantuan bibit ikan bagi para nelayan <p>Peningkatan aset dasar tersebut merupakan bentuk peningkatan faktor produksi untuk keberlanjutan peluang ekonomi bagi penduduk miskin di Kelurahan Mangkang Wetan.</p>
5	Pasar	Kegiatan penyediaan kesempatan kerja belum dilakukan di Kelurahan Mangkang Wetan.
6	Tata kelola pemerintahan	Kegiatan yang terlihat di Kelurahan Mangkang Wetan sama dengan yang terjadi di Kelurahan Peterongan dimana penduduk miskin hanya sebagai obyek pembangunan penerima bantuan.

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Adapun program-program tersebut merupakan respon terhadap kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Mangkang Wetan. Berdasarkan program dan karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Mangkang Wetan dapat distrukturkan dalam Tabel V.14 di bawah ini :

TABEL V.14
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN TERHADAP
KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI KELURAHAN MANGKANG WETAN

Program Penanganan Kemiskinan	Karakteristik Kemiskinan		
	Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
	X	X	X
BLT	v	v	v
Raskin (Beras Miskin)	v		
Jaminan kesehatan	v		
Pelatihan menjahit		v	
Pinjaman untuk nelayan	v		
Bantuan bibit ikan	v		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

X = Terdapat karakteristik kemiskinan

v = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan

5.3.3.2 Wilayah Pinggiran dengan Status Desa

Kelurahan Rowosari dan Mangunsari merupakan dua kelurahan yang terletak di pinggiran Kota Semarang yang masih memiliki karakteristik pedesaan. Kelurahan Rowosari terletak di Kecamatan Tembalang dan jauh dari pusat Kota Semarang. Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan di Kelurahan Rowosari lebih lanjut pada Tabel V.15 di bawah ini:

TABEL V.15
ANALISIS RESPON KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN
DI KELURAHAN ROWOSARI

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
1	Bantuan	<p>Rowosari sebagai salah satu kelurahan miskin yang terletak di ujung Kota Semarang juga menerima bantuan langsung dari pemerintah. Adapun bantuan langsung tersebut yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan jumlah penerima sebanyak 1205 KK pada tahun 2009. • Raskin (Beras Miskin) yang merupakan bantuan pangan pokok yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin.

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
		Bentuk bantuan langsung ini merupakan bentuk penanggulangan kemiskinan yang diberikan untuk mengatasi masalah kemiskinan secara langsung yaitu membantu pendapatan dan kekurangan pangan pokok yang biasanya dialami oleh penduduk miskin.
2	Pelayanan sosial	Pelayanan sosial merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang juga melihat kemiskinan dari segi non-pendapatan. Seperti halnya dengan kelurahan-kelurahan sebelumnya, Kelurahan Rowosari pun mendapatkan bantuan perlindungan kesehatan yang berupa Jamkesmas yaitu Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini dilakukan untuk meringankan biaya berobat penduduk miskin. Adapun jumlah penerima Jamkesmas di Kelurahan Rowosari sebanyak 3676 jiwa.
3	Pemberdayaan	Bentuk pemberdayaan penduduk miskin belum dilakukan di Kelurahan Rowosari. Hal ini menyebabkan penduduk miskin di wilayah ini memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah sehingga mereka terpaksa melakukan pekerjaan dengan imbalan yang tidak seimbang. Tak sedikit dari mereka yang juga menganggur terutama pada saat musim kemarau karena lahan pertanian kering dan tidak dapat ditanami.
4	Aset Dasar	Peningkatan aset dasar sebagai salah satu upaya peningkatan faktor produksi untuk keberlanjutan peluang ekonomi bagi penduduk miskin. Adapun program yang pernah dilakukan terkait dengan peningkatan aset dasar ini adalah pemberian bantuan bibit pertanian berupa bibit jagung dan padi oleh Dinas Pertanian. Bantuan ini diberikan pada beberapa kelompok tani. Sehingga tidak semua kelompok tani menerima bantuan tersebut.
5	Pasar	Kegiatan penyediaan kesempatan kerja belum dilakukan di Kelurahan Rowosari. Hal ini menyebabkan banyak penduduk Rowosari yang memilih meninggalkan keluarganya dan bekerja di luar kota seperti Yogyakarta dan Solo.
6	Tata kelola pemerintahan	Berkaitan dengan penyediaan informasi dan keterlibatan masyarakat miskin di Kelurahan Rowosari. Adapun kegiatan rutin pada tiap RT yang melibatkan penduduk miskin. Namun dalam kegiatan khusus yang berkaitan dengan program-program pembangunan di wilayah tersebut, penduduk miskin Rowosari hanya diwakili oleh masing-masing ketua RT dan mereka merupakan objek penerima bantuan.

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Adapun program-program tersebut merupakan respon terhadap kemiskinan yang terjadi di wilayah pinggiran yang masih memiliki karakteristik pedesaan. Berdasarkan program dan karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Rowosari dapat distrukturkan dalam Tabel V.16 di bawah ini:

TABEL V.16
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN TERHADAP
KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI KELURAHAN ROWOSARI

Program Penanganan Kemiskinan	Karakteristik Kemiskinan		
	Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
	X	X	X
BLT	v	v	v
Raskin (Beras Miskin)	v		
Jaminan kesehatan	v		
Bantuan bibit pertanian	v		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

X = Terdapat karakteristik kemiskinan

v = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan

Kelurahan Mangunsari juga merupakan salah satu kelurahan di wilayah pinggiran Kota Semarang yang masih memiliki karakteristik pedesaan dengan keberadaan areal persawahan yang masih luas. Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan di Kelurahan Mangunsari lebih lanjut pada Tabel V.17 di bawah ini:

TABEL V.17
ANALISIS RESPON KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN
DI KELURAHAN MANGUNSARI

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
1	Bantuan	Adapun bantuan langsung yang juga diterima oleh keluarga miskin di Kelurahan Mangunsari yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan jumlah penerima sebanyak 560 KK pada tahun 2009. • Raskin (Beras Miskin) yang merupakan bantuan pangan pokok yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin dengan jumlah penerima sebanyak 289 KK.

No	Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan
		Bentuk bantuan langsung ini merupakan bentuk penanggulangan kemiskinan yang diberikan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dilihat dari segi pendapatan.
2	Pelayanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Mangunsari juga mendapatkan bantuan perlindungan kesehatan yang berupa Jamkesmas dengan jumlah penerima Jamkesmas di Kelurahan Rowosari sebanyak 2501 jiwa. • Sedangkan bantuan pelayanan sosial lain yang dilakukan di Kelurahan Mangunsari melalui BKM Mantra, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pelayanan air bersih dengan pembuatan instalasi air bersih sebanyak 1 unit dan pengadaan sumur artesis. ✓ Peningkatan akses terhadap sarana sanitasi dengan pembangunan WC umum ✓ Perbaikan rumah tidak layak huni ✓ Pengembangan prasarana dan sarana dasar lingkungan melalui kegiatan pemavingan jalan. ✓ Pengadaan perlengkapan rumah pintar untuk meningkatkan jumlah anak mengikuti pendidikan informal di rumah pintar.
3	Pemberdayaan	<p>Bentuk pemberdayaan penduduk miskin mulai dilakukan di Kelurahan Mangunsari melalui BKM Mantra yang terdapat di kelurahan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari program PNPM Mandiri. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kelurahan Mangunsari yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan komputer sebanyak 110 orang • Pelatihan menjahit sebanyak 50 orang
4	Aset Dasar	<p>Peningkatan aset dasar sebagai salah satu upaya peningkatan faktor produksi untuk keberlanjutan peluang ekonomi bagi penduduk miskin. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan aset dasar keluarga miskin di Kelurahan Mangunsari yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman modal bergulir yang diberikan kepada 210 orang dengan total dana Rp. 68.000.000,- dan suku bunga pinjaman sebesar 1,5%. • Pemberian bantuan bibit pertanian oleh Dinas Pertanian. Bantuan ini diberikan kepada kelompok tani.
5	Pasar	Kegiatan penyediaan kesempatan kerja belum dilakukan di Kelurahan Mangunsari.
6	Tata kelola pemerintahan	Penduduk miskin dilibatkan dalam kegiatan rutin pada tiap RT. Namun, mereka bukan merupakan bagian dari pengambil keputusan dalam program pembangunan di wilayah tersebut.

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009



Sumber : Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 5.12
PERBAIKAN RUMAH KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN MANGUNSARI

Berdasarkan program dan karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Mangunsari yang terletak di Kecamatan Gunungpati dapat distrukturkan dalam Tabel V.18 di bawah ini:

TABEL V.18
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN TERHADAP
KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI KELURAHAN MANGUNSARI

Program Penanganan Kemiskinan	Karakteristik Kemiskinan		
	Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
	X	X	X
BLT	v	v	v
Raskin (Beras Miskin)	v		
Jaminan kesehatan	v		
Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi			v
Perbaikan rumah tidak layak huni			v
Pengadaan perlengkapan rumah pintar		v	
Pelatihan komputer dan menjahit		v	
Pinjaman modal bergulir	v		
Bantuan bibit pertanian	v		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

X = Terdapat karakteristik kemiskinan

v = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan

5.3.4 Kesimpulan Analisis Respon Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, respon kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Semarang dapat disimpulkan pada Tabel V.19 di bawah ini:

TABEL V.19
REKAP RESPON KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN
DI KOTA SEMARANG

Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan	Keterangan	Lokasi									
			CBD		Zona Transisi		Suburban					
			Peterongan		Bongsari		Mangkang Wetan		Rowosari		Mangunsari	
			Pelak sanaan	Keber lanjutan	Pelak sanaan	Keber lanjutan	Pelak sanaan	Keber lanjutan	Pelak sanaan	Keber lanjutan	Pelak sanaan	Keber lanjutan
Bantuan	Jenis bantuan langsung yang diberikan	Memberikan bantuan yang dapat digunakan langsung oleh keluarga miskin untuk pemenuhan kebutuhan hidup	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Pelayanan sosial	Peningkatan partisipasi sekolah	Pemberian beasiswa	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perlindungan kesehatan	Pemberian perlindungan atau kemudahan mengakses sarana kesehatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Peningkatan akses terhadap permukiman layak dengan akses air bersih dan sanitasi yang memadai	Perbaikan rumah dan pembangunan sarana sanitasi serta penyediaan air bersih	V	V	-	-	-	-	-	-	V	V
Pemberdayaan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	Memberikan pelatihan keterampilan	-	-	V	-	V	-	-	-	V	V
Aset dasar	Peningkatan modal	Pemberian/ Peminjaman modal	V	V	V	V	V	-	-	-	V	V

Strategi Anti-Kemiskinan	Penjelasan	Keterangan	Lokasi									
			CBD		Zona Transisi		Suburban					
			Peterongan		Bongsari		Mangkang Wetan		Rowosari		Mangunsari	
			Pelak sanaan	Keber lanjutan	Pelak sanaan	Keber lanjutan	Pelak sanaan	Keber lanjutan	Pelak sanaan	Keber lanjutan	Pelak sanaan	Keber lanjutan
	Peningkatan faktor produksi	Pemberian bantuan alat atau bibit untuk produksi	-	-	-	-	V	-	V	-	V	V
Subsidi perumahan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pasar	Penciptaan kesempatan kerja	Pengadaan lapangan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Promosi usaha kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tata kelola pemerintahan	Partisipasi masyarakat miskin	Penyediaan informasi bagi masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		Pelibatan dalam pengambilan keputusan pembangunan wilayah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

Kolom Pelaksanaan

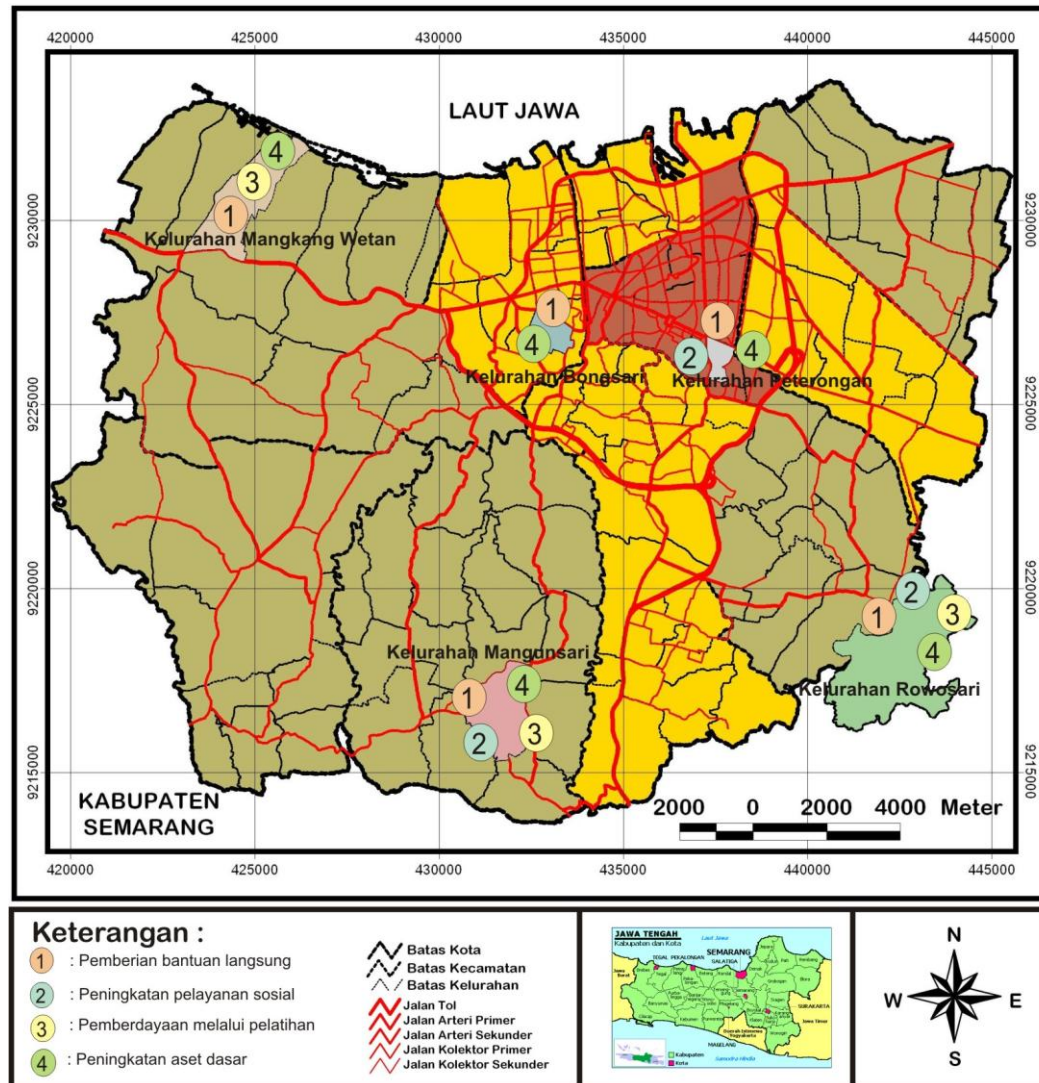
(V) = dilaksanakan

(-) = belum dilaksanakan

Kolom Keberlanjutan

(V) = ada keberlanjutan

(-) = tidak ada keberlanjutan



Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

GAMBAR 5.13
HASIL ANALISIS RESPON KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa respon kebijakan penanganan kemiskinan yang dilakukan di suatu wilayah belum tentu dilakukan di wilayah lain. Hal ini dipengaruhi kondisi wilayah dengan perbedaan karakteristik kemiskinan yang terjadi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai respon kebijakan penanganan kemiskinan yang telah dilakukan di Kota Semarang:

TABEL V.20
KESIMPULAN ANALISIS RESPON KEBIJAKAN
PENANGANAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

Kesimpulan Respon Kebijakan	Wilayah			
	CBD	Zona Transisi	Suburban	
			Kota	Desa
Pemberian bantuan langsung	v	v	v	v
Peningkatan pelayanan sosial	v	-	-	v
Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan	-	-	v	v
Peningkatan aset dasar	v	v	v	v
Perluasan kesempatan kerja	-	-	-	-
Partisipasi	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

v = ada

- = tidak ada

5.4 Identifikasi Kesesuaian Respon Kebijakan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Kota Semarang

Identifikasi ini dilakukan berdasarkan hasil analisis karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan untuk mengetahui apakah strategi anti-kemiskinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin yang sebenarnya.

5.4.1 Identifikasi Kesesuaian Respon Kebijakan terhadap Karakteristik Kemiskinan di wilayah CBD

Pada analisis sebelumnya telah diketahui karakteristik kemiskinan di Kelurahan Peterongan sebagai bagian dari wilayah CBD dan juga respon kebijakan penanganan kemiskinan di wilayah tersebut. Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian karakteristik dan respon kebijakan yang telah dilakukan.

TABEL V.21
KESESUAIAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN RESPON KEBIJAKAN
DI KELURAHAN PETERONGAN

Strategi Anti-Kemiskinan		Karakteristik Kemiskinan		
		Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
		X	X	X
Pemberian bantuan langsung	X	V	V	V
Peningkatan pelayanan sosial	X		V	V
Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan	-		?	
Peningkatan aset dasar	X	V		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

- X = Terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
- = Tidak terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
- V = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan
- ? = Karakteristik kemiskinan belum direspon kebijakan penanganan kemiskinan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat karakteristik kemiskinan di Kelurahan Peterongan yang belum direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan. Respon kebijakan yang dilakukan selama ini masih bersifat pemberian bantuan dan penyediaan pelayanan sosial yang dapat digunakan langsung oleh penduduk miskin di wilayah tersebut. Sedangkan respon kebijakan yang bersifat pemberdayaan melalui pelatihan belum dilakukan di Kelurahan Peterongan. Sehingga dapat diketahui bahwa respon kebijakan yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin setempat.

Respon kebijakan melalui peminjaman modal bergulir yang disalurkan melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang terdapat di Kelurahan Peterongan cukup memberikan kontribusi pada penanganan kemiskinan di wilayah tersebut. Tujuan dari salah satu respon kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses penduduk miskin terhadap modal yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan aset yang mereka miliki untuk keberlanjutan ekonomi mereka.

5.4.2 Identifikasi Kesesuaian Respon Kebijakan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Zona Transisi

Pada analisis sebelumnya telah diketahui karakteristik kemiskinan di Kelurahan Bongsari sebagai bagian dari zona transisi yang memiliki persentase keluarga miskin paling tinggi dan respon kebijakan penanganan kemiskinan di wilayah tersebut. Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian karakteristik dan respon kebijakan yang telah dilakukan di Kelurahan Bongsari.

TABEL V.22
KESESUAIAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN RESPON KEBIJAKAN
DI KELURAHAN BONGSARI

Strategi Anti-Kemiskinan		Karakteristik Kemiskinan		
		Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
		X	X	-
Pemberian bantuan langsung	X	V	V	
Peningkatan pelayanan sosial	-		?	
Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan	-		?	
Peningkatan aset dasar	X	V		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

- X = Terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
- = Tidak terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
- V = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan
- ? = Karakteristik kemiskinan belum direspon kebijakan penanganan kemiskinan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa karakteristik penduduk miskin yang lemah akan pendidikan dan keterampilan yang terdapat di Kelurahan Bongsari belum direspon oleh kebijakan penanganan yang bersifat pemberian pelayanan sosial seperti pemberian beasiswa dan respon kebijakan dengan strategi anti-kemiskinan pemberdayaan melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Berbeda dengan Kelurahan Peterongan yang sudah mulai melakukan program untuk merespon karakteristik kemiskinan dimana penduduknya memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan

keterampilan lain. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa respon kebijakan penanganan kemiskinan di Kelurahan Bongsari belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin yang lemah akan pendidikan dan keterampilan.

5.4.3 Identifikasi Kesesuaian Respon Kebijakan terhadap Karakteristik Kemiskinan di Wilayah Pinggiran

Adapun identifikasi ini dibagi menjadi dua yaitu di wilayah pinggiran yang memiliki status kota yaitu Kelurahan Mangkang Wetan dan wilayah pinggiran yang masih memiliki karakteristik pedesaan yaitu Kelurahan Rowosari dan Mangunsari.

5.4.3.1 Identifikasi Kesesuaian di Wilayah Pinggiran Status Kota

Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian karakteristik dan respon kebijakan yang telah dilakukan di Kelurahan Mangkang Wetan.

TABEL V.23
KESESUAIAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN RESPON KEBIJAKAN
DI KELURAHAN MANGKANG WETAN

Strategi Anti-Kemiskinan		Karakteristik Kemiskinan		
		Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
		X	X	X
Pemberian bantuan langsung	X	V	V	V
Peningkatan pelayanan sosial	-			?
Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan	X		V	
Peningkatan aset dasar	X	V		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

- X = Terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
- = Tidak terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
- V = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan
- ? = Karakteristik kemiskinan belum direspon kebijakan penanganan kemiskinan

Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik kemiskinan di Kelurahan Mangkang Wetan dimana penduduknya tinggal pada lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat belum direspon oleh kebijakan pemerintah yang bersifat penyediaan pelayanan sosial dengan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lingkungan tempat tinggal yang sehat. Hal ini tentu akan mempengaruhi kesehatan mereka dan menimbulkan masalah lain. Sedangkan respon kebijakan lain seperti pemberdayaan yang pernah dilakukan melalui pelatihan belum terlihat dampaknya secara nyata karena pemberdayaan tersebut baru saja dilakukan dan hanya dilakukan pada beberapa orang. Pemberian bantuan langsung yang diberikan cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun hanya bersifat sementara.

5.4.3.2 Identifikasi Kesesuaian di Wilayah Pinggiran Status Desa

Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Mangunsari merupakan kelurahan di wilayah pinggiran Kota Semarang yang masih memiliki karakteristik pedesaan. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh masih luasnya areal pertanian di kedua wilayah tersebut.

Tabel berikut akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian respon kebijakan dan karakteristik kemiskinan berdasarkan analisis sebelumnya.

TABEL V.24
KESESUAIAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN RESPON KEBIJAKAN
DI WILAYAH PINGGIRAN STATUS DESA

Strategi Anti-Kemiskinan		Karakteristik Kemiskinan		
		Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
		X	X	X
Pemberian bantuan langsung	X	V	V	V
Peningkatan pelayanan sosial	X			V
Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan	X		V	
Peningkatan aset dasar	X	V		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

- X = Terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
 - = Tidak terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan
 V = Karakteristik kemiskinan direspon kebijakan penanganan kemiskinan
 ? = Karakteristik kemiskinan belum direspon kebijakan penanganan kemiskinan

Tabel di atas menunjukkan bahwa respon kebijakan yang telah dilakukan di wilayah pinggiran dengan status desa terutama di Kelurahan Mangunsari sudah lebih merespon karakteristik kemiskinan yang sangat kompleks. Namun, pengaruh yang diberikan dengan adanya strategi anti-kemiskinan tersebut belum terlihat nyata kecuali bantuan yang diberikan secara nyata seperti perbaikan rumah keluarga miskin serta peningkatan sarana dan prasarana lingkungan. Sedangkan program lain seperti peningkatan aset dasar dengan peminjaman modal bergulir cukup membantu penduduk miskin mengembangkan usaha terutama untuk berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa respon kebijakan penanganan kemiskinan yang dilakukan di wilayah ini sudah sesuai dengan kebutuhan penduduk miskinnya.

Berdasarkan analisis di atas, kesesuaian respon kebijakan penanganan kemiskinan terhadap karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang dapat disimpulkan pada Tabel V.25 di bawah ini:

TABEL V.25
KESIMPULAN IDENTIFIKASI
KESESUAIAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN RESPON KEBIJAKAN

Strategi Anti-Kemiskinan		Karakteristik Kemiskinan		
		Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
		X	X	X
Pemberian bantuan langsung	X	<ul style="list-style-type: none"> • Peterongan • Bongsari • Mangkang Wetan • Mangunsari • Rowosari 	<ul style="list-style-type: none"> • Peterongan • Bongsari • Mangkang Wetan • Mangunsari • Rowosari 	<ul style="list-style-type: none"> • Peterongan • Mangkang Wetan • Mangunsari • Rowosari
Peningkatan pelayanan sosial	X		Peterongan	<ul style="list-style-type: none"> • Peterongan • Mangunsari • Rowosari
Pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan	X		<ul style="list-style-type: none"> • Mangkang Wetan • Mangunsari • Rowosari 	

Strategi Anti-Kemiskinan		Karakteristik Kemiskinan		
		Aset yang dimiliki lemah	Pendidikan dan keterampilan rendah	Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat
Peningkatan aset dasar	X	<ul style="list-style-type: none"> • Peterongan • Bongsari • Mangkang Wetan • Mangunsari • Rowosari 		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

Keterangan :

X = Terdapat karakteristik kemiskinan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan

Berdasarkan analisis- analisis di atas dapat distrukturkan kembali pada Tabel V.26 di bawah ini:

TABEL V.26
PENANGANAN KEMISKINAN TERHADAP KARAKTERISTIK KEMISKINAN YANG TERJADI DI KOTA SEMARANG

Klasifikasi Wilayah	Karakteristik Kemiskinan		Respon Kebijakan			
			Bantuan Langsung	Pelayanan sosial	Pemberdayaan	Aset Dasar
CBD	Aset Dasar yang dimiliki	Sangat Lemah	V			V
	Tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan	Rendah		V		
	Lingkungan perumahan	Sangat tidak sehat		V		
Zona Transisi	Aset Dasar yang dimiliki	Sangat Lemah	V			V
	Tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan	Rendah				
	Lingkungan perumahan	-				
Suburban (Kota)	Aset Dasar yang dimiliki	Sangat Lemah	V			V
	Tingkat pendidikan	Rendah			V	

Klasifikasi Wilayah	Karakteristik Kemiskinan		Respon Kebijakan			
			Bantuan Langsung	Pelayanan sosial	Pemberdayaan	Aset Dasar
	rendah dan tidak memiliki keterampilan					
	Lingkungan perumahan	Sangat tidak sehat				
	Aset Dasar yang dimiliki	Lemah	V			V
Suburban (Desa)	Tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan	Rendah			V	
	Lingkungan perumahan	Sangat tidak sehat		V		

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2009

V = respon kebijakan dilaksanakan

5.5 Temuan Studi

Berdasarkan analisis karakteristik kemiskinan pada masing-masing wilayah, kemiskinan yang terjadi memiliki karakteristik kemiskinan yang hampir sama. Namun, terdapat perbedaan karakteristik antar wilayah. Beberapa penjelasan perbedaan tersebut antara lain:

- Berdasarkan aset dasar yang dimiliki, penduduk miskin di CBD ternyata lebih lemah daripada penduduk miskin di wilayah pinggiran terutama yang masih memiliki karakteristik desa. Hal ini dipengaruhi oleh heterogenitas penduduk di CBD dimana mayoritas penduduk miskinnya merupakan pendatang dari luar Kota Semarang. Wilayah CBD merupakan wilayah pusat kota dengan dominasi penggunaan lahan perdagangan dan jasa yang menarik banyak pendatang dari luar Kota Semarang yang ingin mencari pekerjaan. Namun, keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka bekerja pada sektor informal dengan ketidakpastian keberlanjutan bagi ekonomi mereka.

- Sedangkan terkait dengan tingkat pendidikan dan keterampilan, penduduk miskin di masing-masing wilayah memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sebagian besar dari mereka hanya lulusan SD-SMP.
- Penduduk miskin di wilayah CBD dan wilayah pinggiran sama-sama tinggal di lingkungan perumahan yang sangat tidak sehat, namun karakteristik kemiskinan tersebut di CBD tidak separah yang terjadi di wilayah pinggiran. Hal ini terjadi karena karakteristik wilayah CBD yang memiliki infrastruktur lebih lengkap daripada wilayah lain. Selain itu, perbedaan yang terlihat di CBD ditunjukkan oleh sebagian besar dari keluarga miskin yang tinggal di lingkungan permukiman yang padat dimana 1 rumah dengan ukuran kecil dapat ditinggali lebih dari 1 keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah CBD yang kepadatan bangunannya tinggi. Sedangkan di zona transisi, sebagian besar dari keluarga miskin di wilayah ini telah tinggal pada rumah dengan kualitas hunian yang cukup layak dan dilengkapi oleh sarana sanitasi. Karakteristik pedesaan pada wilayah pinggiran mempengaruhi kondisi lingkungan perumahan penduduk miskin dimana banyak penduduk miskin yang masih tinggal dalam bangunan rumah dengan dinding bambu dan berlantai tanah tanpa sarana sanitasi.

Berdasarkan analisis karakteristik kemiskinan, analisis respon kebijakan penanganan kemiskinan serta identifikasi kesesuaian respon kebijakan terhadap karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang diketahui bahwa tidak semua kebijakan penanganan kemiskinan yang dilaksanakan melalui program-program penanggulangan kemiskinan merespon karakteristik kemiskinan yang terjadi. Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wilayah CBD

Wilayah CBD merupakan wilayah dengan kepadatan bangunan tinggi serta mayoritas penggunaan lahan sebagai perdagangan dan jasa. Hal ini ternyata mempengaruhi karakteristik penduduk miskin yang tinggal di wilayah tersebut. Adapun karakteristik tersebut digambarkan oleh daerah asal

penduduk miskin yang kebanyakan berasal dari luar Kota Semarang yang ingin mencari kehidupan lebih baik dengan melakukan migrasi ke Kota Semarang. Berbeda dengan zona transisi dan wilayah pinggiran dimana penduduk miskinnya merupakan penduduk asli wilayah tersebut.

Karakteristik kemiskinan yang digambarkan oleh rendahnya pendidikan dan keterampilan penduduk miskin di wilayah CBD dalam hal ini Kelurahan Peterongan belum direspon oleh kebijakan dengan strategi anti-kemiskinan yang bersifat pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan. Hal ini menyebabkan penduduk miskin yang mayoritas berasal dari luar Kota Semarang terus melakukan pekerjaan dengan upah minimal sehingga aset dasar yang mereka miliki tetap rendah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa respon kebijakan penanganan kemiskinan di wilayah ini belum sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin yang sebenarnya. Karakteristik tersebut seharusnya direspon oleh program pemberdayaan untuk meningkatkan keterampilan penduduk miskin dalam rangka peningkatan kemandirian ekonomi penduduk miskin. Program ini selanjutnya perlu didukung oleh kebijakan lainnya seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung mereka sesuai dengan keterampilan yang telah dilatih. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui promosi usaha kecil serta kerjasama dengan perusahaan dalam rangka penyediaan kesempatan kerja. Pada akhirnya diharapkan pengaruh kebijakan yang dilakukan akan berkelanjutan.

2. Zona Transisi

Penduduk miskin di Kelurahan Bongsari yang merupakan bagian dari zona transisi juga memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah. Namun karakteristik tersebut belum direspon oleh kebijakan pemerintah baik yang bersifat pemberdayaan maupun peningkatan pelayanan sosial dengan pemberian beasiswa untuk meningkatkan partisipasi sekolah.

Sama halnya yang terjadi di Kelurahan Peterongan, pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Bongsari belum banyak dilakukan sebagai

upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan. Sehingga kemiskinan akan terus berlanjut karena kebijakan penanganan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih bersifat bantuan langsung dimana bantuan tersebut seringkali habis dalam waktu singkat dan tidak memberikan banyak pengaruh pada peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan penjabaran di atas, respon kebijakan penanganan kemiskinan yang telah dilakukan di Kelurahan Bongsari belum sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin di wilayah tersebut. Sehingga seharusnya program pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan perlu dilaksanakan di Kelurahan Bongsari sebagai respon terhadap karakteristik masyarakat miskin yang tidak berdaya karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Program pemberdayaan ini selanjutnya perlu didukung oleh kebijakan penanganan kemiskinan lain yang bersifat penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dan pengaruh yang diberikan pada peningkatan aset dasar masyarakat miskin untuk keberlanjutan ekonomi mereka.

3. Wilayah Pinggiran dengan Status Kota

Karakteristik kemiskinan di Kelurahan Mangkang Wetan yang belum direspon oleh program penanggulangan kemiskinan adalah lingkungan tempat tinggal yang tidak layak. Kebutuhan ini belum direspon oleh strategi anti-kemiskinan yang bersifat penyediaan pelayanan sosial yang dapat dilakukan melalui perbaikan rumah keluarga miskin dengan kelengkapan akses terhadap sarana sanitasi dan akses terhadap air bersih.

Respon kebijakan penanganan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih bersifat bantuan langsung dan pelatihan yang tidak ada keberlanjutannya. Sehingga pengaruh pengentasan kemiskinannya pun belum terlihat secara nyata.

Berdasarkan temuan di atas, respon kebijakan pemerintah yang bersifat penyediaan pelayanan sosial terutama perbaikan rumah keluarga miskin perlu

menjadi prioritas di wilayah ini. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka yang pada akhirnya akan menjaga mereka dari terjadinya dimensi kemiskinan yang lain.

4. Wilayah Pinggiran dengan Status Desa

Berdasarkan analisis dan identifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya, respon kebijakan di wilayah pinggiran terutama di Kelurahan Mangunsari paling lengkap diantara wilayah lain. Sehingga berdasarkan identifikasi kesesuaian yang tersusun terlihat bahwa karakteristik kemiskinan yang terjadi di wilayah pinggiran dengan karakteristik pedesaan sudah cukup direspon oleh program-program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa respon kebijakan penanganan kemiskinan di wilayah ini sudah sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin setempat.

Pengaruh dari pelaksanaan program tersebut belum terlihat secara nyata kecuali yang berbentuk fisik seperti perbaikan rumah dan pembangunan sarana prasarana lingkungan. Selain itu, program pemberdayaan yang dilakukan belum didukung oleh respon kebijakan penanganan kemiskinan yang bersifat penyediaan lapangan pekerjaan yang sebenarnya banyak dibutuhkan oleh penduduk miskin.

Perbedaan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah tersebut seharusnya mendapat penanganan yang berbeda. Namun, pada kenyataannya respon kebijakan yang dilakukan belum memperhatikan perbedaan karakteristik spasial yang mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perkembangan Kota Semarang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi tidak terlepas dari penyebab kemiskinan yang selanjutnya mempengaruhi karakteristik kemiskinan pada masing-masing wilayah di Kota Semarang. Karakteristik kemiskinan tersebut selanjutnya direspon oleh kebijakan penanganan kemiskinan. Pemerintah Kota Semarang sendiri telah melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan, baik melalui program yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah di Kota Semarang dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah. Meskipun karakteristik kemiskinan yang terjadi hampir sama. Namun, perbedaan karakteristik wilayah seperti kelengkapan fasilitas di wilayah CBD menyebabkan kemiskinan yang terjadi tidak separah di wilayah pinggiran.

Penduduk miskin yang berada di wilayah CBD dengan kepadatan bangunan yang tinggi merupakan penduduk miskin yang berasal dari luar Kota Semarang. Sedangkan penduduk miskin di wilayah zona transisi dan wilayah pinggiran merupakan penduduk miskin yang berasal dari dalam Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di wilayah CBD disebabkan oleh perpindahan penduduk dengan keterampilan dan pendidikan rendah ke wilayah ini. Sedangkan kemiskinan di wilayah zona transisi dan wilayah pinggiran berlangsung secara turun temurun. Selain itu, perbedaan karakteristik wilayah juga mempengaruhi jenis pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk miskin dan kondisi lingkungan dimana mereka tinggal.

Respon kebijakan penanganan kemiskinan yang telah dilakukan di masing-masing wilayah Kota Semarang belum sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi. Karakteristik utama dari masyarakat miskin yang paling terlihat adalah keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki. Namun,

secara garis besar, strategi anti-kemiskinan yang masih banyak dilakukan di seluruh wilayah Kota Semarang adalah pemberian bantuan langsung baik berupa uang, pangan, dan penyediaan pelayanan sosial yang bersifat fisik seperti perbaikan rumah dan prasarana sarana lingkungan. Bantuan langsung yang berupa uang dan pangan sedikit membantu dan bersifat sementara karena bantuan tersebut akan habis dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Berdasarkan frekuensi pelaksanaan, kegiatan tersebut lebih sering dibutuhkan, sedangkan keberlanjutan yang salah satunya dapat dilihat dari pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan itu sendiri tidak ada karena bantuan yang diberikan bersifat penyediaan bantuan daripada pemberdayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, prioritas respon kebijakan penanganan kemiskinan yang paling dibutuhkan oleh penduduk miskin di Kota Semarang adalah pemberdayaan untuk kemandirian dan keberlanjutan ekonomi bagi mereka. Strategi anti-kemiskinan ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan akses ke permodalan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Selain itu perlu didukung oleh strategi anti-kemiskinan untuk menyediakan kesempatan kerja melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan yang telah dilatih dan promosi usaha kecil.

6.2 Rekomendasi

Perkembangan yang terjadi di Kota Semarang mengakibatkan perkembangan wilayah perkotaan yang mendorong adanya tindak lanjut dalam perencanaan wilayah dan kota agar perkembangan Kota Semarang sesuai dengan karakteristik aktivitas yang ada di dalamnya. Untuk itu, diperlukan adanya rekomendasi bagi pembuat dan penentu kebijakan berdasarkan hasil temuan studi dan kesimpulan agar dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan Kota Semarang terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan perkotaan. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyusunan prioritas penanganan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin pada masing-masing wilayah di Kota Semarang dengan

frekuensi pelaksanaan kegiatan yang teratur untuk menjaga keberlanjutan pengentasan kemiskinan. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa respon kebijakan yang dilakukan belum memperhatikan karakteristik wilayah yang mempengaruhi perbedaan karakteristik kemiskinan yang terjadi.

- Peningkatan keterampilan bagi penduduk miskin terutama dilakukan pada wilayah CBD dan Zona transisi seperti Kelurahan Peterongan dan Bongsari yang salah satunya ditunjukkan dengan kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor informal dengan kurangnya jaminan keberlanjutan. Pemberdayaan bagi peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi penduduk miskin dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan untuk mendukung penyediaan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dalam mengembangkan sektor industri di Kota Semarang baik skala rumah tangga maupun industri besar.
- Peningkatan akses terhadap permodalan melalui pemberian modal bergulir pada setiap kelompok seperti yang diterapkan di Bangladesh melalui Grameen bank sebagai salah upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Adanya sistem kelompok dan bukan individu berguna untuk menjaga keberlanjutan usaha yang dikembangkan baik secara kelompok maupun masing-masing individu dalam kelompok tersebut karena apabila salah satu dari mereka tidak melaksanakan kewajiban dalam pengembalian pinjaman sesuai ketentuan maka akan merugikan anggota kelompok lain. Jadi setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab dalam keberlangsungan peminjaman modal dalam kelompok tersebut sekaligus menjaga keberlanjutan usaha yang mereka kembangkan dengan bantuan modal tersebut.
- Pengembangan usaha kecil menengah yang mengolah hasil pertanian di Kota Semarang terutama yang berada pada wilayah pinggiran Kota Semarang seperti Kelurahan Mangkan Wetan, Kelurahan Rowosari, dan Kelurahan Mangunsari sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan penduduk miskin di wilayah ini. Pengolahan hasil tambak dapat dikembangkan di Kelurahan Mangkang Wetan dimana sebagian penduduk miskin juga bekerja sebagai nelayan. Selain itu, wilayahnya yang berada di sebelah utara Kota

Semarang berpotensi dalam pengembangan pertanian tambak dengan pola tanam yang benar sehingga dapat bermanfaat.

- Peningkatan pelayanan sosial terutama di wilayah pinggiran Kota Semarang seperti di Kelurahan Mangkang Wetan dan Rowosari. Pada kedua wilayah ini, banyak keluarga miskin yang tinggal pada lingkungan perumahan yang tidak sehat dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas rumah keluarga miskin melalui program rehab rumah warga miskin dan pembangunan prasarana pendukung seperti air bersih dan sanitasi.
- Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dalam rangka promosi hasil usaha kecil dan menengah yang dikembangkan penduduk miskin. Hal ini merupakan salah satu upaya pemasaran produk, sehingga kegiatan yang berlangsung dapat memberikan keberlanjutan ekonomi yang dibutuhkan penduduk miskin. Selain itu, peningkatan kerjasama ini juga sebagai upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang sebenarnya banyak dibutuhkan oleh masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank Institute. 2001. *Fighting Urban Poverty* dalam Asian Cities in The 21st Century Volume 5. Philippines : Asian Development Bank Institute and the Asian Development Bank.
- Asian Development Bank Institute. 2005. *Poverty Targeting in Asia*. Great Britain : MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.
- Baharoglu, Deniz and Christine Kessides. 2001. *Urban Poverty* in World Bank, PRSP Sourcebook, World Bank, Washington DC.
- Bappenas. 2004. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Bab II* diakses melalui <http://www.bappenas.go.id/index.php> pada tanggal 9 April 2007.
- Bappeda Kota Semarang. 2008. *Advokasi dan Sinkronisasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang*.
- Bintarto, R. 1984. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Brockerhorff, M dan Brennan. 1998. "The Poverty of Cities in Developing Regions". *Population and Development Review* 24, no. 1.
- Choguill, Charles L. 2001. "Urban policy as Poverty Alleviation: The Experience of the Philippines". Australia : School of Social Science and Planning, Royal Melbourne Institute of Technology, GPO Box 2476V, Melbourne Vic. 3001 dalam *Habitat Internasional* Vol. 25, 1-13.
- Effendi, Tajudin Noor. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Feitosa, Flávia F, dkk. 2009. *Global and Local Spatial Indices of Urban Segregation* diakses melalui http://www.dpi.inpe.br/gilberto/papers/feitosa_camara_ijgis.pdf pada tanggal 10 Juni 2009.
- Kamaluddin, Rustian. 2003. *Kemiskinan Perkotaan di Indonesia : Perkembangan, Karakteristik dan Upaya Penanggulangan* diakses melalui http://www.bappeda-jabar.go.id/bappeda_design/docs/perencanaan/20070530_105946.pdf.
- Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang diakses melalui http://p3b.bappenas.go.id/Loknas_Wonosobo/content/docs/materi/12-Kota%20Semarang.pdf pada tanggal 23 April 2009.

- Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2007.
- McKay, Andrew dan Abbi M.Kedir. 2005. *Chronic Poverty in Urban Ethiopia : Panel Data Evidence* dalam Jurnal Internasional Planning Studies Vol.10, No.1, 49-67. 127
- Mc. Gee, TG. 1971. *The Urbanization Process in the Third World*. London : G. Bells and Sons Ltd.
- Mc Gee, T.G. 1995. *Metrofitting the Emerging Mega-Urban Regions of ASEAN : An Overview* dalam The Mega-Urban Regions of Southeast Asia. Vancouver: UBC Press, pp. 1-26.
- McGee, T.G. 2001. *Rethinking Regional Policy in The Era Of Rapid Urbanization and Volatile Globalization*, dalam Kumssa dan McGee (eds.), *New Regional Development Paradigms: Globalization and the New Regional Development*, Westport: Greenwood Press, pp. 75-87.
- Monografi Kelurahan Bongsari Tahun 2009.
- Monografi Kelurahan Mangkang Wetan Tahun 2009.
- Monografi Kelurahan Mangunsari Tahun 2009.
- Monografi Kelurahan Peterongan Tahun 2009.
- Monografi Kelurahan Rowosari Tahun 2009.
- Lacabana, Miguel dan Cecilia Cariola. 2003. *Globalization and metropolitan expansion: Residential Strategies and Livelihoods in Caracas and its periphery*, Environment and Urbanization 2003; 15; 65 diakses melalui <http://eau.sagepub.com> pada tanggal 19 April 2009.
- Nugroho dan Dahuri. 2002. *Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- PDRB Kota Semarang Tahun 2006.
- Poverty Alleviation in Indonesia : An Overview. 2000.
- Prihartini, Diah Aryati. 2008. *Perbandingan Total Kemiskinan Versi Pemerintah Indonesia Dan Bank Dunia Dengan Peran Strategis Dari Usaha Mikro Untuk Pengentasan Kemiskinan* diakses melalui repository.gunadarma.ac.id:8000/Perbandingan_Total_Kemiskinan_Diah_edit_789.pdf pada tanggal 4 April 2009.
- Profil Rumah Tangga Miskin Kota Semarang Tahun 2006.
- Ridlo, Mohammad Agung. 2002. "Karakteristik Kemiskinan Perkotaan Pada Permukiman Kumuh dan Liar Kota Semarang". Tesis tidak diterbitkan,

Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

- Sahdan, Gregorius. 2005. *Menanggulangi Kemiskinan Desa* dalam jurnal *Ekonomi Rakyat* diakses melalui http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_6.htm pada tanggal 25 April 2007 jam 19.28.
- Shalimow. 2004. *Pemberdayaan Sektor Informal Masyarakat Melalui P2KP* diakses melalui <http://shalimow.com/pemberdayaan/pemberdayaan-sektor-informal-masyarakat-melalui-p2kp-sekedar-abstraksi.html> pada tanggal 14 April 2008.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3S.
- Sulistyaningsih, Novi. 2007. “Karakteristik Kawasan Tertinggal Kota Semarang”. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1989. *Poverty in Indonesia: concepts, fact and policy alleviation*, paper presented at Indonesia’s New Order: Past, Present, Future, 4-8 December 1989 (Canberra, the Australian National University).
- Sumarto Sudarno, Asep Surhayadi dan Alex Arfianto. 2004. *Governance and Poverty Reduction : Evidence from Newly Desentralized Indonesia*. SMERU Working Paper.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suyanto, M. 2007. *Menyiasati Peluang; Globalisasi dan Kemiskinan* diakses melalui <http://jurnal-ekonomi.org/> pada tanggal 20 Januari 2009.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. 2006. *Pengantar Statistika*. Yogyakarta : Bumi Aksara.
- Walpole, Ronald. 1993. *Pengantar Statistika*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wassmer, Robert W. 2002. *An Economic View of Some Causes of Urban Spatial Segregation and its Costs and Benefits* diakses melalui <http://www.csus.edu/indiv/w/wassmerr/segregationincity.pdf> pada tanggal 10 Juni 2009.
- Wilonoyudho, Saratri. 2009. *Banjir Dan Tata Ruang Kota Semarang* diakses melalui [.http://www.wawasandigital.com](http://www.wawasandigital.com) pada tanggal 23 April 2009

World Bank. 2000. *Global Poverty Report*.

World Bank. 2006. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia* diakses melalui <http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Ikhtisar-Laporan-BD-ttg-Kemiskinan-di-Indonesia.pdf> pada tanggal 11 Mei 2009.

LAMPIRAN A

FORM KUESIONER



KODE: K/09

Klasifikasi Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	Nomor Responden

**FORM KUESIONER
KEMISKINAN DALAM PERKEMBANGAN KOTA SEMARANG :
KARAKTERISTIK DAN RESPON KEBIJAKAN**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2009**

Kuesioner merupakan angket yang diberikan untuk mengetahui opini/pendapat responden mengenai tema yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai karakteristik kemiskinan perkotaan dan respon kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kota Semarang.

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Perkembangan dan pertumbuhan yang begitu pesat, secara fisik mengakibatkan wilayah administratif Kota Semarang dituntut untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan lokasi untuk berbagai kegiatan yang diminati dan dikembangkan oleh dunia usaha ataupun oleh masyarakat sehingga Kota Semarang mengalami perluasan wilayah yang cenderung mengarah pada perkembangan wilayah metropolitan Semarang.

Fragmentasi perkotaan mengiringi perkembangan Kota Semarang. Hal ini ditandai dengan sektor informal dan adanya permukiman kumuh dan liar yang tersebar di wilayah perkotaan Semarang. Ruang-ruang tersebut dihuni oleh penduduk miskin yang dengan penghasilan rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing bagian wilayah dan respon kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan perkotaan yang terjadi.

Untuk itu, kami mengharap sudilah kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat membantu terlaksananya penelitian ini sebagai data dasar dalam penyusunan Tesis dengan cara menjawab pertanyaan pada form kuesioner yang telah tersedia. Perlu diketahui wawancara ini telah mendapat persetujuan dari pihak Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (UNDIP) dan merupakan kegiatan penelitian ilmiah.

Sebelum dan sesudahnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda.

Hormat Kami,

Amelia Renggapratiwi
L4D 008 140

KUESIONER

Hari :
Tanggal :

Tujuan:

1. Untuk mengetahui opini/pendapat masyarakat terhadap tema penelitian yang diangkat
 2. Untuk memenuhi data yang tidak dapat diperoleh melalui survei sekunder
- Petunjuk Pengisian:
1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kenyataan yang ada dengan memberi tanda silang (X) untuk pertanyaan pilihan.
 2. Untuk pertanyaan yang berupa isian, isi dengan jawaban/ Pernyataan secara singkat dan jelas.
 3. Mohon dijawab dengan benar dan tidak dibuat-buat demi terkumpulnya data yang akurat agar berguna bagi semua pihak.

A. Karakteristik Kemiskinan

Nama :
Usia :

PENDAPATAN

1. Apakah pekerjaan/profesi kepala keluarga di rumah Anda saat ini?

a. Tidak bekerja/menganggur	d. Petani
b. Buruh	e. Pedagang
c. Nelayan	f. lain-lain,.....
2. Berapa lama keluarga Anda menekuni bidang tersebut?
 - a. Kurang dari 5 tahun
 - b. 5 - 10 tahun
 - c. lebih dari 10 tahun
3. Berapakah tingkat pendapatan keluarga setiap bulan?

a. kurang dari Rp 500.000,00	c. Rp1.000.000,00–Rp. 2.000.000,00
b. Rp 500.000,00-Rp 1.000.000,00	d. Lebih dari Rp. 2.000.000,00
4. Apakah tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga?

a. Tidak sekolah	c. SMP	e. Perguruan Tinggi (S1/D3)
b. SD	d. SMA	f. lain-lain,.....

KESEHATAN

5. Sudah Berapa Lama Keluarga Anda tinggal di sini?
- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. kurang dari 1 tahun | c. 5-10 tahun |
| b. 1-5 tahun | d. lebih dari 10 tahun |
- Jika migrasi dari mana?
- Mengapa migrasi ke Kota Semarang?.....
6. Jenis lantai bangunan rumah Anda?
- Tanah
 - Bambu/Kayu
 - Plesteran
 - Keramik
7. Jenis dinding bangunan rumah Anda?
- Bambu/kayu
 - Tembok yang tidak diplester
 - Tembok yang diplester
8. Apakah rumah Anda sudah dilengkapi oleh sanitasi?
- Belum
 - Sudah
9. Apakah rumah Anda digunakan untuk kegiatan lain selain tempat tinggal?
- Tidak
 - Ya, untuk kegiatan.....
10. Keperluan air untuk minum/memasak bersumber dari?
- | | |
|--------------|-----------------------|
| a. Sungai | d. Mata air |
| b. Air Hujan | e. Terakses oleh PDAM |
| c. Sumur | f. Membeli |
11. Keperluan air untuk mandi/cuci bersumber dari?
- | | |
|--------------|-----------------------|
| a. Sungai | d. Mata air |
| b. Air Hujan | e. Terakses oleh PDAM |
| c. Sumur | f. Membeli |

PENDIDIKAN

12. Apakah semua anggota keluarga Anda dapat mengakses sarana pendidikan dengan mudah?
- Tidak,
karena.....
 - Ya

KEAMANAN

13. Tanah dan Bangunan Rumah yang keluarga Anda tempati milik Anda sendiri?
- a. Tidak, milik.....
 - b. Ya
14. Bagaimana cara keluarga Anda tinggal di rumah ini?
- a. Mengontrak/menyewa
 - b. Menumpang
 - c. Lain-lain.....
15. apakah keluarga Anda memiliki sertifikat tanah dan bangunan rumah Anda?
- a. Tidak
 - b. Ya

KEMAMPUAN

16. Apakah Anda dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan di lingkungan tempat tinggal Anda? Jika iya, dalam kegiatan apa?
- a. Tidak,
 - b. Ya, dalam kegiatan.....

LAMPIRAN B

REKAPITULASI HASIL KUESIONER



Tabel
Hasil Rekap Kuesioner Kelurahan Peterongan

No	Nama	Usia	1	2	3	4	5
			Pekerjaan	Lama Menekuni Pekerjaan	Pendapatan	Pendidikan	Lama Tinggal
1	Hanafi	40	b	a	a	b	c
2	Marmanti	45	e	b	b	b	c Purwodadi
3	Yanto	43	f, tukang becak	b	a	b	c Purwodadi
4	Yadi	50	b	a	a	b	b
5	Parmin	62	f, tukang becak	b	a	b	c
6	Kastadi	49	b	b	a	c	c
7	Ana	41	e	b	b	b	c
8	Haryani	56	e	b	a	c	d
9	Pasiatno	57	b	c	a	b	c
10	Marni	45	f, pemulung	b	a	a	b
11	Rusdi	50	b	b	b	b	c

No	Nama	Usia	6	7	8	9	10	11
			Lantai	Dinding	Sanitasi	Kegiatan lain di rumah	Sumber Air minum	Sumber Air mandi
1	Hanafi	40	c	b	b	a	c	c
2	Marmanti	45	c	a	b	b, berjualan	c	c
3	Yanto	43	c	b	a	a	c	c
4	Yadi	50	c	c	b	a	c	c
5	Parmin	62	c	a	b	a	c	c
6	Kastadi	49	c	c	b	a	c	c
7	Ana	41	c	c	b	b, berjualan	c	c
8	Haryani	56	c	c	a	b, berjualan	c	c
9	Pasiatno	57	c	b	b	a	c	c
10	Marni	45	c	a	a	a	c	c
11	Rusdi	50	c	c	b	a	c	c

No	Nama	Usia	12	13	14	15	16
			Akses ke pendidikan	Kepemilikan Tnh dan bangn	Cara Tinggal	Sertifikat	Pelibatan
1	Hanafi	40	a	a	b	a	a
2	Marmanti	45	b	a	c bangun sendiri	a	a
3	Yanto	43	a	a	b	a	a
4	Yadi	50	a	a	b	a	a
5	Parmin	62	a	a	c bangun sendiri	a	a
6	Kastadi	49	a	a	a	a	a
7	Ana	41	a	a	b	a	a
8	Haryani	56	a	a	a	a	a
9	Pasiatno	57	a	a	b	a	a
10	Marni	45	a	a	b	a	a
11	Rusdi	50	a	a	a	a	a

Tabel
Hasil Rekap Kuesioner Kelurahan Bongsari

No	Nama	Usia	1	2	3	4	5
			Pekerjaan	Lama Menekuni Pekerjaan	Pendapatan	Pendidikan	Lama Tinggal
1	Sumpeno	44	b	c	a	b	d
2	Kuswandi	47	b	c	a	b	d
3	Tulus	61	b	b	a	b	d
4	Rubiyati	47	b	b	a	a	d
5	Yatno	42	b	b	a	c	d
6	Giman	49	b	b	a	c	d
7	Benny Warsono	58	b	c	a	b	d
8	Kasno	71	a	b	A	b	d
9	Paiman	75	a	b	A	a	d
10	Wahono Mulyono	75	a	a	a	a	d
11	Kusnandi	47	b	c	a	b	d
12	Rusmini	43	b	b	a	a	d
13	Parmin	45	b	b	a	c	d
14	Karjo	53	b	b	a	b	d
15	Murdi	47	b	b	a	c	d
16	Sri	42	e	b	a	a	d

No	Nama	Usia	6	7	8	9	10	11
			Lantai	Dinding	Sanitasi	Kegiatan lain di rumah	Sumber Air minum	Sumber Air mandi
1	Sumpeno	44	c	b	b	a	c	c
2	Kuswandi	47	c	b	b	a	e	e
3	Tulus	61	c	b	b	a	c	c
4	Rubiyati	47	c	b	b	b, berjualan	c	c
5	Yatno	42	c	b	b	a	e	e
6	Giman	49	c	b	b	a	c	c
7	Benny Warsono	58	c	b	b	a	c	c
8	Kasno	71	c	b	b	b	e	c
9	Paiman	75	c	b	b	b	c	c
10	Wahono Mulyono	75	c	b	b	a	c	c
11	Kusnandi	47	c	b	b	a	e	e

No	Nama	Usia	6	7	8	9	10	11
			Lantai	Dinding	Sanitasi	Kegiatan lain di rumah	Sumber Air minum	Sumber Air mandi
12	Rusmini	43	c	b	b	b, berjualan	c	c
13	Parmin	45	c	b	b	a	c	c
14	Karjo	53	c	b	b	b, berjualan	e	e
15	Murdi	47	c	b	b	a	e	e
16	Sri	42	c	b	b	b, berjualan	c	c

No	Nama	Usia	12	13	14	15	16
			Akses ke pendidikan	Kepemilikan Tnh dan bangn	Cara Tinggal	Sertifikat	Pelibatan
1	Sumpeno	44	a, tdk ada biaya	a	b	a	a
2	Kuswandi	47	a, tdk ada biaya	a	b	a	b gotong royong
3	Tulus	61	a, tdk ada biaya	b	c, bngun sendiri	a	a
4	Rubiyati	47	a, tdk ada biaya	a	b	a	a
5	Yatno	42	a, tdk ada biaya	a	b	a	a
6	Giman	49	a, tdk ada biaya	a	a	a	a
7	Benny Warsono	58	a, tdk ada biaya	b	c, bngun sendiri	a	b kegiatan RT
8	Kasno	71	a, tdk ada biaya	b	c, bngun sendiri	a	a
9	Paiman	75	a, tdk ada biaya	b	c, bngun sendiri	a	a
10	Wahono Mulyono	75	a, tdk ada biaya	a	a	a	b kegiatan RT
11	Kusnandi	47	a, tdk ada biaya	a	b	a	a
12	Rusmini	43	a, tdk ada biaya	a	b	a	a
13	Parmin	45	a, tdk ada biaya	a	a	1	1
14	Karjo	53	a, tdk ada biaya	b	c	1	1
15	Murdi	47	a, tdk ada biaya	a	b	1	1
16	Sri	42	a, tdk ada biaya	a	b	1	1

Tabel
Hasil Rekap Kuesioner Kelurahan Mangkang Wetan

No	Nama	Usia	1	2	3	4	5
			Pekerjaan	Lama Menekuni Pekerjaan	Pendapatan	Pendidikan	Lama Tinggal
1	Musyarofah	40	b	c	a	b	d
2	M Ali Imron	34	b	b	b	c	c
3	Musbichin	37	b	b	b	b	d
4	Karyadi	50	d	c	b	d	d
5	Suprat	64	f, tukang batu	c	b	b	d
6	Kasmani	44	c	c	a	b	d
7	Akhadi	41	c	c	b	b	d
8	Maskanah	47	e	c	a	c	d
9	Jasiah	57	e	c	a	c	d
10	Surahman	43	c	c	a	b	d
11	Rusdi	45	b	c	a	b	d

No	Nama	Usia	6	7	8	9	10	11
			Lantai	Dinding	Sanitasi	Kegiatan lain di rumah	Sumber Air minum	Sumber Air mandi
1	Musyarofah	40	c	b	b	a	c	c
2	M Ali Imron	34	c	a	a	a	c	c
3	Musbichin	37	a	a	a	a	c	c
4	Karyadi	50	c	b	b	a	c	c
5	Suprat	64	c	b	a	a	c	c
6	Kasmani	44	c	b	b	a	c	c
7	Akhadi	41	c	a	a	a	c	c
8	Maskanah	47	a	a	a	b	c	c
9	Jasiah	57	c	b	a	a	c	c
10	Surahman	43	c	b	a	a	c	c
11	Rusdi	45	a	a	b	a	c	c

No	Nama	Usia	12	13	14	15	16
			Akses ke pendidikan	Kepemilikan Tnh dan bangn	Cara Tinggal	Sertifikat	Pelibatan
1	Musyarofah	40	a,tdk punya biaya	a	a	a	a
2	M Ali Imron	34	b	a	a	a	a
3	Musbichin	37	b	a	a	a	a
4	Karyadi	50	a,tdk punya biaya	b	c	a	b
5	Suprat	64	a,tdk punya biaya	a	b	a	b
6	Kasmani	44	a,tdk punya biaya	a	a	a	b
7	Akhadi	41	a,tdk punya biaya	b	c	a	b
8	Maskanah	47	a,tdk punya biaya	b	c	a	b
9	Jasiah	57	a,tdk punya biaya	b	c	a	b
10	Surahman	43	a,tdk punya biaya	b	c	a	b
11	Rusdi	45	a,tdk punya biaya	b	c	a	b

Tabel
Hasil Rekap Kuesioner Kelurahan Rowosari

No	Nama	Usia	1	2	3	4	5
			Pekerjaan	Lama Menekuni Pekerjaan	Pendapatan	Pendidikan	Lama Tinggal
1	Wakirah	66	b	c	a	b	d
2	Ngaderi	37	b	b	a	b	d
3	Sarohan	37	b	b	b	b	d
4	Jamat	32	b	b	a	b	d
5	Rastani	43	b	c	a	b	d
6	Rodi	52	b	c	b	c	d
7	Jaeroni	32	b	b	a	b	d
8	Muslimin	43	b	c	a	c	d
9	Azam	42	b	c	a	c	d
10	Widyanto	54	b	c	b	b	d
11	Budi	56	f	c	a	b	d
12	Wasisto	47	b	c	b	b	d
13	Sri Endang	45	e	c	a	b	d
14	Solikhin	52	f	c	a	b	d
15	Idris	49	b	c	b	c	d
16	Wagimin	54	f	c	a	a	d
17	Suratno	57	f	c	a	a	d
18	Maryatun	47	e	c	a	a	d
19	Pardi	45	b	c	b	c	d

No	Nama	Usia	6	7	8	9	10	11
			Lantai	Dinding	Sanitasi	Kegiatan lain di rumah	Sumber Air minum	Sumber Air mandi
1	Wakirah	66	a	a	a	a	f	c
2	Ngaderi	37	a	a	b	a	f	c
3	Sarohan	37	a	a	b	a	f	d
4	Jamat	32	a	a	a	a	f	d
5	Rastani	43	c	b	a	a	f	d
6	Rodi	52	c	a	b	a	c	c
7	Jaeroni	32	a	a	a	a	c	c
8	Muslimin	43	a	b	a	a	c	c
9	Azam	42	c	b	b	a	c	c
10	Widyanto	54	c	b	b	a	f	d
11	Budi	56	a	a	b	a	f	d
12	Wasisto	47	c	b	a	a	c	c
13	Sri Endang	45	c	b	a	b, berdagang	f	c
14	Solikhin	52	a	a	b	a	c	c
15	Idris	49	c	b	a	a	c	c
16	Wagimin	54	a	b	a	a	f	c
17	Suratno	57	a	a	a	a	d	c
18	Maryatun	47	a	b	a	b, berdagang	d	c
19	Pardi	45	a	a	a	a	d	c

No	Nama	Usia	12	13	14	15	16
			Akses ke pendidikan	Kepemilikan Tnh dan bangn	Cara Tinggal	Sertifikat	Pelibatan
1	Wakirah	66	a, tdk punya biaya	b	c bngun sendiri	b	b pertemuan rutin
2	Ngaderi	37	a, tdk punya biaya	b	c bngun sendiri	b	b pertemuan rutin
3	Sarohan	37	a, tdk punya biaya	b	c peninggalan ortu	b	b pertemuan RT
4	Jamat	32	a, tdk punya biaya	a	a	a	a
5	Rastani	43	a, tdk punya biaya	a	b	a	b
6	Rodi	52	a, tdk punya biaya	b	c	b	b
7	Jaeroni	32	a, tdk punya biaya	a	b	a	a
8	Muslimin	43	a, tdk punya biaya	b	c bngun sendiri	b	b
9	Azam	42	a, tdk punya biaya	b	c bngun sendiri	b	b
10	Widyanto	54	a, tdk punya biaya	b	c bngun sendiri	a	b
11	Budi	56	a, tdk punya biaya	b	c peninggalan ortu	a	b
12	Wasisto	47	a, tdk punya biaya	a	a	a	a
13	Sri Endang	45	a, tdk punya biaya	b	c bngun sendiri	a	a
14	Solikhin	52	a, tdk punya biaya	b	c peninggalan ortu	b	b
15	Idris	49	a, tdk punya biaya	b	c bngun sendiri	a	b
16	Wagimin	54	a, tdk punya biaya	b	c peninggalan ortu	b	b
17	Suratno	57	a, tdk punya biaya	b	c bngun sendiri	b	b
18	Maryatun	47	a, tdk punya biaya	a	b	a	b
19	Pardi	45	a, tdk punya biaya	a	a	a	b

Tabel
Hasil Rekap Kuesioner Kelurahan Mangunsari

No	Nama	Usia	1	2	3	4	5
			Pekerjaan	Lama Menekuni Pekerjaan	Pendapatan	Pendidikan	Lama Tinggal
1	Sukarni	53	b	c	a	b	d
2	Musmin	57	b	c	a	b	d
3	Herman	41	b	c	a	c	d
4	Mustakim	50	b	c	a	b	d
5	Supardi	49	b	c	a	b	c Kab. Semarang mendekati pekerjaan
6	Midi	65	b	c	a	b	d
7	Sumartan	54	a	c	a	b	d
8	Solekan	37	e	c	a	b	d
9	Suroso	49	b	c	a	b	d

No	Nama	Usia	6	7	8	9	10	11
			Lantai	Dinding	Sanitasi	Kegiatan lain di rumah	Sumber Air minum	Sumber Air mandi
1	Sukarni	53	a	a	b	a	c	c
2	Musmin	57	a	a	a	a	c	d
3	Herman	41	a	a	a	b, menjahit	d	d
4	Mustakim	50	a	a	a	a	c	d
5	Supardi	49	a	a	b	a	c	c
6	Midi	65	a	a	a	a	c	d
7	Sumartan	54	a	a	a	a	c	d
8	Solekan	37	a	a	a	a	c	d
9	Suroso	49	a	a	b	a	c	c

12	13	14	15	16
Akses ke pendidikan	Kepemilikan Tnh dan bangn	Cara Tinggal	Sertifikat	Pelibatan
a, keterbatasan biaya	b	c, bangun sendiri	b	b, pertemuan RT
a, keterbatasan biaya	b	c, bangun sendiri	b	b, pertemuan RT
a, keterbatasan biaya	a	b	a	b, pertemuan RT
a, keterbatasan biaya	b	c, peninggalan ortu	b	b, pertemuan RT
a, keterbatasan biaya	a	b	a	b, pertemuan RT
a, keterbatasan biaya	b	c, bangun sendiri	b	b, pertemuan RT
a, keterbatasan biaya	b	c, peninggalan ortu	b	b, pertemuan RT
a, keterbatasan biaya	b	c, bangun sendiri	b	b, pertemuan RT
a, keterbatasan biaya	b	c, peninggalan ortu	b	b, pertemuan RT